



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

2025



**BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami ucapkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga **Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025**, dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang telah diamanahkan kepada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Sehingga sedapat mungkin menyajikan analisis atas kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025. Berbagai data kinerja disajikan setelah melalui proses pengumpulan dan pengukuran yang sistematis agar dapat dimanfaatkan sebagai informasi kinerja yang dapat mendukung perencanaan pembangunan di masa mendatang.

Akhirnya, kami berharap semoga laporan ini dapat memberi manfaat kepada banyak pihak dan berguna sebagai bahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 dalam mendorong terwujudnya tata pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Tanjungpinang, Februari 2026

**KEPALA BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**



Drs. H. DOLI BONIARA, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 197207101992011003

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	2
1.3 Landasan Hukum	2
1.4 Gambaran Umum Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau	3
1.5 Isu-isu Strategis.....	17
BAB II PERENCANAAN KINERJA	19
2.1. Perencanaan Kinerja	19
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025	24
2.3 Program Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau	25
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	28
3.1 Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2025.....	28
3.2 Evaluasi Dan Analisis Realisasi Kinerja Tahun 2025.....	30
3.3 Akuntabilitas Kinerja Keuangan.....	42
BAB IV PENUTUP	47

LAMPIRAN

PENGUKURAN KINERJA

MATRIK CAPAIAN RENCANA AKSI

MATRIKS REKAP CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM PADA TAHUN 2025

MATRIKS CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM PADA TAHUN 2025

DOKUMENTASI



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah bahwa Kedudukan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dan menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengoordinasikan pelaksanaan, dan melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan di Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama, Koordinasi Pelaksanaan dan Monitoring dan Evaluasi yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) ini sebagai perwujudan dalam menyediakan sarana yang dapat digunakan sebagai media penyampaian dokumen pertanggungjawaban kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun sebelumnya (tahun n-1). Sehubungan telah dilakukannya perubahan RPJMD Tahun 2025-2029 Provinsi Kepulauan Riau, maka penyusunan LKJIP Tahun 2025 di Lingkungan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau mengacu pada Rencana Strategis Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029. Hal-hal yang dimuat dalam LKJIP mencakup indikator kinerja utama, perjanjian kinerja, dan permasalahan-permasalahan atau hambatan yang dihadapi pada pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya serta penyelesaian masalah jika sudah dilakukan yang sehingga pada tahun yang akan datang dapat diperbaiki untuk meningkatkan kinerja sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.

1.2 Tujuan

Tujuan penyusunan dan penyampaian LKJIP Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau selama tahun anggaran 2025 dan sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

1.3 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) Pasal 20 Ayat (3)
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 140 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 21);
6. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 67);

8. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 70);
9. Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 909);
10. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 44 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 1064).
11. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 48 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 1068);

1.4 Gambaran Umum Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Berdasarkan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa kewenangan Badan Pengelola Perbatasan Daerah adalah sebagai pelaksana kebijakan di bidang urusan pengelolaan perbatasan. Dengan kewenangan tersebut Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau berkewajiban untuk meningkatkan pelayanan di bidang pengelolaan perbatasan sehingga tercipta tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya sehingga perbatasan menjadi beranda terdepan negara.

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan pengelolaan batas negara dan kawasan perbatasan yang baik. Agar batas negara dan kawasan perbatasan dapat dikelola dengan baik diperlukan kesiapan infrastruktur perbatasan dan pengelolaan sumber daya perbatasan secara optimal. Penyiapan infrastruktur perbatasan

dan pengelolaan sumber daya perbatasan menjadi tugas pokok dan fungsi dari Badan Pengelola Perbatasan Daerah sebagai perangkat daerah yang membidangi pengelolaan perbatasan.

Untuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang tepat, jelas, terukur, dan akuntabel, maka Instansi Pemerintah di tingkat pusat maupun daerah harus menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP).

Penyusunan LKJIP Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 diharapkan dapat memberikan ruang informasi atas realisasi pelaksanaan Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja selama tahun 2025 bagi *stakeholder* maupun unit pengawas sebagai bentuk transparansi, akuntabilitas dan efektifitas atas program dan kegiatan yang dilaksanakan. Laporan ini juga menjadi suatu bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau kepada Gubernur selaku Kepala Daerah sebagai pemegang kuasa tertinggi dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Provinsi Kepulauan Riau.

1. Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau adalah Lembaga Teknis Daerah yang merupakan unsur penunjang tugas Kepala Daerah di bidang program pembangunan perbatasan, yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 909) pasal 351 mempunyai tugas membantu Gubernur membantu Gubernur Kepulauan Riau dalam menetapkan kebijakan program pembangunan

perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengoordinasikan pelaksanaan, dan melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan di Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitas Kerjasama, Bidang Koordinasi Pelaksanaan dan Bidang Monitoring dan Evaluasi yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

Tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau sesuai Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

2. Uraian Tugas dan Fungsi

1. Tugas

Tugas Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau adalah Membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dan menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengkoordinasikan pelaksanaan, dan melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan batas wilayah negara dan Kawasan perbatasan dibidang koordinasi perencanaan dan fasilitas Kerjasama, Koordinasi pelaksanaan dan monitoring dan evaluasi yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang sekretariat, Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitas Kerjasama, Bidang Koordinasi Pelaksanaan, dan Bidang Monitoring dan Evaluasi;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Sekretariat, Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitas Kerjasama, Bidang Koordinasi Pelaksanaan, dan Bidang Monitoring dan Evaluasi;

- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Sekretariat, Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitas Kerjasama, Bidang Koordinasi Pelaksanaan, dan Bidang Monitoring dan Evaluasi;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang Sekretariat, Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitas Kerjasama, Bidang Koordinasi Pelaksanaan, dan Bidang Monitoring dan Evaluasi;
- e. penerapan sistem pengendalian intern pada perangkat daerah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi;
- f. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada unit kerjanya;
- g. penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara periodik kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Perincian tugas dan fungsi masing-masing bidang dikemukakan sebagai berikut:

A. SEKRETARIAT

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, barang milik negara/daerah, arsip dan dokumentasi, serta membantu Kepala perangkat daerah mengkoordinasikan Bidang-Bidang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan dan Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan terkait perencanaan dan keuangan, umum dan kepegawaian;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi perangkat daerah;

- c. penyiapan bahan dan mengkoordinasikan perencanaan program kegiatan dan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang perangkat daerah;
 - d. penyiapan bahan perencanaan anggaran dan penyusunan dokumen anggaran;
 - e. penyiapan dan Penyusunan bahan terkait ketatalaksanaan;
 - f. penyiapan bahan Laporan bulanan, triwulan, semester, tahunan, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, dan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah lingkup perangkat daerah;
 - g. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
 - h. pelaksanaan verifikasi dan pertanggungjawaban keuangan;
 - i. penyiapan bahan pelaporan keuangan perangkat daerah;
 - j. pelaksanaan implementasi akuntabilitas kinerja dan Reformasi Birokrasi perangkat daerah;
 - k. pelaksanaan monitoring dan evaluasi seluruh program kerja perangkat daerah;
 - l. penyusunan dan penilaian Tingkat Kematangan Perangkat Daerah;
 - m. penyusunan dan evaluasi kelembagaan perangkat daerah; dan
 - n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Sekretariat terdiri atas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi umum, administrasi kepegawaian, pengembangan SDM, rumah tangga perlengkapan dan evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara.
 - 2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, dan pengadministrasian umum;
 - b. pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan, kehumasan dan rumah tangga;
 - c. pelaksanaan inventarisasi dan pengelolaan aset/kekayaan milik daerah di lingkungan Badan Pengelola Perbatasan Daerah mulai dari rencana

- kebutuhan, pengadaan, penomoran inventaris, penyimpanan, pendistribusian, penggunaan, perawatan serta inventaris ruangan;
- d. penyiapan dan melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan pegawai;
 - e. penyusunan dan penilaian Tingkat Kematangan Perangkat Daerah;
 - f. penyusunan dan evaluasi kelembagaan perangkat daerah; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

a. BIDANG KOORDINASI PERENCANAAN DAN FASILITASI KERJA SAMA

- (1) Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, merumuskan dan menyusun bahan kebijakan terkait Perencanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan, dan Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri.
- (2) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama mempunyai rincian tugas:
 - a. penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait kebijakan terkait Perencanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan, Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri;
 - b. pelaksanaan menginventarisasi data terkait kondisi, permasalahan dan rencana kebutuhan pembangunan Kabupaten/Kota Kawasan Perbatasan;
 - c. perumusan rencana induk kawasan perbatasan Negara Provinsi Kepulauan Riau;
 - d. perumusan rencana aksi pembangunan kawasan perbatasan;
 - e. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi terkait usulan pembangunan kawasan perbatasan;
 - f. pelaksanaan evaluasi rencana induk pengelolaan kawasan;

- g. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi dalam upaya perlindungan bagi masyarakat Provinsi Kepulauan Riau di luar negeri sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. pelaksanaan fasilitasi, koordinasi dan konsultasi terhadap pelaksanaan kerjasama luar negeri di kawasan perbatasan oleh pemerintah daerah;
- i. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi kerja sama Sosek Malindo Tingkat Provinsi Riau/Kepulauan Riau-Peringkat Negeri Johor/Melaka, IMT-GT, dan kerjasama lainnya yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. BIDANG KOORDINASI PELAKSANAAN

- (1) Bidang Koordinasi Pelaksanaan mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, merumuskan dan menyusun bahan kebijakan terkait Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan dan Potensi Sumber Daya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Koordinasi Pelaksanaan mempunyai rincian tugas:
 - a. penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan, Potensi Sumber Daya;
 - b. Pelaksanaan koordinasi terhadap pelaksanaan pembangunan Kawasan Perbatasan antar pemerintah daerah dan/atau antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga;
 - c. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur kawasan perbatasan negara sesuai dengan rencana kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Pelaksanaan fasilitasi dalam upaya peningkatan pemahaman/pengetahuan dan keahlian melalui pendidikan dan pelatihan (hard skill dan soft skill) kepada masyarakat perbatasan;

- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

c. BIDANG MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Bidang Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, merumuskan dan menyusun bahan kebijakan terkait Pengawasan dan Evaluasi, Pengendalian Informasi Perbatasan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Monitoring dan Evaluasi mempunyai rincian tugas:
 - a. penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait Pengawasan dan Evaluasi, Pengendalian Informasi Perbatasan;
 - b. pelaksanaan menginventarisasi data dan informasi pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan;
 - c. pengolahan dan menelaah data yang berkenaan dengan pelaksanaan program kegiatan pembangunan kawasan perbatasan;
 - d. pelaksanaan dan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan;
 - e. penyusunan laporan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

d. JABATAN FUNGSIONAL.

Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. **STRUKTUR ORGANISASI**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau, sebagai berikut :

1. Sekretariat

Sekretariat, terdiri dari :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2. Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitas Kerja Sama

3. Bidang Koordinasi Pelaksanaan

4. Bidang Monitoring dan Evaluasi

5. Kelompok Jabatan Fungsional



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
TIPE A
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

LAMPIRAN XXXIV : PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR : 12 TAHUN 2023
TANGGAL : 12 JUNI 2023



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

ANSAR AHMAD

Pegawai merupakan unsur strategis dalam pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah. Keberadaan pegawai bertujuan untuk melaksanakan tugas secara profesional, transparan, dan akuntabel dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pegawai berperan sebagai pelaksana operasional yang menentukan efektivitas kinerja serta keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis. Kapasitas dan jumlah pegawai sangat memengaruhi kinerja organisasi. Pada Tahun 2025, jumlah pegawai di Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau tercatat sebanyak 26 pegawai. Pegawai Badan Pengelola Perbatasan didominasi oleh laki-laki dengan jumlah pegawai 20 dan pegawai perempuan 6 orang.

Tabel. 1.1. Jumlah Pegawai Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Menurut Jenis Kelamin

NO	BIDANG	PEREMPUAN	LAKI-LAKI	JUMLAH
1	SEKRETARIAT	1	9	10
2	BIDANG KOORDINASI PERENCANAAN DAN FASILITASI KERJA SAMA	1	0	1
3	BIDANG KOORDINASI PELAKSANAAN	2	3	5
4	BIDANG MONITORING DAN EVALUASI	0	2	2
5	KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL	2	6	8
	JUMLAH	6	20	26

*Sumber Data : Aplikasi <https://silat.kepriprov.go.id/>

Tabel. 1.2. Jumlah Pegawai Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Menurut Tingkat Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	S-3	1	0	1
2	S-2	6	4	10
3	S-1	6	1	7
4	D-III	1	1	2
5	SLTA	6	0	6
	TOTAL	20	6	26

*Sumber : Silat Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

3. Aspek Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan, karena dampaknya akan signifikan bagi kondisi lingkungan hidup daerah. Isu strategis berpengaruh terhadap kinerja pelayanan di masa datang, dengan mempertimbangkan isu-isu dan dinamika nasional maupun regional.

Perumusan isu-isu strategis dilakukan dengan menganalisis berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis serta melakukan telaahan terhadap visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, Renstra Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan juga Renstra Badan Nasional Pengelola Perbatasan, sehingga rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta kebijakan pemerintah dalam jangka menengah.

4. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang diperlukan digunakan untuk operasional kantor dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Nilai aset yang dimiliki Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp. 1.098.629.450 (Satu Miliar Sembilan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah) terdiri dari Alat Angkutan sebesar Rp. 446.800.000 (Empat Ratus Empat Puluh Enam Juta Delapanratus Ribu Rupiah), Alat Kantor dan Rumah Tangga Sebesar Rp. 629.529.450 (Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah) dan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar sebesar Rp 22.300.000 (Dua Puluh Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) Sarana dan prasana yang dikelola per Desember 2025 adalah sebagai berikut:

**Tabel. 1.3. Aset Yang Dimiliki Badan Pengelola Perbatasan Daerah
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025**

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Total Harga
1.	Alat Angkutan	1	Rp 446.800.000
2.	Alat Kantor dan Rumah Tangga	83	Rp 629.529.450
3.	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	2	Rp 22.300.000
J U M L A H		86	Rp 1.098.629.450

**Sumber : Buku Inventaris Barang Badan Pengelola Perbatasan Daerah
Provinsi Kepulauan Riau 2025*

**Tabel. 1.4. Rincian Aset yang Dimiliki Badan Pengelola Perbatasan Daerah
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025**

No.	Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor Register	Merk/ Type	Tahun Pembelian	Asal usul	Harga (ribuan Rp)
1	02.05.01.05.003	Papan Visual/ Papan Nama	000001 s/d 000013	PAPAN NAMA	2022	Pembelian	3.246,75
2	02.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	000001 s/d 000002	INDACHI CASSOVA	2022	Pembelian	1.900,00
3	02.05.02.04.001	Lemari Es	000001	AQUA AQR-D181	2022	Pembelian	1.669,00
4	02.05.02.06.002	Televisi	000001 s/d 000002	SHARP LED TV 2T-C50DF11	2022	Pembelian	15.300,00
5	02.05.02.06.038	Dispenser	000001	SHARP SWD-66EHL-BS	2022	Pembelian	3.650,00
6	02.05.02.06.057	Karpet	000001	Karpet ASPEN	2022	Pembelian	19.780,20
7	02.05.02.06.059	Gordyin/Kray	000001 s/d 000002	-	2022	Pembelian	12.250,00
8	02.05.03.01.005	Meja Kerja Pejabat Eselon III	000009 s/d 000010	MAXI FURNITURE	2022	Pembelian	12.746,00
9	02.05.03.01.006	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	000010	Minotti	2022	Pembelian	8.788,00
10	02.05.03.03.004	Kursi Kerja Pejabat EselonII	000002	SAVELLO, SOLITER H	2022	Pembelian	7.215,00
11	02.05.03.03.008	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	000021 s/d 000022	SAVELLO LUXUS LTZ	2022	Pembelian	5.200,00
12	02.05.03.03.008	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	000023 s/d 000024	SAVELLO MEGAN L	2022	Pembelian	7.600,00

13	02.05.03.05.008	Kursi Hadap Depan Meja Kerja lainnya	000001 s/d 000010	SAVELLO RUSSO VT 1 A	2022	Pembelian	12.598,50
14	02.10.01.02.001	P.C Unit	00001 s/d 00002	AIO LENOVO 3-22ITL6	2022	Pembelian	27.400,00
15	02.10.01.02.002	Lap Top	00001	ASUS M3400QA-OLED	2022	Pembelian	15.200,00
16	02.10.01.02.002	Lap Top	00002 s/d 00005	HP 240 G8 (36F56PA)	2022	Pembelian	65.960,00
17	02.10.01.02.002	Lap Top	00006	ASUS ZENBOOK UM4325UA OLED 713	2022	Pembelian	17.400,00
18	02.10.01.02.002	Lap Top	00007	LENOVO YOGA 6-13AC6	2022	Pembelian	17.150,00
19	02.10.01.02.002	Lap Top	00008	ASUS ZENBOOK UM425UAZ OLED	2022	Pembelian	17.300,00
20	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	0001 s/d 0004	Epson L1210	2022	Pembelian	16.400,00
21	02.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	0005 s/d 0008	L3250	2022	Pembelian	11.400,00
22	02.10.02.03.007	External	000001	Epson L1210	2022	Pembelian	1.000,00
23	02.10.02.05.001	Peralatan Komputer lainnya	000001	IPAD PRO11 128 GB	2022	Pembelian	19.400,00
24	1.3.2.02.001.001.003	Station Wagon	000001	Toyota /Kijang Innova zenix 2.0 V CVT / Kijang Innova	2023	Pembelian	446.800.
25	1.3.2.05.002.001.048	Sofa	000001		2023	Pembelian	9.050.
26	1.3.2.05.002.006.057	Karpet	000002	Karpet Monaco Wool / M8 164 Royal blue HT 450	2023	Pembelian	39.960.
27	1.3.2.05.002.006.059	Gordyin/Kray	0004 s/d 0006	Blackout Gold/ Blackout Gold	2023	Pembelian	18.000
28	1.3.2.09.004.002.031	Kamera Digita	000001	CANON EOS M10	2023	Pembelian	6.000
29	1.3.2.09.004.002.031	Kamera Digita	000002	SONY A6400	2023	Pembelian	16.300
30	1.3.2.10.001.002.001	P.C Uni	0003 s/d 0006	AIO Acer C24- 1750 / AIO Acer C24-1750	2023	Pembelian	73.200

31	02.10.01.02.002	Lap Top	00009	ASUS / P1412CEA_ID	2022	Pembelian	17.760
32	02.10.01.02.002	Lap Top	00010- 00013	ACER TRAVELMATE P214	2023	Pembelian	72.000
33	1.3.2.10.001.002.009	Tablet PC	00002- 00003	SAMSUNG GALAXY TAB/ TAB S9 8/128GB WIFI + CELL	2023	Pembelian	33.700
34	1.3.2.10.002.003.003	Printer	00009- 00012	Ecotank L3256	2023	Pembelian	15.656
35	1.3.2.10.002.003.004	Scanner	000001	Scanner Epson WorkForce DS-1630	2023	Pembelian	8.750
36	1.3.2.15.004.005.006	Air Conditioning (AC)	000001 s/d 000002	AC PANASONIC 2PK PN18WKJ/ PN18WKJ	2023	Pembelian	20.900
Jumlah Barang			86	Jumlah Harga		Rp 1.098.629,45	

*Sumber : SIMDA BMD (Barang Milik Daerah)

1.5 Isu-isu Strategis (Bab III Renstra)

Isu-isu strategis dalam Rencana Strategis Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 adalah:

1. Sumber daya aparatur sipil negara pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah kebutuhan analisis beban kerja dibutuhkan 58 ASN secara eksisting jumlah ASN yang ada saat ini hanya 21 orang sehingga hanya mampu mencakup 36% beban kerja yang ada, demikian juga dengan kualitas SDM dikawasan perbatasan secara umum;
2. Belum optimalnya upaya pengawasan dalam rangka peningkatan pertahanan keamanan dan penegakan hukum dibatas wilayah negara;
3. Belum optimalnya upaya pengawasan dikawasan perbatasan akibat rendahnya dukungan sarana prasarana dan teknologi pengawasan pertahanan keamanan dan penegakan hukum;

4. Belum optimalnya Kerjasama Regional perbatasan negara melalui Kerjasama yang sudah eksisting seperti Sosek Malindo, IMT-GT, Sijori dan Kerjasama regional lainnya;
5. Minimnya ketersediaan infrastruktur jalan/jembatan, transportasi, telekomunikasi, dan kelistrikan dalam skala regional (koneksi PKSN dan pusat pertumbuhan) dan lokal dikawasan perbatasan;
6. Belum optimalnya penyelenggaraan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan dikawasan perbatasan;
7. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam peningkatan nilai tambah potensi SDA;
8. Belum optimalnya peran sarana dan prasarana ekonomi dalam mendukung proses produksi, pengolahan, dan pemasaran;
9. Minimnya akses terhadap pelayanan sarana dan prasarana dasar pemukiman yang memadai, minimnya akses terhadap pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang memadai, rendahnya kualitas SDM akibat belum optimalnya upaya peningkatan kualitas SDM, belum mantapnya system tata kelola perbatasan, serta belum memadainya kualitas sarana dan prasarana pelayanan pemerintahan.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

2.1 Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja adalah salah satu aspek yang sangat penting dalam manajemen kinerja organisasi. Dalam perencanaan kinerja dirumuskan sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai, begitu juga indikator keberhasilan pencapaiannya sesuai yang tercantum dalam Rencana Strategis Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau 2025-2029.

Rencana Strategis tersebut merupakan penjabaran serta mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah, dengan **Visi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau** adalah:

” Terwujudnya Kepulauan Riau Maju, Makmur, dan Merata”

Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau mempunyai tugas membantu Gubernur dalam rangka mensukseskan pelaksanaan **Misi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau ke 4 (empat)**, yaitu

” Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Demokratis, Terbuka, Berbasis Teknologi Informasi dan Berorientasi Pelayanan ”.

Bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sesuai dengan pasal 272 ayat 1 UU 23 Tahun 2014 yang berbunyi “Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD”. Kemudian dalam ayat 2 disebutkan

bahwa Renstra-PD memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

1. Tujuan dan Sasaran Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi

Kepulauan Riau

Rumusan tujuan dan sasaran yang akan dicapai Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam kurun waktu tahun 2025-2029, yaitu:

Tujuan : Meningkatkan Pelayanan Prima Bagi Masyarakat

Indikator Tujuan : Indeks Pelayanan Publik

Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan dalam mewujudkan wilayah perbatasan yang kondusif dan produktif

Indikator Sasaran : Persentase Rencana Aksi Pembangunan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan yang terealisasi

Dokumen Perencanaan Kawasan Perbatasan dan Batas Wilayah Negara untuk jangka menengah disebut dengan Rencana Induk yang berlaku selama 5 Tahun, Kemudian Dokumen ini diturunkan menjadi Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan dan Batas Wilayah Negara yang di undangkan setiap tahun.

Penyusunan Dokumen Perencanaan ini merupakan usulan-usulan dari Lokasi Prioritas di Kabupaten/Kota Perbatasan dan Stakeholder Perbatasan lainnya yang dihimpun oleh Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau pada Forum Rakor Perbatasan yang dilaksanakan setiap tahun sebelum Musrenbang Provinsi dan Musrenbang Nasional.

2. Strategi

Strategi adalah cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran. Strategi ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah, dorongan, dan kesatuan pandang dalam melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan program dan kegiatan suatu organisasi. Kebijakan pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau meliputi kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan Gubernur Kepulauan Riau dan kebijakan intern Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Berbagai kebijakan yang mendasari pelaksanaan tujuan dan sasaran Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Sasaran – Kebijakan – Program

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya pelayanan prima bagi masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan dalam mewujudkan wilayah perbatasan yang kondusif dan produktif	Peningkatan koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi program pembangunan di kawasan perbatasan dengan pemerintah pusat dan daerah, mencakup pengelolaan batas negara, pengelolaan potensi dan pemenuhan infrastruktur di kawasan perbatasan	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik	• Peningkatan koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi dalam pengelolaan Batas Negara
				• Penguatan koordinasi dalam pelaksanaan Program Kerjasama Antar Negara.
				• Penyediaan data dan informasi potensi kawasan perbatasan di Kecamatan Lokpri dan Pulau Terluar
				• Peningkatan koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi program pengelolaan potensi kawasan perbatasan, baik dalam pembangunan SDM maupun pengembangan ekonomi.
				• Peningkatan koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi program pemenuhan infrastruktur dasar dan penunjang perekonomian di Kecamatan Perbatasan Prioritas, desa tertinggal, dan Pulau-Pulau Kecil Terluar dan Terdepan

3. Indikator Kinerja Utama Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang dituangkan melalui perencanaan strategis suatu organisasi. (Moeheriono, 2012). Kinerja adalah suatu keadaan yang berkaitan dengan keberhasilan organisasi dalam menjalankan misi yang dimilikinya yang dapat diukur dari tingkat produktivitas, kualitas pelayanan, responsibilitas, dan akuntabilitas. Kinerja organisasi adalah sejumlah keluaran (output) berupa barang atau jasa yang dihasilkan dari kegiatan dari pelaksanaan uraian tugas dan fungsi.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja memberikan penjelasan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, mengenai apa yang diukur untuk menentukan apakah tujuan sudah tercapai. (Tim BPKP, PermenPAN & RB Nomor 20/I/M.PAN/11/2008).

Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang sebagai urutan keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) telah mengacu pada Renstra Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau serta RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025-2029. IKU ditetapkan dengan memilih indikator kinerja yang ada dalam Renstra Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau 2025-2029 yang memiliki fokus pada perspektif *stakeholder*. Sedangkan yang fokusnya pada peningkatan kapasitas internal organisasi (*internal bussines process*).

Penyusunan IKU dalam SAKIP telah ditetapkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007, Tanggal 31 Mei 2007, tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Indikator Kinerja Utama (IKU) instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi meliputi indikator kinerja keluaran (output) dan hasil (outcome). Dalam proses perencanaan setiap tahun anggaran setiap pimpinan unit kerja/organisasi selanjutnya menetapkan IKU dalam sebuah perjanjian kinerja sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Integrasi Sistem Perencanaan, Keuangan, Akuntansi dan Akuntabilitas Kinerja.

Adapun yang menjadi tujuan dalam penetapan IKU adalah untuk :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Indikator Kinerja Program Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang akan digunakan untuk periode tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama (IKU)

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya kualitas pelayanan dalam mewujudkan wilayah perbatasan yang kondusif dan produktif	Persentase Rencana Aksi Pembangunan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan yang terealisasi	%	Jumlah Kegiatan Rencana Aksi Pembangunan Batas Wilayah Negara dan Kawasan yang terealisasi dibagi Jumlah Total Rencana Aksi	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama Bidang Koordinasi Pelaksanaan Bidang Monitoring dan Evaluasi

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				Pembangunan yang telah ditetapkan dikali 100%		

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja adalah merupakan pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. (PermenPAN & RB Nomor 53 tahun 2014).

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Tahun 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM
1	Terwujudnya Kawasan Perbatasan Sebagai Beranda Terdepan yang Berdaulat melalui pembangunan Infrastruktur dan Pengintegrasian antar Pulau	Persentase implementasi pembangunan Lokasi Prioritas Perbatasan dan kerjasama perbatasan dalam Rencana Aksi pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (persentase)	60%	Program Pengelola Perbatasan
2	Terwujudnya akuntabilitas kinerja pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Nilai SAKIP Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau	B	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

**)Lihat pada lampiran "Perjanjian Kinerja Tahun 2025"*

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM
1	Meningkatnya kualitas pelayanan dalam mewujudkan wilayah perbatasan yang kondusif dan produktif	Persentase Rencana Aksi Pembangunan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan yang terealisasi	72,73%	Program Pengelola Perbatasan
2	Meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan di bidang perbatasan	Nilai SAKIP Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau	B	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Perjanjian Kinerja di tahun 2025 diawali dengan Penandatanganan Bersama Gubernur Kepulauan Riau H. ANSAR AHMAD, S.E, M.M, di awal tahun bersamaan dengan penyerahan Daftar Pagu Anggaran Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025.

Pada bulan Oktober Tahun 2025 terjadi perubahan Perjanjian Kinerja (PK) OPD karena menyesuaikan perubahan RPJMD dan Renstra, berdasarkan capaian Renaksi Pembangunan Kawasan Perbatasan Tahun 2025 sebesar 60 % sehingga terjadi perubahan Target Indikator Kinerja Tahun 2025 sebesar 72,73 %, karena realisasi tahun 2024 telah melebihi target indikator kinerja sebesar 72, 26 %.

2.3 Program Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepri

Program Pengelola Perbatasan yang menjadi urusan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepri dapat dilihat dalam tabel di bawah :

Tabel 2.5

Program Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepri Tahun 2025

No.	Program	Indikator Program	Target	Formulasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Pengelola Perbatasan	Persentase Program Kegiatan Rencana Aksi Pengelolaan Perbatasan dan Kerja Sama Perbatasan yang Terealisasi (Dengan Satuan:Persentase)	55 %	Jumlah Usulan kegiatan pembangunan dan kerjasama Perbatasan yang diimplementasikan dibagi Jumlah Total Rencana Aksi dan Usulan Kerjasama Perbatasan Dikali 100%
		Persentase Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi, dan Inventarisasi Kewilayahan Perbatasan yang Terealisasi (Dengan Satuan:Persentase)	100 %	Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi, dan Inventarisasi Kewilayahan Perbatasan yang Terealisasi
		Persentase Pelaksanaan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Dengan Satuan:Persentase)	100 %	Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi yang terealisasi

Tabel 2.6

Program Perubahan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025

No.	Program	Indikator Program	Target	Formulasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Pengelola Perbatasan	Persentase usulan yang menjadi rencana aksi pembangunan kawasan perbatasan dari Kab/Kota (%)	45 %	Jumlah usulan yg menjadi renaksi pembangunan kawasan perbatasan dibagi jumlah usulan x 100

No.	Program	Indikator Program	Target	Formulasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Persentase kawasan perbatasan yang dikembangkan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Pengelolaan Kawasan Perbatasan (%)	20,69 %	Kondisi eksisting struktur tata ruang kab bintan dibagi jumlah struktur ruang Kabupaten Bintan sesuai perpes 43 2020 tentang rencana tata ruang kawasan negara Provinsi Kepri x 100
		Persentase rencana aksi Pembangunan kawasan perbatasan yang dimonitoring (%)	27,59 %	Jumlah rencana aksi pembangunan kawasan perbatasan yg diawasi dibagi jumlah total renaksi pembangunan kawasan perbatasan tahun berjalan x 100

Perubahan program disesuaikan dengan kinerja bidang sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025-2029.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2025

Akuntabilitas kinerja dalam format Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau tidak terlepas dari Perencanaan Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) serta Perjanjian Kinerja (PK). Untuk dapat mengukur keberhasilan setiap target kinerja tentunya melakukan perbandingan antara target kinerja dengan capaian kinerja. Setiap pengukuran didasari oleh indikator yang telah ditetapkan sebelum pelaksanaan kegiatan. Beberapa hal yang dijadikan pengukuran kinerja adalah pernyataan kinerja sasaran strategis yang kemudian ditentukan dengan indikator sasaran dan dijadikan sebagai tolak ukur perhitungan keberhasilan kinerja, untuk disajikan data capaian kinerja Tahun 2025.

Adapun rumus dalam memberikan penilaian tingkat realisasi kinerja setiap sasaran, menggunakan formula sebagai berikut :

- a. Tingkat Realisasi Positif

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

- b. Tingkat Realisasi Negatif

Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100 \%$$

c. Kesimpulan Capaian Sasaran

Keberhasilan atau kegagalan suatu sasaran dapat diambil dengan cara melakukan rata-rata atas capaian indikator kinerja yakni menjumlahkan masing-masing capaian indikator kinerja dibagi dengan jumlah indikator kinerja dalam satu sasaran tersebut.

d. Nilai capaian masing-masing sasaran dan indikator kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Ordinal

NO	RENTANG CAPAIAN Realisasi Negatif	RENTANG CAPAIAN Realisasi Positif	KATEGORI CAPAIAN
1.	Kurang dari 55%	Lebih 100%	Sangat Baik
2.	55% sampai 75%	75% sampai 100%	Baik
3.	75% sampai 100%	55% sampai 75%	Cukup
4.	Lebih 100%	Kurang dari 55%	Kurang

Capaian Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Pada setiap awal tahun anggaran Perangkat Daerah memiliki ketetapan kinerja yang dijadikan Perjanjian Kinerja Pimpinan atau Kepala Daerah, dan tentunya Perjanjian Kinerja tersebut telah menyesuaikan dengan rencana kerja jangka menengah yang termuat dalam RPJMD dan Renstra. Adapun Perjanjian Kinerja antara Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau dengan Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 3.2
Realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian	Kategori
1	2	3	4	5	$6 = (5/4) * 100$	7
1	Meningkatnya kualitas pelayanan dalam mewujudkan wilayah perbatasan yang kondusif dan produktif	Persentase Rencana Aksi Pembangunan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan yang terealisasi	72,73%	72,97%	100, 33 %	Sangat Baik
2	Meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan di bidang perbatasan	Nilai SAKIP Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau	B	BB	BB	Sangat Baik

**)Lihat pada lampiran "Pengukuran Kinerja Tahun 2025"*

3.2 Evaluasi Dan Analisis Realisasi Kinerja Tahun 2025

Selanjutnya hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau dapat dianalisa sebagai berikut :

Tujuan : Meningkatkan pelayanan prima bagi masyarakat.
Indikator Tujuan : Indeks pelayanan publik.

Dalam rangka terwujudnya kualitas tata perencanaan, pengelolaan, pengawasan dan koordinasi sinkronisasi pembangunan kawasan perbatasan yang baik, maka perlu didukung dan dilakukan fasilitasi koordinasi dan konsultasi baik secara horizontal maupun vertikal agar pengelolaan dan pembangunan kawasan perbatasan menjadi lebih baik. Tentunya dengan tambahan dukungan secara teknis dari stakeholder terkait dalam mempersiapkan kebutuhan

infrastruktur perbatasan dan pengelolaan sumber daya perbatasan secara optimal. Agar tujuan tersebut dapat terealisasi dan optimal di lapangan maka sinergitas, fasilitasi dan koordinasi menjadi kunci utama untuk menjembatani antara kebutuhan (BWN-KP) dan implementasinya (OPD Teknis), dimana kerja tersebut menjadi tugas pokok dan fungsi dari Badan Pengelola Perbatasan Daerah sebagai perangkat daerah yang membidangi pengelolaan perbatasan.

Oleh karenanya untuk menjalankan Program Pengelola Perbatasan dengan target indikator kinerja yaitu tercapainya realisasi rencana aksi pembangunan perbatasan, dimana acuan dasar pelaksanaan program kegiatan adalah Renduk yang telah ditetapkan oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia. Berdasarkan Rencana Induk yang telah ditetapkan maka diturunkan menjadi Rencana Aksi Tahunan yang memuat program kegiatan secara rinci, yang mana dalam dokumen program/kegiatan Pembangunan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan telah ditetapkan tersebut, terdapat sebanyak 74 program kegiatan yang pelaksanaannya berada di 5 Kabupaten/Kota, tersebar pada 25 Kecamatan Lokasi Prioritas dan 22 terluar. Sehingga target indikator kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau berjumlah 74 Kegiatan pada Tahun 2025.

Kontribusi Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau terhadap Indeks Pelayanan Publik diperoleh dari pengukuran Indeks Pembangunan Kawasan Perbatasan (IPKP) Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN Ranai) diperoleh sebesar nilai IPKP PKSN Ranai Tahun 2024 sebesar 0,48, hasil penilaian pengukuran IPKP PKSN Ranai, sebagaimana berikut ini :

1. Pusat Pelayanan Kepabeanan, Imigrasi, Dan Karantina (0,40);
2. Pusat Kegiatan Pertahanan Dan Keamanan Negara (0,50);
3. Pusat Pelayanan Sistem Angkutan Umum Penumpang dan Angkutan Barang (-);

4. Pusat Pelayanan Transportasi Laut (0,45);
5. Pusat Pelayanan Transportasi Udara (0,45);
6. Pusat Perdagangan Dan Jasa (0,30);
7. Pusat Industri Pengolahan Dan Jasa Hasil Pertanian (0,45);
8. Pusat Industri Pengolahan Dan Jasa Hasil Kehutanan (-);
9. Pusat Industri Pengolahan Dan Jasa Hasil Perikanan (0, 45);
10. Pusat Pengembangan Pariwisata (0,30);
11. Pusat Pemerintahan (0,65);
12. Pusat Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan (0, 51).

Selanjutnya berdasarkan data diatas, rincian realisasi rencana aksi pembangunan perbatasan dapat digambarkan sebagaimana tabel berikut di bawah ini :

Gambar 3.1
Gambar Realisasi Indikator Kinerja



Tabel 3.3
Tabel Perbandingan Evaluasi Realisasi
Rencana Aksi Pembangunan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan
Tahun 2025

NO	URAIAN	2022		2023		2024		2025	
		T	R	T	R	T	R	T	R
1	Persentase implementasi pembangunan Lokasi Prioritas Perbatasan dan kerjasama perbatasan dalam Rencana Aksi pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (persentase) Tahun 2022, 2023 Indikator tidak melibatkan Variable Kerjasama Perbatasan*	35%	49,47%	45%	76,68%	55%	70,62%		
2	Persentase Rencana Aksi Pembangunan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan yang terealisasi							72,73%	72,97%

Berdasarkan gambar 3.1 dan tabel 3.3 diatas, dapat diuraikan bahwa target realisasi rencana aksi pembangunan perbatasan pada tahun 2025 sebesar 72,73% setelah dilakukan evaluasi dan monitoring, maka diperoleh realisasi rencana aksi pembangunan perbatasan dan kerjasama perbatasan berdasarkan program kegiatan yang ditetapkan sebesar 72,97% melebihi target yang ditetapkan sebesar 72,73% dengan penilaian sebagai kategori Sangat Baik.

SASARAN STRATEGIS BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Dalam rangka mencapai tujuan, Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau telah menetapkan dalam dokumen rencana strategis yaitu Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target yang akan dicapai disetiap tahunnya. Adapun Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau adalah :

Sasaran Strategis “ Meningkatkan kualitas pelayanan dalam mewujudkan wilayah perbatasan yang kondusif dan produktif” .

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi				
				2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya kualitas pelayanan dalam mewujudkan wilayah perbatasan yang kondusif dan produktif *Tahun 2022, 2023 Indikator tidak melibatkan Variable Kerjasama Perbatasan*	Persentase Rencana Aksi Pembangunan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan yang terealisasi	72,73	-	49,47%	76,68%	70,62%	72,97

Pada kelompok sasaran strategis yaitu “Meningkatnya kualitas pelayanan dalam mewujudkan wilayah perbatasan yang kondusif dan produktif”, dapat dilihat dalam tabel 3.4 bahwa dari indikator kinerja tersebut, realisasi indikator kinerjanya sebesar 72,97 % diatas target tahun 2025 sebesar 72,73 %. Kedepannya Kinerja Sasaran Strategis akan dipertahankan atau ditingkatkan dengan tetap memberikan data dukung yang sesuai. Adapun faktor penyebab yang mendukung keberhasilan indikator kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau adalah:

- Perlunya data eksisting kebutuhan pembangunan kawasan perbatasan;
- Data hasil pembangunan kawasan perbatasan yang telah dilaksanakan;

- Perlunya dukungan kebijakan dari Kepala Daerah dalam membangun Pembangunan dikawasan Perbatasan.
- Terjalannya koordinasi yang baik di lintas sektoral dan Badan Pengelola Perbatasan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RENSTRA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2025	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6=5/4*100
1	Meningkatnya kualitas pelayanan dalam mewujudkan wilayah perbatasan yang kondusif dan produktif	Persentase Rencana Aksi Pembangunan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan yang terealisasi	72,73	72,97	100, 33%

Realisasi implementasi pembangunan Lokasi Prioritas Perbatasan dan kerjasama perbatasan dalam Rencana Aksi pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan

Pencapaian Sasaran "Rencana Aksi Pembangunan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan" dapat diukur dari indikator kinerja realisasi rencana aksi pembangunan kawasan perbatasan dengan perhitungan Program/kegiatan Pembangunan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan yang terdapat pada 5 Kabupaten dan 25 Kecamatan Perbatasan Prioritas (KPP) serta 22 terluar. Adapun rumus perhitungan pencapaian realisasi kinerja sebagai berikut:

$$\text{Realisasi Kinerja} = \frac{\text{Jumlah Kegiatan Rencana Aksi Pembangunan Batas Wilayah Negara dan Kawasan yang terealisasi}}{\text{Jumlah Total Rencana Aksi Pembangunan yang telah ditetapkan}} \times 100 \%$$

$$\text{Realisasi Kinerja} = \frac{54}{74} \times 100 \% = 72,97 \%$$

Tabel 3.6
Capaian Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja	Jumlah Kegiatan	Realisasi	Persentase (%)
1	Rencana Aksi Pembangunan	74	54	72,97
	TOTAL	74	54	72,97

Berdasarkan hasil evaluasi Rencana Aksi Pembangunan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan diperoleh hasil yaitu, realisasi program/kegiatan rencana Aksi Pembangunan Lokasi Prioritas Perbatasan sebanyak 54 Program/kegiatan, sedangkan jumlah program kegiatan rencana aksi pembangunan tahun 2025 sebanyak 74 Program/kegiatan. Adapun target realisasi kinerja tahun 2025 ditetapkan sebesar 72,73% maka berdasarkan perhitungan rumus diatas diperoleh target realisasi kinerja sebesar 72,97%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa realisasi kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau dapat tercapai.

Sehingga capaian rencana aksi pembangunan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 sebesar 100 % atau dapat dikatakan dalam **Kategori Sangat Baik**. Peningkatan indikator yang dilakukan oleh Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau yaitu:

- Update data pembangunan yang belum dan telah dilaksanakan;

- Dilakukannya koordinasi dengan Kementrian lintas sektoral dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- Suport anggaran dari pusat berupa dana dekonsentrasi dan daerah terhadap pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan;
- Adanya koordinasi dengan BNPP RI dan Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten/Kota terkait dengan realisasi rencana aksi.

Permasalahan/Kendala yang dihadapi pada indikator ini pada dasarnya dalam Pelaksanaan monitoring rencana aksi Pembangunan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Provinsi Kepulauan Riau adalah kondisi geografis yang menyebabkan lokasi kegiatan tidak dapat dimonitoring secara maksimal, biaya yang cukup tinggi dan keterbatasan anggaran monitoring hingga ke pulau-pulau terluar, belum sinkronnya program kegiatan pembangunan kawasan perbatasan dengan lintas instansi terkait, serta usulan kerjasama dari Stakeholder yang belum dapat diukur dengan Kompetibel. Terdapat deviasi kebutuhan anggaran pada renstra dengan DPA sehingga pelaksanaan kegiatan tidak maksimal.

STRATEGI PERBAIKAN KINERJA

Persentase Rencana Aksi Pembangunan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan yang terealisasi

Melaksanakan rapat koordinasi monitoring dan evaluasi bersama Kabupaten/Kota tentang data pelaksanaan pembangunan rencana aksi yang telah ditetapkan dalam rencana induk perbatasan.

Perlu dibangunnya sistem monitoring real time berbasis website dengan Geospasial.

Strategi yang akan dilakukan untuk tahun depan adalah melaksanakan rapat koordinasi monitoring dan evaluasi bersama Kabupaten/Kota tentang data pelaksanaan pembangunan rencana aksi yang telah ditetapkan dalam rencana induk perbatasan, serta perlu dibangunnya sistem monitoring real time berbasis website dengan Geospasial.

Efisiensi anggaran untuk mencapai tujuan/sasaran ini dapat dilihat dari program/kegiatan yang mendukung capaian tujuan/sasaran ini. Adapun Programnya adalah Program Pengelolaan Perbatasan, dengan Kegiatan Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama, Kegiatan Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan, Kegiatan Monitoring dan Evaluasi. Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian sasaran ini, adalah sebesar Rp. 180.477.544,- atau 87,46% dari total pagu sebesar Rp. 206.359.798,- Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 12,54% dari pagu yang ditentukan.

Efisiensi anggaran untuk mencapai tujuan/sasaran ini dapat dilihat dari program/kegiatan yang mendukung capaian tujuan/sasaran ini. Adapun Programnya adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian sasaran ini, adalah sebesar Rp. 5.949.691.640,- atau 91,44% dari total pagu sebesar Rp. 6.506.598.126,- Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 8,56% dari pagu yang ditentukan.

CAPAIAN KINERJA TERHADAP INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025

Indikator Kinerja Utama yang dilaporkan pada kesempatan ini adalah Indikator Kinerja Utama yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Rencana Strategis Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 Provinsi Kepulauan Riau, yaitu :

Tabel 3.7
Indikator Kinerja Utama
Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepri
Tahun 2025-2029

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Formulasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan dalam mewujudkan wilayah perbatasan yang kondusif dan produktif	Persentase rencana aksi pembangunan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan yang teralisasi	72,73%	Jumlah Kegiatan Rencana Aksi Pembangunan Batas Wilayah Negara dan Kawasan yang terealisasi dibagi Jumlah Total Rencana Aksi Pembangunan yang telah ditetapkan dikali 100%	72,97%

CAPAIAN KINERJA TERHADAP TARGET NASIONAL 2025

Badan Pengelola Perbatasan Daerah merupakan OPD Pendukung dari Indikator Utama yaitu Pelayanan Publik yang diampu oleh Biro Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau sehingga target nasional akan mengacu kepada target yang di tetapkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

Tabel 3.8
Capaian Kinerja Terhadap Target Nasional
Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepri
Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Kinerja	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan dalam mewujudkan wilayah perbatasan yang kondusif dan produktif	Indeks Pelayanan Publik (Indeks)	4,30	4,48	104

Berdasarkan Tabel 3.8 capaian kinerja terhadap target nasional dapat disampaikan bahwa target realisasi indeks pelayanan publik pada tahun 2025 sebesar 4,30 terealisasi sebesar 4,48 melebihi target yang ditetapkan dengan capaian sebesar 104 dengan penilaian sebagai kategori Sangat Baik (A-).

Tabel 3.9
Capaian Program
Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepri
Tahun 2025

No.	Bidang Urusan / Program / Outcome	Indikator Outcome	Target		Realisasi		Capaian
			Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	B	6.506.598.126,-	BB	5.949.691.640,-	91,44
		Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Badan Pengelola Perbatasan Daerah (Indeks)	82,87		86,57		104
		Indeks Kepuasan Masyarakat Badan Pengelola Perbatasan Daerah (Indeks)	80,00		86,91		108

No	Bidang Urusan / Program / Outcome	Indikator Outcome	Target		Realisasi		Capaian
			Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)
2	Program Pengelolaan Perbatasan	Persentase usulan yang menjadi rencana aksi pembangunan kawasan perbatasan dari Kab/Kota (%)	45	206.359.798,-	45,24	180.477.544,-	87,46
		Persentase kawasan perbatasan yang dikembangkan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Pengelolaan Kawasan Perbatasan (%)	16,67		37,03		222
		Persentase rencana aksi Pembangunan kawasan perbatasan yang dimonitoring (%)	27,59		29,73		107

Berdasarkan tabel 3.9 Capaian Program diatas, maka dapat disampaikan bahwa Capain Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan indikator outcome terdiri dari Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat) dimana target yang ditetapkan B dan hasil realisasi BB, Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia terealisasi sebesar 86,57 dari target 82,57 dan Indeks Kepuasan Masyarakat terealisasi sebesar 86,91% dari target yang ditetapkan sebesar 80%. Serta diperoleh capaian pagu 91,44% yang teralisasi sebesar 5.949.691.640,- dari target pagu yang ditetapkan 6.506.598.126,-.

Sementara untuk Program Pengelolaa Perbatasan dimana indikator outcome yang ditetapkan terdiri dari Persentase usulan yang menjadi rencana aksi pembangunan kawasan perbatasan dari Kab/Kota dengan target sebesar 45 % dan realisasi akhir sebesar 45.24 %, Persentase kawasan perbatasan yang dikembangkan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Pengelolaan Kawasan Perbatasan ditetapkan target sebesar 16,67 diperoleh realiasi sebesar 37,03% dan selanjutnya Persentase rencana aksi Pembangunan kawasan perbatasan yang dimonitoring dengan target 27,59% terealisasi sebesar 29,73%. Adapun Capaian realisasi pagu mencapai 87,46 sebesar 180.477.544,- dari target pagu 206.359.798,-.

Memperhatikan hasil capaian kedua program pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah tersebut, dimana target yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik. Untuk itu kedepan diperlukan terobosan dan stimulus untuk meningkatkan capaian realisasi selanjutnya.

3.3 Akuntabilitas Kinerja Keuangan

1. Analisis Penggunaan Sumber Daya Anggaran

a. Alokasi per sasaran pembangunan

Berikut adalah capaian kinerja keuangan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025 terhadap sasaran dan indikator. Pada setiap rencana pencapaian sasaran melalui indikator yang disusun, maka terdukung oleh anggaran yang direalisasikan dalam kegiatan dan pencapaian program. Hal ini termuat dalam rencana kerja SKPD yang dijadikan dalam Daftar Pengelolaan Anggaran pada setiap tahunnya.

Tabel 3.10

Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan dalam mewujudkan wilayah perbatasan yang kondusif dan produktif

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)
1	2	3	4
Meningkatnya kualitas pelayanan dalam mewujudkan wilayah perbatasan yang kondusif dan produktif	Persentase rencana aksi pembangunan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan yang teralisasi	206.359.798,-	180.477.544,-

Tabel 3.11
Tingkat Efisiensi Anggaran
Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Anggaran (Rp) Tahun 2024			Anggaran (Rp) Tahun 2025			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=6-9
1	Meningkatnya kualitas pelayanan dalam mewujudkan wilayah perbatasan yang kondusif dan produktif	Persentase rencana aksi pembangunan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan yang teralisasi	7.537.067.752,-	6.876.027.694,-	91,23	6.712.957.924,-	6.130.169.184,-	91,32	

2. Realisasi Anggaran

Jumlah Total Pagu Anggaran Perubahan pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 adalah Rp. 6.712.957.924,- yang terbagi dalam dua Program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan pagu anggaran sebesar Rp. 6.506.598.126,- dan capaian realiasi sebesar Rp. 5.949.691.640 atau 91,44 %. Dan Program Pengelolaan Perbatasan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 206.359.798,- dan capaian realiasi sebesar Rp. 180.477.544,- atau 87,46%.

Anggaran utama yang digunakan untuk mencapai sasaran strategis adalah Rp. 206.359.798,- dengan realisasi sebesar Rp. 180.477.544,- atau 87,46 % sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 3.12
REALISASI ANGGARAN
CAPAIAN KINERJA PROGRAM TAHUN 2025

Indikator Kinerja Program yang dilaporkan pada kesempatan ini adalah Indikator Kinerja Program Pengelola Perbatasan yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Rencana Strategis Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 Provinsi Kepulauan Riau, yaitu :

No	Program/kegiatan	Pagu anggaran	Realiasi anggaran	%
I	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6.506.598.126	5.949.691.640	91,44
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	147.050.823	143.350.379	97,48
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.859.119.021	5.320.306.205	90,80
3	Kegiatan Kepegawaian Perangkat Daerah			
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	200.508.142	194.018.991	96,76
5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0		
6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	224.669.935	223.987.531	99,70
7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	70.028.654	68.028.534	97,14
II	Program Pengelola Perbatasan	206.359.798	180.477.544	87,46
8	Kegiatan Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama	50.346.056	41.110.664	81,66

9	Kegiatan Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	88.686.559	79.913.090	90,11
10	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi	67.327.183	59.453.790	88,31
	TOTAL	6.712.957.924	6.130.169.184	91,32

Tabel 3.13
Indikator Kinerja Program
Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025

No.	Program	Indikator Program	Target	Formulasi	Perhitungan	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
1	Program Pengelola Perbatasan	Persentase usulan yang menjadi rencana aksi pembangunan kawasan perbatasan dari Kab/Kota (%)	45%	Jumlah usulan yg menjadi renaksi pembangunan kawasan perbatasan dibagi jumlah usulan x 100	$\frac{76}{168} \times 100\%$	45,24%
		Persentase kawasan perbatasan yang dikembangkan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Pengelolaan Kawasan Perbatasan (%)	16,67 %	Kondisi eksisting struktur tata ruang kab bintang dibagi jumlah struktur ruang Kabupaten Bintang sesuai perpes 43 2020 tentang rencana tata ruang kawasan negara Provinsi Kepri x 100	$\frac{70}{189} \times 100\%$	37,03 %
		Persentase rencana aksi Pembangunan kawasan perbatasan yang dimonitoring (%)	27,59 %	Jumlah rencana aksi pembangunan kawasan perbatasan yg diawasi dibagi jumlah total renaksi pembangunan kawasan perbatasan tahun berjalan x 100	$\frac{22}{74} \times 100\%$	29,73 %

Berdasarkan tabel 3.13 diatas, dimana indikator kinerja program Badan Pengelola Perbatasan Daerah diukur melalui penetapan program pengelola perbatasan dengan indikator program yang terdiri dari Persentase usulan yang menjadi rencana aksi pembangunan kawasan perbatasan dari Kab/Kota yang teralisasi

dengan target sebesar 45%. Berdasarkan cara penghitungan yang ditetapkan yaitu Jumlah usulan yang menjadi renaksi pembangunan kawasan perbatasan dibagi jumlah usulan dikali seratus persen menghasilkan perhitungan realisasi Indikator Kinerja Program sebesar 45,24%.

Dan indikator program pengelolaan perbatasan selanjutnya yaitu Persentase kawasan perbatasan yang dikembangkan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Pengelolaan Kawasan Perbatasan dengan cara penghitungan yang ditetapkan yaitu Kondisi eksisting struktur tata ruang kab bintang dibagi jumlah struktur ruang Kabupaten Bintang sesuai perpes 43 2020 tentang rencana tata ruang kawasan negara Provinsi Kepri dikali seratus persen diperoleh realiasi indikator kinerja program sebesar 37,03%.

Indikator program pengelolaan perbatasan Selanjutnya yaitu Persentase rencana aksi Pembangunan kawasan perbatasan yang dimonitoring dengan cara penghitungan yang ditetapkan yaitu Jumlah rencana aksi pembangunan kawasan perbatasan yg diawasi dibagi jumlah total renaksi pembangunan kawasan perbatasan tahun berjalan dikali seratus persen diperoleh realiasi indikator kinerja program sebesar 29,73%.

Hal ini menunjukan bahwa Indikator kinerja program Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau mencapai target yang ditetapkan.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2025 menunjukkan pencapaian kinerja yang sangat baik, hal ini dapat dilihat dari semua indikator kinerja dan Perjanjian Kinerja tahun 2025 semuanya terealisasi melebihi target sasaran yang ditetapkan, dan jika dilihat dari capaian realisasi Tahun 2025 terhadap realisasi fisik sampai dengan 100% dan realisasi keuangan 91,32%;
2. Untuk dapat lebih meningkatkan kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau di tahun yang akan datang harus di tempuh berbagai upaya strategis guna mengantisipasi kendala atau hambatan yang dapat berpengaruh terhadap nilai capaian terhadap indikator kinerja.

Upaya strategis terhadap pemecahan masalah tersebut adalah :

- Melaksanakan rapat koordinasi monitoring dan evaluasi bersama Pemerintah Kabupaten/Kota guna memperoleh dan mensinkronisasikan data-data pelaksanaan pembangunan rencana aksi di wilayah perbatasan yang telah ditetapkan dalam rencana induk perbatasan;
- Mengupayakan sistem monitoring real time berbasis website dengan Geospasial;
- Menindaklanjuti program dan kegiatan optimalisasi potensi kawasan perbatasan dalam bentuk kegiatan eksebisi atau pameran yang dapat menarik investor untuk membangun kawasan perbatasan;
- Meningkatkan upaya dalam menyampaikan usulan Kerjasama SOSEK MALINDO antara Pemerintah dan Stakeholder secara terukur dan menguntungkan kedua belah pihak;
- Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya aparatur dalam melaksanakan tugasnya masing – masing;

- Menciptakan budaya kerja bagi aparaturnya yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme dan peningkatan Disiplin;
- Tertib dalam pencapaian perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan.

B. SARAN

1. Meningkatkan hubungan kerjasama kemitraan kelembagaan dengan pihak/lembaga terkait dalam mendukung pengembangan kawasan perbatasan;
2. Melakukan konsolidasi organisasi secara internal dalam rangka meningkatkan kesadaran dan komitmen jajaran aparaturnya pada Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Kepulauan Riau untuk selalu bekerjasama dan berkoordinasi dengan Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten/Kota.
3. Sinergitas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan Pembangunan di Kawasan Perbatasan, khususnya di Provinsi Kepulauan Riau melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
4. Melaksanakan Monitoring dan evaluasi Pembangunan di Kawasan Perbatasan Provinsi Kepulauan Riau yang merupakan salah satu tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah, maka Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau sangat memerlukan penganggaran yang cukup agar terpenuhinya capaian rencana aksi pembangunan kawasan perbatasan di Provinsi Kepulauan Riau.
5. Tersedianya aplikasi berbasis elektronik yang menghimpun data-data hasil pembangunan di kawasan perbatasan dan rencana pembangunan setiap tahunnya dilakukan secara update dan berkala sehingga diperoleh data pembangunan kawasan perbatasan yang lebih akurat, up to date dan terukur dengan baik.

6. Untuk lebih meningkatkan capaian kinerja pelaporan (LAKIP) maka perlu adanya Bimbingan Teknis kepada Aparatur pemerintah dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
7. Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Kepulauan Riau merupakan organisasi yang telah berdiri selama 5 tahun berjalan, dan masih membutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang *qualified* dalam menjawab tantangan perbatasan kedepan yang semakin kompleks. Oleh sebab itu pemberdayaan SDM secara optimal perlu dilakukan sehingga target kinerja dapat tercapai sesuai dengan yang direncanakan.





LAMPIRAN



**BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2025**



LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025



**BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2025**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : **Drs. H. Doli Boniara, M.Si.**
Jabatan : **Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah
Provinsi Kepulauan Riau**

selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **H. Ansar Ahmad, S.E., M.M.**
Jabatan : **Gubernur Kepulauan Riau**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, 6 Januari 2025

**Pihak Kedua,
Gubernur Kepulauan Riau**

H. Ansar Ahmad, S.E., M.M.

**Pihak Pertama,
Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah
Provinsi Kepulauan Riau**

**Drs. H. Doli Boniara, M.Si.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 197207101992011003**

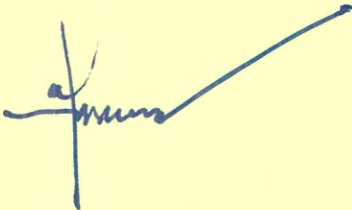
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PENGELOLAAN PERBATASAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Kawasan Perbatasan Sebagai Beranda Terdepan yang Berdaulat melalui Pembangunan Infrastruktur dan Pengintegrasian antar Pulau	Persetase Implementasi Pembangunan Lokasi Prioritas Perbatasan dan Kerjasama Perbatasan dalam Rencana Aksi pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan	60%
2.	Terwujudnya akuntabilitas kinerja pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Nilai SAKIP Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau	B

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Daerah Provinsi	Rp. 7.756.026.909,-	APBD
2.	Program Pengelola Perbatasan	Rp. 444.952.607,-	APBD

Tanjungpinang, 6 Januari 2025

Pihak Kedua,
Gubernur Kepulauan Riau



H. Ansar Ahmad, S.E., M.M.

Pihak Pertama,
Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah
Provinsi Kepulauan Riau



Drs. H. Doli Boniara, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 197207101992011003



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : **Drs. H. Doli Boniara, M.Si.**
Jabatan : **Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah
Provinsi Kepulauan Riau**

selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **H. Ansar Ahmad, S.E., M.M.**
Jabatan : **Gubernur Kepulauan Riau**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, 10 Oktober 2025

**Pihak Kedua,
Gubernur Kepulauan Riau**

H. Ansar Ahmad, S.E., M.M.

**Pihak Pertama,
Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah
Provinsi Kepulauan Riau**



**Drs. H. Doli Boniara, M.Si.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 197207101992011003**

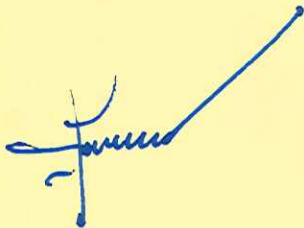
PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PENGELOLAAN PERBATASAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan dalam mewujudkan wilayah perbatasan yang kondusif dan produktif	Persentase Rencana Aksi Pembangunan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan yang terealisasi (%)	72,73
2.	Meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan di bidang perbatasan	Nilai SAKIP Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Predikat)	B

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Daerah Provinsi	Rp. 6.506.598.126,-	APBD-P
2.	Program Pengelola Perbatasan	Rp. 206.359.798,-	APBD-P

Tanjungpinang, 10 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Gubernur Kepulauan Riau



H. Ansar Ahmad, S.E., M.M.

Pihak Pertama,
Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah
Provinsi Kepulauan Riau



Drs. H. Doli Boniara, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 197207101992011003



LAMPIRAN MATRIKS RENCANA AKSI TAHUN 2025



**BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2025**

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	KEGIATAN	REALISASI RENAKSI	PERSENTASE (%)
Provinsi Kepulauan Riau	11	8	72,73%
Kabupaten Bintan	16	13	81,25%
Kota Batam	12	7	58,33%
Kabupaten Karimun	10	10	100,00%
Kabupaten Kepulauan Anambas	17	12	70,59%
Kabupaten Natuna	8	4	50,00%
JUMLAH	74	54	72,97%

RENCANA AKSI PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN TAHUN 2025								
NO	PROGRAM/BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUMBER PEMBIAYAAN	LOKASI PELAKSANAAN	INSTANSI PELAKSANA	REALISASI
1	Pembangunan Mako lanal Bintan dan Sarpras Tahun Jamak Tahun II (Tahun 2024 dan 2025)	1	Kegiatan	13.016.203.000	APBN	Kepulauan Riau	TNI	
2	Pengadaan Alkomlek Posal Nipa	1	Kegiatan	805.100.000	APBN	Kepulauan Riau	TNI	
3	Fasilitasi Pemberdayaan dan Pembinaan Aparatur	1	Paket	331.661.000	APBN	Kepulauan Riau	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	
4	Pelaksanaan Orientasi Pra Pemberangkatan (OPP) PMI Non Pemerintah	1235	Orang	148.200.000	APBN	Kepulauan Riau	Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia	Terealisasi
5	Penanganan PMI Bermasalah, Sakit, dan Meninggal	750	Orang	3.040.548.000	APBN	Kepulauan Riau	Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia	Terealisasi
6	Fasilitasi Bimbingan Teknis dan Pendampingan Kewirausahaan Industri Kecil dan Menengah	108	Industri	561.822.000	APBN	Kepulauan Riau	Kementerian Perindustrian	Terealisasi
7	Pengembangan Produk Melalui Diversifikasi/ Pendaftaran HKI/Merk/Desain Kemasan/Fasilitasi dalam rangka OVOP	94	Industri	584.753.000	APBN	Kepulauan Riau	Kementerian Perindustrian	Terealisasi
8	Pelatihan UMKM	2776	UMKM	10.356.245.000	DAK Non Fisik	Kepulauan Riau	Kementerian Usaha, Kecil, dan Menengah	Terealisasi
9	Fasilitasi Pendamping Kapasitas Usaha	34	Pendamping	1.698.480.000	DAK Non Fisik	Kepulauan Riau	Kementerian Usaha, Kecil, dan Menengah	Terealisasi
10	Fasilitasi Inkubasi Usaha	50	Inkubasi	1.000.000.000	DAK Non Fisik	Kepulauan Riau	Kementerian Usaha, Kecil, dan Menengah	Terealisasi
11	Tenaga Pendamping Data	8	Pendamping	325.200.000	DAK Non Fisik	Kepulauan Riau	Kementerian Usaha, Kecil, dan Menengah	Terealisasi
12	Pekarangan Hortikultura	3	Kelompok	37.902.048	APBN	Bintan	Kementerian Pertanian	Terealisasi
13	Kawasan Ubi Jalar	3	Ha	8.640.000	APBN	Bintan	Kementerian Pertanian	
14	Perluasan Tanaman Kopi Robusta	50	Ha	800.000.000	APBN	Bintan	Kementerian Pertanian	
15	Pemeliharaan Kebun Induk Tanaman Kelapa Tahun 6	5	Ha	73.500.000	APBN	Bintan	Kementerian Pertanian	Terealisasi
16	Program Keluarga Harapan (PKH)	3557	KPM	7.013.369.992	APBN	Bintan	Kementerian Sosial	Terealisasi
17	Fasilitasi Pendamping Kapasitas Usaha	4	Pendamping	170.400.000	DAK Non Fisik	Bintan	Kementerian Usaha, Kecil, dan Menengah	
18	Fasilitasi Inkubasi Usaha	25	Inkubasi	500.000.000	DAK Non Fisik	Bintan	Kementerian Usaha, Kecil, dan Menengah	Terealisasi
19	Pelatihan UMKM	678	UMKM	2.803.100.000	DAK Non Fisik	Bintan	Kementerian Usaha, Kecil, dan Menengah	Terealisasi
20	Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	2148	KPM	5.155.200.000	APBN	Bintan	Kementerian Sosial	Terealisasi

21	Penguatan Puskesmas- IPAL, Puskesmas Kelong	1	Paket	630.000.000	DAK	Bintan Pesisir	Kementerian Kesehatan	Terealisasi
22	Pengembangan Sumber Daya Tenaga Kelistrikan	1	Paket	8.912.847.332	APLN	Bintan Pesisir	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Terealisasi
23	Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE), Perlengkapan dan bahan pembelajaran, TK NUMBING JAYA	1	Paket	51.188.000	DAK	Bintan Pesisir	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	Terealisasi
24	Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah, Desa Sebung Lagoi	200	SR	2.583.867.875	DAK	Teluk Sebung	Kementerian Pekerjaan Umum	Terealisasi

25	Pengadaan peralatan laboratorium ilmu pengetahuan alam (IPA), SMP NEGERI 8 BINTAN	1	Paket	55.911.366	DAK	Teluk Sebang	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	Terealisasi
26	Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE), Perlengkapan dan bahan pembelajaran, TK PEDESAAN GUNUNG KIJANG	1	Paket	51.188.000	DAK	Gunung Kijang	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	Terealisasi
27	Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE), Perlengkapan dan bahan pembelajaran, TK PUJI	1	Paket	51.188.000	DAK	Bintan Utara	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	Terealisasi
28	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat	3	Orang	53.000.000	APBN	Kota Batam	Kementerian Kehutanan	
29	Pembangunan <i>Flat Type</i> 45 (1 Tower) Lantamal IV batam dan Sarpras	1	Kegiatan	21.294.000.000	APBN	Batam/Kepulauan Riau	TNI	
30	Peningkatan Perlindungan dan Pengamanan di Kawasan Suaka Alam (KSA),	8000	Kelompok Masyarakat	981.000.000	APBN	Kota Batam	Kementerian Kehutanan	
31	Pengendalian kebakaran di Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB)	802	Ha	200.000.000	APBN	Kota Batam	Kementerian Kehutanan	
32	Pelatihan UMKM	204	UMKM	693.960.000	DAK Non Fisik	Kota Batam	Kementerian Usaha, Kecil, dan Menengah	Terealisasi
33	Fasilitasi Pendamping Kapasitas Usaha	2	Pendamping	95.040.000	DAK Non Fisik	Kota Batam	Kementerian Usaha, Kecil, dan Menengah	Terealisasi
34	Kenduri Seni Melayu	1	Kegiatan	150.000.000	APBN	Kota Batam	Kementerian Pariwisata	Terealisasi
35	Program Keluarga Harapan (PKH)	18357	KPM	35.155.900.612	APBN	Kota Batam	Kementerian Sosial	Terealisasi
36	Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	17262	KPM	41.428.800.000	APBN	Kota Batam	Kementerian Sosial	Terealisasi
37	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan minimal 25 KK, Desa Pulau Terong	25	Unit	622.500.000	DAK	Belakang Padang	Kementerian Pekerjaan Umum	Terealisasi
38	Pengadaan peralatan laboratorium ilmu pengetahuan alam (IPA), SMP NEGERI 2 BATAM	1	Paket	54.150.000	DAK	Belakang Padang	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	Terealisasi
39	Pengembangan Sumber Daya Tenaga Kelistrikan	1	Paket	52.157.774.517	APLN	Belakang Padang	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	
40	Pekarangan Hortikultura	3	Kelompok	37.902.048	APBN	Karimun	Kementerian Pertanian	Terealisasi
41	Kawasan Ubi Jalar	3	Ha	8.640.000	APBN	Karimun	Kementerian Pertanian	Terealisasi
42	Pemeliharaan Kebun Induk Tanaman Cengkeh Tahun 7	1	Ha	9.234.000	APBN	Karimun	Kementerian Pertanian	Terealisasi
43	Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE), Perlengkapan dan bahan pembelajaran, TK	1	Paket	47.565.000	DAK	Karimun	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	Terealisasi
44	Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE), Perlengkapan dan bahan pembelajaran, TK Vidya Sasana	1	Paket	47.565.000	DAK	Karimun	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	Terealisasi

45	Program Keluarga Harapan (PKH)	6171	KPM	12.361.061.448	APBN	Karimun	Kementerian Sosial	Terealisasi
46	Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	5120	KPM	12.288.000.000	APBN	Karimun	Kementerian Sosial	Terealisasi
47	Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE), Perlengkapan dan bahan pembelajaran, TK Mekar Sari	1	Paket	47.565.000	DAK	Tebing	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	Terealisasi
48	Pelapisan Runway Bandar Udara Raja Haji Abdullah (SBSN)	1	Paket	3.500.000.000	SBSN	Tebing	Kementerian Perhubungan	Terealisasi
49	Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE), Perlengkapan dan bahan pembelajaran, TK AS SALAM	1	Paket	47.565.000	DAK	Tebing	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	Terealisasi
50	Pekarangan Hortikultura	3	Kelompok	37.902.048	APBN	Kepulauan Anambas	Kementerian Pertanian	Terealisasi
51	Kawasan Ubi Jalar	3	Ha	8.640.000	APBN	Kepulauan Anambas	Kementerian Pertanian	Terealisasi
52	Pemeliharaan Kebun Induk Tanaman Pala Tahun 7	1	Ha	10.786.000	APBN	Kepulauan Anambas	Kementerian Pertanian	
53	Program Keluarga Harapan (PKH)	940	KPM	1.905.767.880	APBN	Kepulauan Anambas	Kementerian Sosial	Terealisasi
54	Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	1106	KPM	2.654.400.000	APBN	Kepulauan Anambas	Kementerian Sosial	Terealisasi
55	Pembangunan Jalan Nasional Simpang Rintis -Konjo (P Siantan)	5	Km	0	APBN	Anambas/Kepulauan Riau	Kementerian Pekerjaan Umum	
56	Penguatan Puskesmas-Ambulans/Pusling Roda 4/Pusling Perairan, Puskesmas Jemaja Barat	1	Paket	2.400.000.000	DAK	Jemaja Barat	Kementerian Kesehatan	
57	Penguatan Puskesmas Pembantu-Pembangunan baru, Pustu Batu Berapit	1	Paket	715.670.728	DAK	Jemaja	Kementerian Kesehatan	
58	Pengembangan Sumber Daya Tenaga Kelistrikan	1	Paket	452.240.145	APLN	Jemaja	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Terealisasi
59	Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE), Perlengkapan dan bahan pembelajaran, TK NEGERI 1 SIANTAN SELATAN	1	Paket	48.000.000	DAK	Siantan Selatan	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	Terealisasi
60	Pengadaan peralatan laboratorium ilmu pengetahuan alam (IPA), SMPN 4 GENTING	1	Paket	57.000.000	DAK	Siantan Selatan	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	Terealisasi
61	Pengadaan peralatan laboratorium ilmu pengetahuan alam (IPA), SMPN 6 LINGAI	1	Paket	57.000.000	DAK	Siantan Selatan	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	Terealisasi
62	Pengadaan peralatan laboratorium ilmu pengetahuan alam (IPA), SMPN 2 BAYAT	1	Paket	57.000.000	DAK	Siantan Utara	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	Terealisasi
63	Rehabilitasi Fasilitas Pelabuhan Midai UPP Tarempa	1	Paket	20.929.985.000	SBSN	Siantan	Kementerian Perhubungan	Terealisasi
64	Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE), Perlengkapan dan bahan pembelajaran, TK NEGERI 1 KUTE SIANTAN	1	Paket	48.000.000	DAK	Kute Siantan	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	

65	Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE), Perlengkapan dan bahan pembelajaran, TK NEGERI 2 KUTE SIANTAN	1	Paket	48.000.000	DAK	Kute Siantan	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	Terealisasi
66	Pengadaan peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK), SDN 003 BATU AMPAR	1	Paket	103.964.000	DAK	Kute Siantan	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	Terealisasi
67	Sebaran Pendamping PS	3	Orang	66.035.718	APBN	Natuna	Kementerian Kehutanan	
68	Kawasan Ubi Jalar	3	Ha	8.640.000	APBN	Natuna	Kementerian Pertanian	
69	Pembangunan Pengaman Pantai di Pulau Kepala, Kabupaten Natuna	1	Paket	107.000.000.000	APBN	Natuna/Kepulauan Riau	Kementerian Pekerjaan Umum	Terealisasi
70	Lanjutan pembangunan SKPT Natuna di Kec Pulau Tiga, yaitu pembangunan pasar ikan	1	Paket	0	DANA HIBAH	Ranai	Kementerian Kelautan dan Perikanan	
71	Pekarangan Hortikultura	3	Kelompok	37.902.048	APBN	Natuna	Kementerian Pertanian	Terealisasi
72	Fasilitasi Penerapan Gerakan Indonesia Sadar Adminduk (GISA)	1	Lokasi	45.000.000	APBN	Natuna	Kementerian Dalam Negeri	
73	Program Keluarga Harapan (PKH)	2189	KPM	6.174.600.000	APBN	Natuna	Kementerian Sosial	Terealisasi
74	Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	2729	KPM	6.549.600.000	APBN	Natuna	Kementerian Sosial	Terealisasi



LAMPIRAN

REKAP MATRIKS CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM PADA TAHUN 2025



**BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2025**

Tabel Indikator Kinerja Program Pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepri Tahun 2025

No	Bidang	Indikator	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi	Keterangan
1	Sekretariat	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	B	BB	Tercapai
2	Sekretariat	Indeks Profesionalisme Sumber Daya Manusia Badan Pengelola Perbatasan Daerah	Indeks	82,87	86,57	Tercapai
3	Sekretariat	Indeks Kepuasan Masyarakat Badan Pengelola Perbatasan Daerah	Indeks	80	86,91	Tercapai
4	Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama	Persentase usulan yang menjadi rencana aksi pembangunan kawasan perbatasan dari Kab/Kota	%	45	45,24	Tercapai
5	Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	Persentase kawasan perbatasan yang dikembangkan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Pengelolaan Kawasan Perbatasan	%	16.67	37,03	Tercapai
6	Monitoring dan Evaluasi	Persentase rencana aksi Pembangunan kawasan perbatasan yang dimonitoring	%	27,59	29,73	Tercapai



LAMPIRAN

MATRIKS CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM PADA TAHUN 2025



**BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2025**



**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
INSPEKTORAT PROVINSI**

**LAPORAN HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAN
PENILAIAN KINERJA ORGANISASI
PADA BADAN PENGELOLAAN
PERBATASAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2025**

Nomor : LHE.03/EVALUASI-SAKIP/ITPROV.2/2025
Tanggal : 18 JUNI 2025

(Dokumen ini merupakan dokumen daerah bersifat rahasia dan dilarang dipublikasikan
tanpa seizin Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau)



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

INSPEKTORAT DAERAH

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau "Bandar Seri Kota Piring"
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Raja Ali (Marhum Pulau Bayan)
(Gedung C1 Lantai 2 dan 3) Pulau Dompok Seri Darul Makmur, Tanjungpinang Kode Pos 29124
Telepon 0771-4575019 Pos-el : inspektorat@kepriprov.go.id

Tanjungpinang, 16 Juni 2025

Nomor : LHE.03/EVALUASI-SAKIP/ITPROV.2/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu berkas
Hal : Laporan Hasil Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah dan Penilaian
Kinerja Organisasi pada Badan
Pengelola Perbatasan Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025

Yth. Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau
di
Tanjungpinang

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi.
5. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
6. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.
7. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 51 Tahun 2024 tentang Pedoman Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Surat Tugas Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2.016/ST/ITPROV/DK/IV/2025, tanggal 17 April 2025.

B. Latar Belakang

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP dan Penilaian Kinerja Organisasi (PKO) ini diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

C. Standar Evaluasi

Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 dilakukan sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia yang dikeluarkan AAIP.

D. Tujuan

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

E. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup, meliputi:

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja;

5. Penilaian capaian kinerja perangkat daerah; dan
6. Periode evaluasi tahun 2025.

F. Metodologi

Metodologi yang dapat digunakan adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dalam mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) karena akan disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada.

G. Jangka Waktu

Evaluasi dilakukan selama sepuluh hari kerja dimulai dari tanggal 21 April s.d 5 Mei 2025.

H. Susunan Tim

Penanggung Jawab	: ST. Irmendas, S.E. Ak. CA., QGIA., CGCAE.
Wakil Penanggung Jawab	: Ir. Isrofil, M.Si.
Pengendali Teknis	: Syafrizal, S.T., M.M.
Ketua Tim	: Wilfrin Rumapea, S.Pd., M.M.
Anggota	: Dwi Junila Sari, S.Pd., M.M.
Anggota	: Ria Farahdiba, S.E.

I. Gambaran Umum Perangkat Daerah

1. Dasar Hukum Pembentukan Organisasi

Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Badan Pengelola Perbatasan Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dan menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengoordinasikan pelaksanaan, dan melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan di bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama, Koordinasi Pelaksanaan dan Monitoring dan Evaluasi yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau, mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang Sekretariat, Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitas Kerjasama, Bidang Koordinasi Pelaksanaan, dan Bidang Monitoring dan Evaluasi;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Sekretariat, Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitas Kerjasama, Bidang Koordinasi Pelaksanaan, dan Bidang Monitoring dan Evaluasi;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Sekretariat, Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitas Kerjasama, Bidang Koordinasi Pelaksanaan, dan Bidang Monitoring dan Evaluasi;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang Sekretariat, Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitas Kerjasama, Bidang Koordinasi Pelaksanaan, dan Bidang Monitoring dan Evaluasi;
- e. penerapan sistem pengendalian intern pada perangkat daerah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi;
- f. pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada unit kerjanya; dan
- g. penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara periodik kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

J. Komponen dan Predikat Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen dasar manajemen kinerja, yang meliputi:

No	Komponen Yang Dinilai	Sub Komponen			Total Bobot (%)
		Keberadaan (20%)	Kualitas (30%)	Pemanfaatan (50%)	
1.	Perencanaan Kinerja	6	9	15	30,00
2.	Pengukuran Kinerja	6	9	15	30,00
3.	Pelaporan Kinerja	3	4,5	7,5	15,00
4.	Evaluasi Internal	5	7,5	12,5	25,00
	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	20	30	50	100,00

Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran

tingkat AKIP, dengan kategori predikat sebagai berikut:

Predikat	Interpretasi
AA (Nilai > 90-100)	Sangat Memuaskan Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (<i>Reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu
A (Nilai > 80 - 90)	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
BB (Nilai > 70 - 80)	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
B (Nilai > 60 - 70)	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
cc(Nilai > 50 - 60)	Cukup (Memadai) Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitaskinerja pada unit kerja.
C (Nilai > 30 - 50)	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D (Nilai > 0 - 30)	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

K. Komponen dan Predikat Penilaian Kinerja Organisasi (PKO)

PKO pada setiap tingkatan entitas akuntabilitas kinerja dilakukan dengan memperhatikan 2 (dua) hal, yaitu capaian perjanjian kinerja dan nilai hasil evaluasi

akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah.

Koreksi Capaian Perjanjian Kinerja Berdasarkan Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, adalah sebagai berikut:

Predikat AKIP	Koreksi Capaian PK Setelah Normalisasi
AA	0%
A	
BB	10%
B	15%
CC	20%
C	30%
D	

Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran tingkat PKO, dengan kategori predikat sebagai berikut:

Nilai Kinerja Organisasi (NKO)	Predikat dan Interpretasi Kinerja Organisasi
$X > 100\%$	Istimewa Tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja sudah sangat memuaskan dan di atas ekspektasi. Praktik baik ini dapat menjadi contoh bagi organisasi/unit lain.
$80\% < X \leq 100\%$	Baik Tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja sudah sangat baik dan sesuai ekspektasi.
$60\% < X \leq 80\%$	Butuh Perbaikan Tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja sudah cukup baik namun masih dibawah ekspektasi/target.
$20\% < X \leq 60\%$	Kurang Tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja masih kurang dan masih dibawah ekspektasi/target.
$0\% < X \leq 20\%$	Sangat Kurang Tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja masih sangat kurang dan dibawah ekspektasi/target.

II. GAMBARAN HASIL

A. Hasil Evaluasi AKIP

Berdasarkan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2025 pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau memperoleh nilai **71,85** kategori **BB** dengan predikat "**SANGAT BAIK**", dengan nilai sebagai berikut:

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai 2025
1.	Perencanaan Kinerja	30,00	24,19
2.	Pengukuran Kinerja	30,00	20,48

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai 2025
3.	Pelaporan Kinerja	15,00	9,52
4.	Evaluasi Internal	25,00	17,67
	Jumlah Hasil Evaluasi Kinerja	100,00	
	Nilai Hasil Evaluasi AKIP		71,85
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja (Kategori)		BB
	Predikat		SANGAT BAIK

Adapun rincian hasil evaluasi AKIP, adalah sebagai berikut:

1. PERENCANAAN KINERJA (dengan nilai 24,19% dari 30,00%)

1.a Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia (dengan nilai 6,00% dari 6,00%)

- 1) Telah terdapat pedoman teknis perencanaan kinerja.
- 2) Telah terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka menengah.
- 3) Telah terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka pendek.
- 4) Telah terdapat dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja.
- 5) Telah terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja.
- 6) Setiap unit/satuan kerja telah merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.

1.b Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting) (dengan nilai 7,88% dari 9,00%)

- 1) Dokumen perencanaan kinerja telah diformalkan.
- 2) Dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan.
- 3) Dokumen Perencanaan Kinerja sebagian besar menggambarkan Kebutuhan atas Kinerja sebenarnya yang perlu dicapai.
- 4) Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai.
- 5) Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) telah memenuhi kriteria SMART.
- 6) Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (sustainable - tidak sering diganti dalam 1 periode Perencanaan Strategis).
- 7) Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja Sebagian besar telah dapat dicapai (achievable), menantang, dan realistis.

- 8) Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja sebagian besar telah menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading).
- 9) Perencanaan kinerja sebagian besar telah dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting).
- 10) Setiap pegawai Sebagian besar telah merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.

1.c Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan (dengan nilai 10,31% dari 15,00%)

- 1) Anggaran yang ditetapkan sebagian besar mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai.
- 2) Aktivitas yang dilaksanakan sebagian besar mendukung Kinerja yang ingin dicapai.
- 3) Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja sebagian besar dicapai dengan baik, atau setidaknya masih *on the right track*.
- 4) Rencana aksi kinerja sebagian besar dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja selalu dipantau secara berkala.
- 5) Sebagian telah terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya.
- 6) Sebagian telah terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik.
- 7) Setiap unit/satuan kerja sebagian besar memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.
- 8) Setiap Pegawai sebagian besar memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.

2. PENGUKURAN KINERJA (dengan nilai 20,48% dari 30,00%)

2.a Pengukuran Kinerja telah dilakukan (dengan nilai 5,00% dari 6,00%)

- 1) Telah terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja.
- 2) Sebagian besar telah terdapat Definisi Operasional yang cukup jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja.
- 3) Sebagian besar telah terdapat mekanisme yang cukup jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan.

2.b Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan (dengan nilai 6,11% dari 9,00%)

- 1) Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (*decision maker*) dalam mengukur sebagian besar capaian kinerja.
- 2) Sebagian data kinerja yang dikumpulkan cukup relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan.
- 3) Sebagian data kinerja yang dikumpulkan cukup mendukung capaian kinerja yang diharapkan.
- 4) Pengukuran kinerja sebagian besar dilakukan secara berkala.
- 5) Capaian kinerja Sebagian kecil lebih baik dari tahun sebelumnya.
- 6) Setiap level organisasi telah melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit di bawahnya secara berjenjang.
- 7) Pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).

2.c Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien (dengan nilai 9,38% dari 15,00%)

- 1) Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan.
- 2) Pengukuran Kinerja sebagian telah menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional.
- 3) Pengukuran kinerja sebagian telah mempengaruhi penyesuaian (Refocusing) Organisasi.
- 4) Pengukuran kinerja sebagian telah mempengaruhi penyesuaian Strategi dalam mencapai kinerja.
- 5) Pengukuran kinerja sebagian telah mempengaruhi penyesuaian Kebijakan dalam mencapai kinerja.
- 6) Pengukuran kinerja sebagian telah mempengaruhi penyesuaian Aktivitas dalam mencapai kinerja.
- 7) Pengukuran kinerja sebagian telah mempengaruhi penyesuaian Anggaran dalam mencapai kinerja.
- 8) Terdapat efisiensi atas penggunaan sebagian besar anggaran dalam mencapai kinerja.
- 9) Setiap unit/satuan kerja sebagian besar telah memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.

- 10) Sebagian besar pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.

3. PELAPORAN KINERJA (dengan nilai 9,52% dari 15,00%)

3.a Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja (dengan nilai 2,50% dari 3,00%)

- 1) Dokumen Laporan Kinerja telah disusun.
- 2) Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala.
- 3) Dokumen Laporan Kinerja telah diformalkan.
- 4) Dokumen Laporan Kinerja telah direvisi.
- 5) Dokumen Laporan Kinerja belum dipublikasikan.
- 6) Dokumen Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu.

3.b Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/ kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya (dengan nilai 3,00% dari 4,50%)

- 1) Dokumen Laporan Kinerja sebagian besar disusun secara berkualitas sesuai dengan standar.
- 2) Dokumen Laporan Kinerja sebagian besar mengungkap informasi tentang pencapaian kinerja.
- 3) Dokumen Laporan Kinerja sebagian besar menginformasikan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target tahunan.
- 4) Dokumen Laporan Kinerja sebagian besar menginformasikan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target jangka menengah.
- 5) Dokumen Laporan Kinerja sebagian telah menginformasikan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- 6) Dokumen Laporan Kinerja sebagian telah menginformasikan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja).
- 7) Dokumen Laporan Kinerja sebagian besar menginformasikan kualitas atas keberhasilan/kegagalan mencapai target kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya.
- 8) Dokumen Laporan Kinerja sebagian telah menginformasikan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.
- 9) Dokumen Laporan Kinerja sebagian besar telah menginformasikan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja).

3.c Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya (dengan nilai 4,02% dari 7,50%)

- 1) Informasi dalam laporan kinerja sebagian besar menjadi perhatian utama pimpinan (Bertanggung Jawab).
- 2) Penyajian informasi dalam laporan kinerja sebagian telah menjadi kepedulian seluruh pegawai.
- 3) Informasi dalam laporan kinerja berkala sebagian telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja.
- 4) Informasi dalam laporan kinerja berkala sebagian telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja.
- 5) Informasi dalam laporan kinerja sebagian telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja.
- 6) Informasi dalam laporan kinerja sebagian telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.
- 7) Informasi dalam laporan kinerja sebagian telah mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.

4. EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL (dengan nilai 17,67% dari 25,00%)

4.a Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan (dengan nilai 4,17% dari 5,00%)

- 1) Telah terdapat SOP Pemantauan Capaian Kinerja Internal.
- 2) Pemantauan Capaian Kinerja Internal sebagian besar telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah.
- 3) Pemantauan Capaian Kinerja Internal sebagian besar telah dilaksanakan secara berjenjang.

4.b Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai (dengan nilai 6,00% dari 7,50%)

- 1) Pemantauan Capaian Kinerja Internal sebagian besar dilaksanakan sesuai SOP.
- 2) Pemantauan Capaian Kinerja Internal sebagian besar dilaksanakan oleh SDM yang memadai.
- 3) Pemantauan Capaian Kinerja Internal sebagian besar telah dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai.

- 4) Pemantauan Capaian Kinerja Internal sebagian besar telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah.
- 5) Pemantauan Capaian Kinerja Internal telah dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi).

4.c Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja OPD sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja (dengan nilai 7,50% dari 12,5%)

- 1) Sebagian besar rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja OPD telah ditindaklanjuti.
- 2) Sebagian besar telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja OPD.
- 3) Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja OPD sebagian telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
- 4) Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja sebagian telah dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.
- 5) Sebagian telah terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja OPD.

Rincian pada lampiran I

Terhadap hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau, direkomendasikan sebagai berikut:

1. Pengukuran Kinerja

Agar menyusun rencana aksi dalam upaya perbaikan untuk meningkatkan capaian kinerja di tahun 2025.

2. Pelaporan Kinerja

- a. Agar mempublikasikan laporan kinerja tahun 2024 ke dalam website perangkat daerah atau pemerintah daerah;
- b. Agar dokumen Laporan Kinerja tahun berikutnya menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya, sesuai dengan periode Renstra (realisasi tahun 2021 s.d tahun pelaporan); dan
- c. Agar dokumen Laporan Kinerja tahun berikutnya menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (jika tidak ada target nasional/ internasional tetap dimasukkan menjadi sub judul di dalam Laporan Kinerja).

B. Penilaian Kinerja Organisasi (PKO)

Penilaian Kinerja Organisasi (PKO) tahun 2025 pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan capaian Penetapan Kinerja (PK) tahun 2024 dan nilai evaluasi AKIP tahun 2025 sebesar 71,85 kategori BB maka nilai koreksi capaian penetapan kinerja setelah normalisasi sebesar 10,00%, menghasilkan PKO sebesar **94,50%** dengan predikat **BAIK**.

Rincian pada lampiran II

Demikian Laporan Hasil Evaluasi AKIP dan PKO ini disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.



Tembusan:

1. Gubernur Kepulauan Riau;
2. Wakil Gubernur Kepulauan Riau;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

**LEMBAR KERJA EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

NO.	KOMPONEN/SUB KOMPONEN		SKPD		KONTROL KERANGKA LOGIS	REF
			JAWABAN	NILAI		
1	2		3	4	5	6
I. PERENCANAAN KINERJA (30%)		30.00	80.63%	24.19		
1.a	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia (20%)	6.00	100.00%	6.00		
1	Terdapat pedoman teknis perencanaan kinerja		Y	1		
2	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka menengah		Y	1		
3	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka pendek		Y	1		
4	Terdapat dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja		Y	1		
5	Terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja		Y	1		
6	Setiap unit/satuan kerja merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja		Y	1		
1.b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting) (30%)	9.00	87.50%	7.88	ok	
1	Dokumen perencanaan kinerja telah diformalkan		A	1		
2	Dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan		A	1		
3	Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan Kebutuhan atas Kinerja sebenarnya yang perlu dicapai.		B	0.75		KKE1.B3-
4	Kualitas Rumusan Hasil (Sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai.		A	1		KKE1.B3-
5	Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) telah memenuhi kriteria SMART.		A	1		KKE1B5
6	Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (sustainable - tidak sering diganti dalam 1 periode Perencanaan Strategis).		A	1		KKE1B6-7
7	Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (achievable), menantang, dan realistis.		B	0.75		KKE1B6-7
8	Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading).		B	0.75		
9	Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting).		B	0.75		
10	Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.		B	0.75		
1.c	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan (50%)	15.00	68.75%	10.31	ok	
1	Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai.		B	0.75		
2	Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai.		B	0.75		
3	Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik, atau setidaknya masih <i>on the right track</i> .		B	0.75		KKE1C3-4
4	Rencana aksi kinerja dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja selalu dipantau secara berkala.		B	0.75		
5	Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya		C	0.5		

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN		SKPD		KONTROL KERANGKA LOGIS	REF
			JAWABAN	NILAI		
1	2		3	4	5	6
6	Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik.		C	0.5		
7	Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.		B	0.75		
8	Setiap Pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.		B	0.75		
II. PENGUKURAN KINERJA (30%)		30.00	68.27%	20.48		
II.a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan (20%)	6.00	83.33%	5.00		
1	Terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja		Y	1		
2	Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja		B	0.75		
3	Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan		B	0.75		
II.b	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan (30%)	9.00	67.86%	6.11	ok	
1	Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (<i>decision maker</i>) dalam mengukur capaian kinerja		B	0.75		
2	Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan		C	0.5		
3	Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan		C	0.5		
4	Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala		B	0.75		
5	Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya		D	0.25		KKE1C3-4
6	Setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang		A	1		
7	Pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi)		Y	1		
II.c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien (50%)	15.00	62.50%	9.38	ok	
1	Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan.		A	1		
2	Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional.		C	0.5		
3	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (Refocusing) Organisasi.		C	0.5		
4	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Strategi dalam mencapai kinerja.		C	0.5		
5	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Kebijakan dalam mencapai kinerja.		C	0.5		
6	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Aktivitas dalam mencapai kinerja.		C	0.5		
7	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Anggaran dalam mencapai kinerja.		C	0.5		
8	Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja.		B	0.75		
9	Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.		B	0.75		
10	Setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.		B	0.75		

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN		SKPD		KONTROL KERANGKA LOGIS	REF
			JAWABAN	NILAI		
1	2		3	4	5	6
III. PELAPORAN KINERJA (15%)		15.00	63.45%	9.52		
III.a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja (20%)	3.00	83.33%	2.50		
1	Dokumen Laporan Kinerja telah disusun		Y	1		
2	Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala		Y	1		
3	Dokumen Laporan Kinerja telah diformalkan		Y	1		
4	Dokumen Laporan Kinerja telah direviu		Y	1		
5	Dokumen Laporan Kinerja telah dipublikasikan		T	0		
6	Dokumen Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu		Y	1		
III.b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, Informasi keberhasilan/ kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya (30%)	4.50	66.67%	3.00	ok	
1	Dokumen Laporan Kinerja disusun secara berkualitas sesuai dengan standar		B	0.75		
2	Dokumen Laporan Kinerja telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja		B	0.75		
3	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target tahunan		B	0.75		
4	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target jangka menengah		B	0.75		
5	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya		C	0.5		
6	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja)		C	0.5		
7	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan kualitas atas keberhasilan/kegagalan mencapai target kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatan		B	0.75		
8	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja		C	0.5		
9	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja)		B	0.75		
III.c	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya (50%)	7.50	53.57%	4.02	ok	
1	Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (Bertanggung Jawab)		B	0.75		
2	Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai.		C	0.5		
3	Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja		C	0.5		
4	Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja		C	0.5		
5	Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja		C	0.5		
6	Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya		C	0.5		
7	Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi		C	0.5		
IV. EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL (25%)		25.00	70.67%	17.67		

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN		SKPD		KONTROL KERANGKA LOGIS	REF
			JAWABAN	NILAI		
1	2		3	4	5	6
IV.a	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan (20%)	5.00	83.33%	4.17		
1	Terdapat Kebijakan/SOP Pemantauan Capaian Kinerja Internal		Y	1		
2	Pemantauan Capaian Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja		B	0.75		
3	Pemantauan Capaian Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berjenjang		B	0.75		
IV.b	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai (30%)	7.50	80.00%	6.00	ok	
1	Pemantauan Capaian Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai SOP.		B	0.75		
2	Pemantauan Capaian Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai.		B	0.75		
3	Pemantauan Capaian Kinerja Internal telah dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai.		B	0.75		
4	Pemantauan Capaian Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah.		B	0.75		
5	Pemantauan Capaian Kinerja Internal telah dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi).		Y	1		
IV.c	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja OPD sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja (50%)	12.50	60.00%	7.50	ok	
1	Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja OPD telah ditindaklanjuti.		B	0.75		
2	Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja OPD		B	0.75		
3	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja OPD telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.		C	0.5		
4	Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja telah dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.		D	0.5		
5	Telah terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja OPD		C	0.5		
HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA (100%)		100.00		71.85	BB	
PREDIKAT					SANGAT BAIK	

KETERANGAN:

TULIS NAMA INSTANSI/UNIT KERJA PADA KOLOM YANG BERWARNA HIJAU SESUAI DENGAN KONTEKS

KETIK 'Y' ATAU 'T' PADA KOLOM YANG BERWARNA HIJAU DENGAN PILIHAN "Y/T"

KETIK 'A' ATAU 'B' ATAU 'C' ATAU 'D' ATAU 'E' PADA KOLOM YANG BERWARNA HIJAU DENGAN PILIHAN "A/B/C/D/E"

**HASIL PENILAIAN KINERJA ORGANISASI (PKO)
PADA BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Normalisasi Capaian PK	Koreksi Normalisasi Capaian PK Berdasarkan Predikat AKIP	Nilai Akhir Capaian PK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (7) x (100% - (8))
1	Meningkatnya program pembangunan di wilayah perbatasan melalui Fungsi koordinasi, Sinkronisasi dan Integrasi antar lembaga	Persentase implementasi pembangunan Lokasi Prioritas Perbatasan dan kerjasama perbatasan dalam Rencana Aksi pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (persentase)	55,00%	70,62%	128,40%	110,00%	10%	99,00%
2	Meningkatnya Ketercapaian IKU Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Nilai SAKIP Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Predikat)	B	B	100,00%	100,00%	10%	90,00%
Total Capaian PK								
Nilai Kinerja Organisasi (NKO) atau Rata-rata Capaian PK								
Predikat PKO								
								189,00%
								94,50%
								BAIK

**PENILAIAN MANDIRI INDEKS PROFESIONALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)
BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

NO	NAMA /NIP	PANGKAT/GOL RUANG	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN (25)	KINERJA (30)	DISIPLIN (5)	KOMPETENSI (40)			NILAI (100)	KATEGORI
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10
1	Drs. H. DOLI BONIARA, M.Si NIP 197207101992011003	Pembina Utama Madya / (IV/d)	Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau	20	25	5			35	85	Tinggi
							20	10	5		
2	ERLIZAWATI, MM NIP 197205311993032007	Pembina Tk.I (IV/b)	Kepala Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitas Kerja Sama	25	25	5			35	90	Tinggi
							20	10	5		
3	RATNA SARI DUTA DEWI, SH, MH NIP 198402012010012020	Pembina (IV/a)	Kepala Bidang Koordinasi Pelaksanaan	25	25	5			35	90	Tinggi
							20	10	5		
4	MUCHTADI, S.E, M.M NIP 197210112003121005	Pembina Tk.I (IV/b)	Kepala Bidang Monitoring dan Evaluasi	25	25	5			35	90	Tinggi
							20	10	5		
5	WASRIZAL, SH, M.H NIP 197002171993031003	Penata Tk.I (III/d)	Analisis Kebijakan Ahli Muda	25	25	5			30,8	85,8	Tinggi
							20	0,8	5		
6	ANDI AMIRULLAH, SE NIP 197409122006041008	Penata Tk. I (III/d)	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	25	25	5			35	90	Tinggi
							20	10	5		
7	FAROUQ QADRI, SE NIP 197709042008031001	Penata Tk. I (III/d)	Analisis Kebijakan Ahli Muda	20	25	5			30	80	Sedang
							20	10			
8	ROSITA, SE, MM NIP 198112282010012018	Penata Tk. I (III/d)	Perencana Ahli Muda	25	25	5			35	90	Tinggi
							20	10	5		
9	Dr. INDRA BASTIAN TAHIR, S.Si, M.E NIP 198005112006041009	Pembina (IV/a)	Perencana Ahli Madya	25	25	5			30	85	Tinggi
							20	10			
10	ABDUL HAMID GHAZALI, ST.,M.IP NIP 197602122005021003	Pembina (IV/a)	Penelaah Teknis Kebijakan	25	30	5			40	100	Sangat Tinggi
							20	10	10		
11	DIAN ARDIANSYAH IZHAR, SE, MAP NIP 198003192003121005	Pembina (IV/a)	Penelaah Teknis Kebijakan	25	30	5			35	95	Sangat Tinggi
							20	10	5		
12	TEDDY KRISTANTO, S.Sos NIP 198005082008011012	Penata Tk. I (III/d)	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	25	25	5			35	90	Tinggi
							20	10	5		
13	FERI RAHMAT IRJA, SE NIP 19870910 2014041001	Penata Tk. I (III/d)	Penelaah Teknis Kebijakan	25	30	5			40	100	Sangat Tinggi
							20	10	10		
14	PURNAIRITA CANDRA KIRANA, S.IP NIP 198905122015032003	Penata (III/c)	Perencana Ahli Pertama	20	25	5			35	85	Tinggi
							20	10	5		
15	HENRI GULTOM, S.S NIP 197405292006041008	Penata (III/c)	Penelaah Teknis Kebijakan	25	25	5			35	90	Tinggi
							20	10	5		
16	ADRIAN LUF TI, A.Md NIP 198311142010011015	Penata Muda Tk.I (III/b)	Pengolah Data dan Informasi	20	25	5			25	75	Sedang
							20		5		
17	HERMANSYAH NIP 197903112007011016	Penata Muda (III/a)	Pengadministrasi Perkantoran	20	25	5			35	85	Tinggi
							20	10	5		
18	ALIF ADITYA WARDANA,S.Tr.IP NIP 200002122022081001	Penata Muda (III/a)	Penelaah Teknis Kebijakan	25	25	5			35	90	Tinggi
							20	10	5		
19	JUNAINAH, A.Md NIP 198009192025212002	VII	Pengelola Layanan Operasional	20	25	5			35	85	Tinggi
							20	10	5		
20	ANDI MUSMULIADI NIP 197703062025211002	V	Pengadministrasi Perkantoran	20	25	5			30	80	Sedang
							20	5	5		
21	MEBID RIYATNO NIP 200007312025211004	V	Pengadministrasi Perkantoran	20	25	5			30	80	Sedang
							20	5	5		
22	GALIH SURYO NUGROHO, S.Kom NIP 199904192025211018	IX	Penata Layanan Operasional	20	25	5			35	85	Tinggi
							20	10	5		
23	JERRY NORMAN SYAHPUTRA NIP 199906292025211016	V	Pengadministrasi Perkantoran	20	25	5			30	80	Sedang
							20	5	5		
24	OKTA DWI RIZKI NIP 199910132025211022	V	Pengadministrasi Perkantoran	20	25	5			30	80	Sedang
							20	5	5		
25	SULTAN FIRMAN RAHMAT RAMADHAN NIP 200410162025211001	V	Pengadministrasi Perkantoran	20	25	5			30	80	Sedang
							20	5	5		
26	YERNI APRIANI MASTIUR SIMANULLANG, S.Si NIP 199204212025212055	IX	Penata Layanan Operasional	20	25	5			35	85	Tinggi
							20	10	5		
NILAI RATA-RATA IP ASN BP2D										86,57	Tinggi

< 60 Sangat Rendah
61 - 70 Rendah
71 - 80 Sedang
81 - 90 Tinggi
91 - 100 Sangat Tinggi



LAPORAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT -SKM-



**BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
2025**

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Allah subhanahu wata'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga dapat diselesaikannya Laporan pelaksanaan kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat kepada Mitra Kerja/Organisasi Perangkat Daerah Pengampu Badan Pengelola Perbatasan Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025. Pedoman pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat sudah ditetapkan di dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik.

Tujuan dari Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat ini adalah untuk mengukur tingkat kepuasan kepada mitra kerja/Organisasi Perangkat Daerah Pengampu sebagai pengguna layanan dan meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik, serta untuk mendapatkan umpan balik (*feedback*) secara berkala atas pencapaian kinerja/kualitas pelayanan pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Demi kesempurnaan laporan yang kami susun mengharapkan kritik, saran, dan masukan yang konstruktif. Besar harapan semoga laporan ini bermanfaat dan menjadi masukan dalam pengambilan kebijakan terhadap penyelenggaraan kegiatan sekaligus sebagai bahan evaluasi bagi peningkatan pelayanan publik di lingkungan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Demikian Laporan ini disampaikan, ucapan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi, sehingga tersusunnya laporan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Tanjungpinang, Juli 2025

**KEPALA BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**



Drs. H. DOLI BONIARA, M. SI.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP.197207101992011003

Laporan Survey Kepuasan Masyarakat

Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan	2
1.4 Sasaran	3
1.5 Prinsip.....	3
1.6 Ruang Lingkup	4
1.7 Manfaat	4
BAB II	5
METODOLOGI PENELITIAN SURVEY	5
2.1 Definisi Survey	5
2.2 Metode dan Unsur Survey	5
2.3.1 Penetapan Pelaksana	7
2.3.2 Penyiapan Bahan Survey	7
2.3.3 Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data	8
2.3.4 Pelaksanaan Pengumpulan Data.....	9
2.4 Langkah-Langkah Pengolahan Data	9
2.4.1 Metode Pengolahan Data	9
2.4.2 Perangkat Pengolahan Data.....	11
2.4.3 Laporan Hasil Penyusunan Survey.....	12
2.4.4 Penyusunan Jadwal	14
BAB III	15
PEMBAHASAN HASIL SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT	15
3.1 Penetapan Waktu Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat.....	15
3.2 Jumlah Respondent	16
3.3 Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data Responden.....	16
3.4 Indeks Setiap Unsur Pelayanan	17

3.5 Karakteristik Responden	18
3.5.1 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	19
3.5.2 Responden Berdasarkan Umur	19
3.5.3 Berdasarkan Jenis Pendidikan	20
3.5.4 Berdasarkan Jenis Pekerjaan	21
3.5.5 Berdasarkan Jenis Keperluan	22
3.6 Pendapat Responden Tentang Pelayanan	24
3.7 Rencana Tindak Lanjut	25
BAB IV	26
PENUTUP	26
4.1 Kesimpulan	26
4.2 Saran.....	26
Lampiran 1	31
Lampiran II	34

DAFTAR TABEL

Table 1 Nilai Persepsi, Interval Konversi SKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan.....	10
Table 2 Unsur Survey Kepuasan Masyarakat.....	13
Table 3 Jadwal Penyusunan Laporan Survey Kepuasan Masyarakat.....	14
Table 4 Jadwal Pelaksanaan SKM Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepri	16
Table 5 Hasil Rata-rata Setiap Unsur Pelayanan Form Online	17
Table 6 Nilai Persepsi, Interval Konversi SKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit	18
Table 7 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	19
Table 8 Responden Berdasarkan Umur	19
Table 9 Responden Berdasarkan Jenis Pendidikan	20
Table 10 Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan.....	21
Table 11 Responden Berdasarkan Jenis Keperluan.....	22
Table 12 Jawaban Kuesioner Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan kepada Masyarakat pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau 2025	24
Table 13 Sampel Morgan dan Krejcie.....	28
Table 14 INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2025	29

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 PENGOLAHAN DATA SKM PER RESPONDEN DAN PER UNSUR PELAYANAN	31
Lampiran 2 Survei Kepuasan Masyarakat BPPD Tahun 2025.....	34

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelayanan publik oleh aparatur pemerintah ini masih banyak dijumpai kelemahan sehingga belum dapat memenuhi kualitas yang diharapkan masyarakat. Hal ini ditandai dengan masih adanya keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media masa maupun media sosial, sehingga dapat menimbulkan citra yang kurang baik terhadap aparatur pemerintah. Mengingat fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat maka pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan, seperti yang tercantum pada UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dimana mekanisme Survey berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik, sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik.

Dalam rangka usaha meningkatkan mutu pelayanan, diperlukan adanya reformasi, terutama restrukturisasi strategi pelayanan. Strategi ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja pegawai yang akhirnya akan menghasilkan *outcome* yang memuaskan yang dapat dilihat dari hasil Survey, untuk itu perlu dilaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat.

Survei Kepuasan Masyarakat tahun 2025 ini, merupakan survei terhadap pelayanan terkait layanan data dan informasi Kecamatan Perbatasan Prioritas (KKP) dan Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT), layanan usulan Program Pembangunan Kawasan Perbatasan, layanan koordinasi pembangunan di kawasan perbatasan, layanan konsultasi perbatasan, layanan penyediaan narasumber, layanan fasilitasi penyusunan rencana aksi pembangunan kawasan perbatasan, layanan sinkronisasi pengelolaan batas negara dan wilayah kawasan perbatasan, layanan informasi pelaksanaan kerjasama luar negeri.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat layanan urusan Pemerintahan pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau adalah:

- 1.2.1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
- 1.2.2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215)
- 1.2.3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik, sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dimaksudkan sebagai acuan bagi unit pelayanan instansi pemerintah dalam menyusun Survey kepuasan masyarakat untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya. Bagi masyarakat dan Mitra Kerja, Survey ini dapat digunakan sebagai gambaran tentang kinerja pelayanan unit yang melaksanakan Survey.

Tujuan dari Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat ini adalah untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat dan mitra kerja sebagai pengguna layanan dan meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik, serta untuk mendapatkan umpan balik (*feedback*) secara berkala atas pencapaian kinerja/kualitas pelayanan urusan pemerintahan pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka

peningkatan kualitas pelayanan publik yang selanjutnya secara berkesinambungan.

1.4 Sasaran

Sasaran penyusunan Survey kepuasan masyarakat adalah sebagai berikut:

- 1.4.1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan;
- 1.4.2. Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- 1.4.3. Mendorong penyelenggara layanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik;
- 1.4.4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik; dan
- 1.4.5. Mengukur kinerja seluruh pegawai di lingkungan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

1.5 Prinsip

Dalam melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan dengan memperhatikan prinsip, sebagai berikut:

- 1.5.1. **Transparan**
Hasil Survey kepuasan masyarakat harus dipublikasikan dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat.
- 1.5.2. **Partisipatif**
Dalam melaksanakan Survey kepuasan masyarakat harus melibatkan peran serta masyarakat dan pihak terkait lainnya untuk mendapatkan hasil Survey yang sebenarnya.
- 1.5.3. **Akuntabel**
Hal-hal yang diatur dalam Survey kepuasan masyarakat harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara benar dan konsisten kepada pihak yang berkepentingan berdasarkan kaidah umum yang berlaku.
- 1.5.4. **Berkesinambungan**
Survey kepuasan masyarakat harus dilakukan secara berkala dan berkelanjutan untuk mengetahui perkembangan peningkatan kualitas pelayanan.
- 1.5.5. **Keadilan**
Pelaksanaan Survey kepuasan masyarakat harus menjangkau semua pengguna layanan tanpa membedakan status ekonomi, budaya, agama, golongan dan lokasi geografis serta perbedaan kapabilitas dan mental.
- 1.5.6. **Netralitas**
Dalam melakukan Survey kepuasan masyarakat, surveyor tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi, golongan dan tidak berpihak.

1.6 Ruang Lingkup

Ruang lingkup penyusunan Survey kepuasan masyarakat penyelenggara pelayanan publik kepada Masyarakat/Mitra Kerja di Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau, meliputi metode Survey dan unsur Survey, langkah-langkah penyusunan Survey kepuasan masyarakat, langkah-langkah pengolahan data, perangkat pengolahan data, laporan hasil penyusunan Survey, penyusunan jadwal, pembahasan hasil Survey kepuasan masyarakat dan rencana tindak lanjut, kesimpulan dan saran masukan dari Survey.

1.7 Manfaat

Manfaat yang diharapkan dari penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat ini adalah sebagai berikut:

- 17.1 Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik;
- 17.2 Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik;
- 17.3 Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan atas hasil Survey kepuasan masyarakat;
- 17.4 Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah;
- 17.5 Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup pemerintah dan Pusat dan Daerah dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan; dan
- 17.6 Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan

BAB II

METODOLOGI PENELITIAN SURVEY

2.1 Definisi Survey

Pada dasarnya pedoman pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat sudah ditetapkan di dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik. Survey Kepuasan Masyarakat adalah pengukuran secara komprehensif tentang kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik. Survey Periodik adalah Survey yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik terhadap layanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Survey dapat dilakukan setiap 3 bulan (triwulan), 6 bulanan (semester) atau 1 (satu) tahun sekali.

2.2 Metode dan Unsur Survey

Metode yang digunakan untuk melakukan Survey kepuasan masyarakat menggunakan pendekatan metode kualitatif dengan pengukuran *Skala Likert*. *Skala Likert* merupakan suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam kuesioner (angket), dan merupakan skala yang sering digunakan dalam riset berupa Survey. Pada *skala likert* responden diminta untuk menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap sesuatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia.

Unsur Survey kepuasan masyarakat adalah faktor dan aspek yang dijadikan pengukuran kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017, terdapat 9 unsur yaitu:

2.2.1. Persyaratan Pelayanan

Syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

2.2.2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

2.2.3. Waktu Pelayanan

Jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

2.2.4. Biaya Tarif

Ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

2.2.5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

Hasil pelayanan yang telah diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk layanan ini adalah hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan berikut ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan.

2.2.6. Kompetensi & Perilaku Pelaksana

Kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman, serta sikap petugas.

2.2.7. Perilaku Pelaksana

Sikap petugas dalam memberikan pelayanan

2.2.8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut

2.2.9. Sarana dan Prasarana

Sarana adalah sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang

merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek) dan prasarana benda yang tidak bergerak (gedung).

2.3 Langkah-langkah Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat

Angka indeks yang didapatkan merupakan angka persepsi masyarakat terhadap layanan dari pemerintah yang mengukur tingkat kualitas pelayanan:

2.3.1 Penetapan Pelaksana

Pembentukan Tim Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat, yang terdiri dari Pengarah, Pelaksana (ketua dan anggota sebagai surveyor sebanyak 5 (lima) orang

2.3.2 Penyiapan Bahan Survey

a. Kuesioner

Dalam penyusunan SKM digunakan kuesioner sebagai alat bantu pengumpulan data kepuasan masyarakat penerima pelayanan. Kuesioner disusun berdasarkan tujuan Survey terhadap tingkat kepuasan masyarakat. Dalam pengambilan data kuesioner dibuat dalam bentuk kuisisioner *online*(*google forms*). Bagian dari Kuesioner

Kuesioner dibagi atas 2 (dua) bagian yaitu:

Bagian I : Judul kuisisioner dan nama instansi yang melakukan Survey serta identitas responden meliputi: alamat email, usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, dan jenis layanan.

Bagian II : Pertanyaan yang terstruktur berisikan jawaban dengan pilihan berganda (pertanyaan tertutup), sedangkan jawaban tidak terstruktur (pertanyaan terbuka) berupa pertanyaan dengan jawaban bebas, dimana responden

dapat menyampaikan pendapat, saran, kritik dan apresiasi.

b. Bentuk Jawaban

Desain bentuk jawaban pernyataan dari setiap pertanyaan unsur pelayanan dalam kuesioner, berupa jawaban pertanyaan pilihan berganda. Bentuk pilihan jawaban pertanyaan kuisisioner bersifat kualitatif untuk mencerminkan tingkat kualitas pelayanan. Tingkat kualitas pelayanan dimulai dari yang sangat baik sampai dengan sangat buruk. Pembagian jawaban dibagi dalam 4 (empat) kategori, yaitu:

- 1) **sangat buruk** diberi nilai persepsi 1;
- 2) **buruk** diberi nilai persepsi 2;
- 3) **baik** diberi nilai persepsi 3; dan
- 4) **sangat baik** diberi nilai persepsi 4.

2.3.3 Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data

a. Penetapan Responden

Cara menentukan jumlah responden/sampel penelitian menggunakan tabel atau rumus cukup bervariasi. Teknik penarikan sampel dapat disesuaikan dengan jenis layanan, tujuan Survey atau data yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan. Responden dipilih secara acak yang ditentukan sesuai dengan cakupan wilayah masing-masing unit pelayanan. Sedangkan untuk besaran sampel dan populasi dapat menggunakan tabel sampel dari **Krejcie dan Morgan (Tabel. 13)**, dengan rumus:

$$S = \{ \lambda^2 \cdot N \cdot P \cdot Q \} / \{ d^2 (N-1) + \lambda^2 \cdot P \cdot Q \}$$

dimana :

S = jumlah sampel

λ^2 = lambda (faktor pengali) dengan dk = 1,
taraf kesalahan bisa 1 %, 5 %, 10 %

N = populasi

P (populasi menyebar normal) = Q = 0,5

d = 0,0

a. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data Responden

Lokasi dan pengumpulan data responden dapat dilakukan di lokasi masing-masing responden.

2.3.4 Pelaksanaan Pengumpulan Data

1. Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat dan obyektif, perlu ditanyakan kepada masyarakat/ mitra kerja terhadap 9 unsur pelayanan yang telah ditetapkan.

2. Pengisian Pengumpulan Kuesioner

Pengisian kuesioner untuk pelayanan publik periode 2025 ini menggunakan *form online*. Pengumpulan kuisisioner dapat dilakukan dengan Pengumpulan data menggunakan *form online*.

2.4 Langkah-Langkah Pengolahan Data

2.4.1 Metode Pengolahan Data

Nilai SKM dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan Survey kepuasan masyarakat

$$\text{Bobot nilai rata -rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{x} = N$$

terhadap 9 unsur pelayanan yang dikaji. Setiap unsur pelayanan memiliki penimbangan yang sama dengan rumus sebagai berikut :

N : bobot nilai per unsur

Contoh : Jika unsur yang dikaji sebanyak 9 (Sembilan) unsur, makabobot nilai rata-rata tertimbang adalah 0,11

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Unsur}}{\text{Jumlah Bobot}} = \frac{1}{9} = 0,11$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut di atas dikonservasikan dengan nilai dasar 25,

SKM Unit Pelayanan X 25

dengan rumus sebagai berikut:

Mengingat unit pelayanan mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, maka setiap unit pelayanan dimungkinkan untuk:

- a. Menambah unsur yang dianggap relevan; dan
- b. Memberikan dalam unit pelayanan, dengan catatan jumlah bobot seluruh unsur tetap 1.

Table 1 Nilai Persepsi, Interval Konversi SKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan (x)	Kinerja Unit Pelayanan (y)
1	1,00–2,5996	25,00–64,99	D	Tidak Baik
2	2,60–3,064	65,00–76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644–3,532	76,61–88,30	B	Baik
4	3,5324–4,00	88,31–100,00	A	Sangat Baik

2.4.2 Perangkat Pengolahan Data

➤ Pengolahan dengan komputer

Data entry dan penghitungan survey dapat dilakukan dengan program komputer/system data base (*Microsoft Excel*).

- 1) Data isian kuesioner dari setiap responden dimasukan ke dalam formulir mulai dari pertanyaan 1 sampai dengan pertanyaan 9, dimana dari 9 pertanyaan tersebut, mengandung 9 unsur pelayanan yang harus dilakukan Survey.
- 2) Langkah selanjutnya, untuk mendapatkan nilai rata-rata per-unsur pelayanan dan nilai Survey per unsur pelayanan, sebagai berikut:
 - a) Nilai rata-rata setiap unsur pelayanan.
Nilai masing-masing pertanyaan terkait pelayanan dijumlahkan (kebawah) sesuai dengan jumlah kuesioner yang diisi oleh responden. Untuk mendapatkan nilai rata-rata pertanyaan, masing- masing pertanyaan unsur pelayanan dibagi dengan jumlah responden yang mengisi. Setelah mendapat nilai rata-rata setiap unsur pelayanan. Untuk mendapatkan nilai rata-rata setiap unsur pelayanan, jumlah nilai rata-rata setiap unsur pelayanan tersebut dikaitkan dengan 0,11 sebagai nilai bobot rata-rata tertimbang.
 - b) Nilai Survey Pelayanan
Untuk mendapatkan nilai Survey unit pelayanan, ke 9 unsur dari rata- rata tertimbang tersebut pertanyaan tersebut dijumlahkan.
 - c) Nilai Indeks Pelayanan
Untuk mendapatkan nilai Survey unit pelayanan, dengan cara

menjumlahkan jumlah X.

d) **Pengujian Kualitas Data**

Data pendapat masyarakat yang telah dimasukkan dalam masing- masing kuesioner, disusun dengan mengkompilasi data responden yang dihimpun berdasarkan kelompok umur, Pemerintahan terakhir dan pekerjaan utama/ asal instansi. Informasi ini dapat digunakan untuk mengetahui profil responden dan kecenderungan penerima layanan.

2.4.3 Laporan Hasil Penyusunan Survey

Hasil Akhir kegiatan penyusunan Survey kepuasan masyarakat dari setiap unit pelayanan instansi pemerintah, disusun dengan materi utama sebagai berikut :

2.4.3.1. Survey setiap unsur pelayanan

Berdasarkan hasil penghitungan Survey kepuasan masyarakat, jumlah nilai dari setiap unit pelayanan diperoleh dari jumlah nilai rata- rata setiap unsur pelayanan. Adapun nilai komposit (gabungan) untuk setiap unit pelayanan, merupakan jumlah nilai rata-rata dari setiap unsur pelayanan dikalikan dengan penimbangan yang sama, yaitu 0,11. Hasil nilai rata-rata unsur dan masing-masing unit pelayanan adalah sebagaimana tabel berikut:

Table 2 Unsur Survey Kepuasan Masyarakat

No	Unsur SKM	Nilai Unsur SKM
1.	Kesesuaian Pelayanan	X1
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	X2
3.	Waktu Pelayanan	X3
4.	Produk Spesifikasi Jenis Layanan	X4
5.	Perilaku Pelaksana	X5
6.	Sarana dan Prasarana	X6
7.	Kompetensi Pelayanan	X7
8	Penanganan Pengaduan Pengguna Layanan	X8
9	Biaya Pelayanan	X9

Maka untuk mengetahui nilai Survey unit pelayanan dihitung dengancara sebagai berikut:

$$(X1 \times 0,11) + (X2 \times 0,11) + (X3 \times 0,11) + (X4 \times 0,11) + (X5 \times 0,11) + (X6 \times 0,11) + (X7 \times 0,11) + (X8 \times 0,11) + (X9 \times 0,11) = Y$$

Nilai Survey adalah Nilai Indeks (Y)

Dengan demikian, nilai Survey unit pelayanan hasilnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Nilai SKM setelah dikonversi = Nilai Indeks x Nilai Dasar = $3,47 \times 25 = 86,91$
(lihat Tabel 1, Nilai Interval Konversi)
- Mutu pelayanan (lihat Tabel 1, Mutu Layanan)
- Kinerja unit pelayanan (lihat Tabel 1)

2.4.3.2. Prioritas peningkatan kualitas pelayanan

Dalam peningkatan kualitas pelayanan, diprioritaskan pada unsur yang mempunyai nilai paling rendah, sedangkan unsur yang mempunyai nilai cukup baik harus tetap dipertahankan.

2.4.4 Penyusunan Jadwal

Penyusunan indeks kepuasan masyarakat diperkirakan memerlukan waktu selama 2 (dua) bulan dengan rincian sebagai berikut:

Table 3 Jadwal Penyusunan Laporan Survey Kepuasan Masyarakat

No	Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan
1	Persiapan	25 (dua puluh lima) hari kerja
2	Pengumpulan Data/Survey IKM	30 (Tiga puluh) hari kerja
3	Pengolahan Data Indeks	10 (Sepuluh) hari kerja
4	Analisa	11 (Sebelas) hari kerja
5	Penyajian	8 (Delapan) hari kerja

BAB III

PEMBAHASAN HASIL SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT

Metode yang digunakan untuk melakukan Survey kepuasan masyarakat pada Pelayanan Pemerintahan kepada Masyarakat pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau menggunakan pendekatan metode kualitatif dengan pengukuran *Skala Likert*. Pada *Skala Likert* responden diminta untuk menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap sesuatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia.

Adapun unsur Survey kepuasan masyarakat mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017, terdapat 9 unsur yaitu:

1. Kessuaian Pelayanan
2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur
3. Waktu Pelayanan
4. Produk Spesifikasi Jenis Layanan
5. Perilaku Pelaksana
6. Sarana dan Prasarana
7. Kompetensi Pelayanan
8. Penanganan Pengaduan Pengguna Layanan
9. Biaya Pelayanan

3.1 Penetapan Waktu Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat

Pelaksanaan persiapan penyusunan laporan Survey kepuasan masyarakat Pelayanan Pemerintahan kepada Masyarakat terhadap pelayanan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau dimulai dari tanggal 10 Februari sampai dengan 14 Maret 2025, dilaksanakan pada jam kerja di Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Adapun waktu pelaksanaan dari tiap tahapan

dapat dilihat pada jadwal berikut ini:

Table 4 Jadwal Pelaksanaan SKM Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepri

No	Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan
1	Persiapan	10 Februari - 14 Maret 2025
2	Pengumpulan Data/Survey IKM	17 Maret - 30 April 2025
3	Pengolahan Data Indeks	28 April - 9 Mei 2025
4	Analisa	14 Mei - 28 Mei 2025
5	Penyajian	28 Mei - 10 Juni 2025

3.2 Jumlah Respondent

Jumlah responden/sampel penelitian menggunakan tabel atau rumus cukup bervariasi. Teknik penarikan sampel dapat disesuaikan dengan jenis layanan, tujuan Survey atau data yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan. Responden dipilih secara acak yang ditentukan sesuai dengan cakupan wilayah masing-masing unit pelayanan. Sedangkan untuk besaran sampel dan populasi dapat menggunakan tabel sampel dari *Krejcie dan Morgan*. Pada Survey kepuasan masyarakat pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepri menggunakan rumus tabel pengambilan sampel yang cukup populer yaitu Tabel *Krejcie dan Morgan*.

3.3 Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data Responden

Pengumpulan data dilaksanakan tanggal 17 Maret 2025 sampai dengan 30 April 2025 dengan melakukan tabulasi data hasil dari isian kuesioner Survey Kepuasan Masyarakat

(SKM) terhadap layanan yang di berikan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau kepada public/masyarakat melalui *google forms*.

3.4 Indeks Setiap Unsur Pelayanan

a) Nilai rata-rata setiap unsur pelayanan.

Nilai masing-masing pertanyaan terkait pelayanan dijumlahkan (ke bawah) sesuai dengan jumlah kuesioner yang diisi oleh responden (**Lampiran I**). Untuk mendapatkan nilai rata-rata pertanyaan, masing- masing pertanyaan unsur pelayanan dibagi dengan jumlah responden. Jumlah responden 72 orang dan menggunakan *google forms*.

Hasil Survey diperoleh data sebagai berikut:

Table 5 Hasil Rata-rata Setiap Unsur Pelayanan Form Online

No.	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan
1	Kesesuaian Pelayanan	3,54
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	3,49
3	Waktu Pelayanan	3,47
4	Produk Spesifikasi Jenis Layanan	3,53
5	Perilaku Pelaksana	3,47
6	Sarana dan Prasarana	3,44
7	Kompetensi Pelayanan	3,49
8	Penanganan Pengaduan Pengguna Layanan	3,43
9	Biaya Pelayanan	3,46

Dari tabel hasil rata-rata setiap unsur pelayanan diatas, maka dapat disimpulkan pendapat responden yang menyatakan bahwa:

- Unsur Penanganan Pengaduan pengguna layanan bernilai paling rendah dari unsur pelayanan lainnya yaitu 3,43 (ini menyatakan pelayanan pada unsur ini perlu di tingkatkan).

b) Nilai Survey Pelayanan

Untuk mendapatkan nilai Survey unit pelayanan, ke Sembilan unsur dari rata-rata tertimbang tersebut dijumlahkan, sebagai berikut:

- Nilai SKM setelah dikonversi = Nilai Indeks x Nilai Dasar = $3,47 \times 25 = 86,91$
- Mutu Pelayanan termasuk kategori **B**.
- Kinerja unit pelayanan adalah **Baik**.

Lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Table 6 Nilai Persepsi, Interval Konversi SKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan(x)	Kinerja Unit Pelayanan (y)
1	1,00–2,5996	25,00–64,99	D	Tidak Baik
2	2,60–3,064	65,00–76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644–3,532	76,61–88,30	B	Baik
4	3,5324–4,00	88,31–100,00	A	Sangat Baik

3.5 Karakteristik Responden

- Karakteristik reponden hasil Survey kepuasan masyarakat pada Pelayanan Pemerintahan kepada Masyarakat pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau dibedakan menjadi:
 1. Jenis Kelamin
 2. Usia
 3. Pendidikan
 4. Pekerjaan
 5. Jenis layanan yang di terima

3.5.1 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

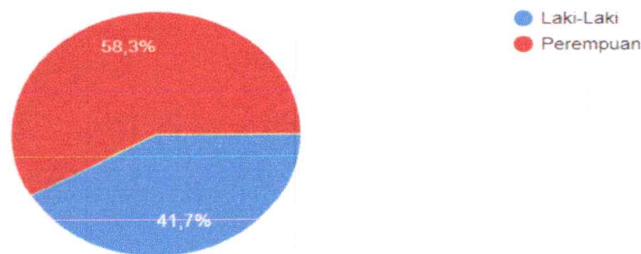
Table 7 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah Responden	(%)
1	Laki-laki	30	41,7
2	Perempuan	42	58,3
Jumlah		72	100

Dari 72 Responden, Responden yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 41,7% (empat puluh satu koma tujuh persen), sedangkan Responden yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 58,3% (lima puluh delapan koma tiga persen).

JENIS KELAMIN

72 jawaban



3.5.2 Responden Berdasarkan Umur

Responden berdasarkan umur dibagi menjadi 6 (enam) kelompok, yaitu kelompok umur 18 s.d. 20 tahun, kelompok 21 s.d 30 Tahun, kelompok 31 s.d 40 tahun, kelompok 41 s.d 50 tahun, kelompok 51 s.d. 60 tahun dan kelompok 60 tahun keatas. Jumlah responden berdasarkan umur dapat dilihat pada tabel 8 dibawah ini:

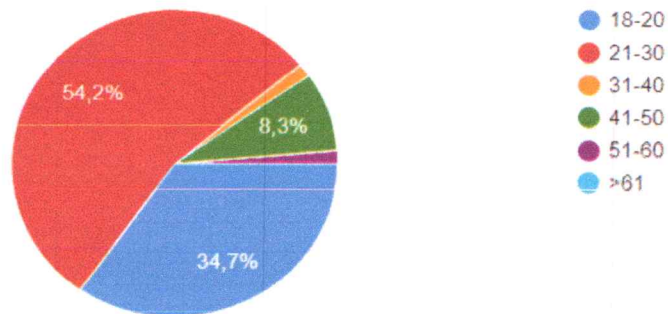
Table 8 Responden Berdasarkan Umur

Nomor	Umur	Jumlah Responden	(%)
1	18 s.d. 20 Tahun	25	34,7
2	21 s.d 30 Tahun	39	54,2
3	31 s.d 40 Tahun	1	1,4
4	41 s.d 50 Tahun	6	8,3
5	51 s.d 60 Tahun	1	1,4
6	60 >	0	0
Jumlah		72	100

Berdasarkan tabel 8 diatas menyatakan bahwa responden yang melakukan pengajuan layanan mayoritas dilakukan oleh kelompok umur 21 s.d. 30 tahun sebanyak 39 orang atau sebesar 54,2% (lima puluh empat koma dua persen), dan kelompok umur 60> sebanyak 0 orang

USIA

72 jawaban



3.5.3 Berdasarkan Jenis Pendidikan

Responden berdasarkan jenis Pendidikan dibagi menjadi 10 (sepuluh) kelompok, yaitu kelompok SD, SMP, SMA, D1, D2, D3, D4, S1, S2 dan S3. Jumlah responden berdasarkan jenis pendidikan dapat dilihat pada tabel 9 dibawah ini.

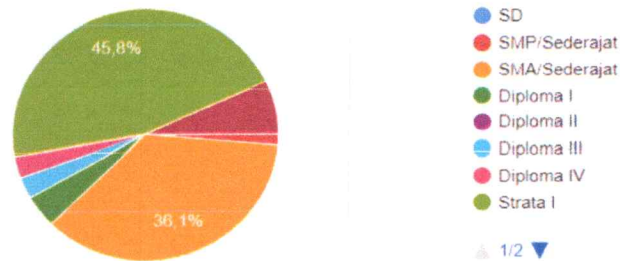
Table 9 Responden Berdasarkan Jenis Pendidikan

Nomor	Pendidikan	Jumlah Responden	(%)
1	SD	0	0
2	SMP	1	1,4
3	SMA	26	36,1
4	D1	3	4,8
5	D2	0	0
6	D3	2	2,8
7	D4	2	2,8
8	S1	33	45,8
9	S2	5	6,9
10	S3	0	0
Jumlah		72	100

Berdasarkan tabel 9 diatas menyatakan bahwa responden yang melakukan pengajuan layanan mayoritas dilakukan oleh kelompok yang berpendidikan S1, yaitu sebanyak 33 orang atau sebanyak 45,83% (empat puluh lima koma delapan persen) dan kelompok berpendidikan SD, D2, dan S3 sebanyak 0 orang

PENDIDIKAN

72 jawaban



3.5.4 Berdasarkan Jenis Pekerjaan

Responden berdasarkan jenis pekerjaan dapat diukur pada tabbel di bawah ini:

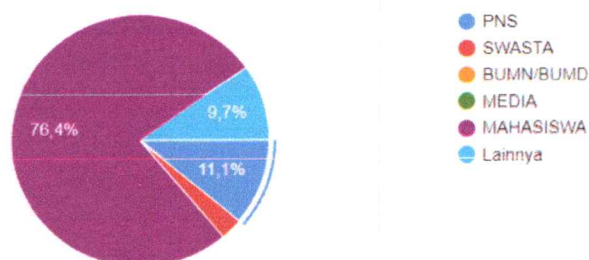
Table 10 Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan

Nomor	Pekerjaan	Jumlah Responden	(%)
1	PNS	8	11,1
2	Swasta	2	2,8
3	BUMN/ BUMD	0	0
4	Media	0	0
5	Mahasiswa	55	76,4
6	Pelajar	0	0
7	Honorar	0	0
8	Polri	0	0
9	Wiraswasta	0	0
10	Lain-lain	7	9,7
Jumlah		72	100

Berdasarkan tabel 10 diatas, responden berdasarkan jenis pekerjaan, yaitu Mahasiswa merupakan responden terbanyak yaitu 55 responden atau sebesar 76,4% (Tujuh Puluh Enam koma Empat Persen). PNS sebanyak 8 responden atau sebesar 11,1 % (Sebelas koma Satu Persen). Berjenis pekerjaan Swasta 2 Responden atau sebesar 2,8% (Dua koma Delapan Persen), sedangkan berjenis pekerjaan lainnya yaitu 7 responden atau sebesar 9,7% (Sembilan koma Tujuh Persen).

PEKERJAAN

72 jawaban



3.5.5 Berdasarkan Jenis Keperluan

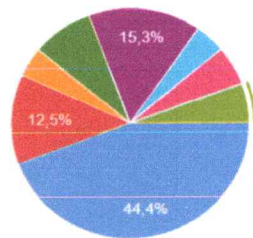
Responden berdasarkan jenis keperluan dibagi menjadi 8 (delapan) kelompok yaitu:

Table 11 Responden Berdasarkan Jenis Keperluan

No	Jenis Keperluan	Jumlah Responden	(%)
1	Layanan data dan informasi Kecamatan Perbatasan Prioritas (KPP) dan Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT))	32	44,4
2	Layanan Usulan Program Pembangunan di kawasan perbatasan	9	12,5
3	Layanan Koordinasi pembangunan di kawasan perbatasan	3	4,2
4	Layanan Konsultasi Perbatasan	6	8,3
5	Layanan Penyediaan Narasumber	11	15,3
6	Layanan Fasilitasi penyusunan rencana aksi pembangunan kawasan perbatasan	3	4,2
7	Layanan Fasilitasi Sinkronisasi Pengelolaan Batas Negara dan Wilayah Perbatasan	4	5,6
8	Layanan Informasi Pelaksanaan Kerjasama Luar Negeri	4	5,6
Jumlah		72	100

Berdasarkan tabel 11 diatas menyatakan bahwa responden yang melakukan pengajuan Layanan data dan informasi Kecamatan Perbatasan Prioritas (KKP) dan Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) paling banyak yaitu 32 responden dari 72 jumlah total responden atau sebesar 44,4% (Empat Puluh Empat koma Empat Persen).

72 jawaban



- Layanan data dan informasi Kecamatan Perbatasan Prioritas (KKP) dan Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT)
- Layanan Usulan Program Pembangunan di kawasan perbatasan
- Layanan Koordinasi pembangunan di kawasan perbatasan
- Layanan Konsultasi Perbatasan
- Layanan Penyediaan Narasumber
- Layanan Fasilitasi penyusunan rencana
- Layanan Fasilitasi Sinkronisasi Penge
- Layanan Informasi Pelaksanaan Kerja

3.6 Pendapat Responden Tentang Pelayanan

Pendapat responden tentang kedelapan layanan yang diberikan dapat diukur pada tabel 12 berikut ini:

Table 12 Jawaban Kuesioner Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan kepada Masyarakat pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau 2025

1. Bagaimana pendapat anda tentang kesesuaian pelayanan dengan jenis pelayanannya? a. Sangat Baik b. Baik c. Buruk d. Sangat Buruk	Resp. 40 31 1 0
2. Bagaimana pendapat anda tentang kemudahan Prosedur Pelayanan? a. Sangat Baik b. Baik c. Buruk d. Sangat Buruk	 36 35 1 0
3. Bagaimana pendapat anda tentang kemudahan Prosedur Pelayanan? a. Sangat Baik b. Baik c. Buruk d. Sangat Buruk	35 36 1 0
4. Menurut Anda, apakah hasil dari produk pelayanan yang diberikan sudah sesuai dengan kebutuhan? a. Sangat Sesuai b. Sesuai c. Tidak Sesuai d. Sangat Tidak Sesuai	38 34 0 0
5. Bagaimana pendapat Anda mengenai perilaku petugas dalam melayani terkait kesopanan dan keramahannya? a. Sangat Baik b. Baik c. Buruk d. Sangat Buruk	35 36 1 0

6. Bagaimana pendapat Anda tentang kualitas sarana dan prasarana yang disediakan? a. Sangat Baik b. Baik c. Buruk d. Sangat Buruk	Resp. 34 36 2 0
7. Bagaimana pendapat saudara tentang Kompetensi / Kemampuan Petugas dalam Pelayanan? a. Sangat Kompeten b. Kompeten c. Kurang Kompeten d. Tidak Kompeten	 35 37 0 0
8. Bagaimana pendapat saudara tentang penanganan Pengaduan Pengguna Layanan? a. Sangat Kompeten b. Kompeten c. Kurang Kompeten d. Tidak Kompeten	33 37 2 0
9. Bagaimana pendapat anda tentang kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan ? a. Gratis b. Murah c. Mahal d. Sangat Mahal	39 28 4 1

3.7 Rencana Tindak Lanjut

Unsur layanan pengaduan pengguna layanan, merupakan unsur dari unsur layanan lainnya yang bernilai paling rendah, untuk meningkatkan layanan unsur ini, Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau akan memperbaiki Pelayanan Pengaduan Layanan yang diberikan, baik. Pelayanan pengaduan layanan yang berbasis media sosial dan *website* maupun pengaduan layanan yang seara langsung dengan menyediakan kotak saran/ kotak pengaduan di ruang tamu OPD Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari hasil Survey kepuasan masyarakat Pelayanan Pemerintahan kepada Masyarakat pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepri dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 4.1.1. Jumlah responden dalam Survey kepuasan masyarakat Pelayanan Pemerintahan kepada Masyarakat pada Badan pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 72 Responden secara online;
- 4.1.2. Karakteristik responden mayoritas berumur antara 21 s.d 30 tahun, dengan latar belakang pendidikan Sarjana (S1 dan SMA);
- 4.1.3. Nilai Indeks Pelayanan Pemerintahan kepada Masyarakat pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepri adalah **3,47** dengan Nilai Survey Kepuasan Masyarakat setelah dikonversi mendapatkan nilai **86,91** dan Mutu Pelayanan termasuk kategori **B** dengan hasil Kinerjaunit pelayanan adalah **Baik**.

4.2 Saran

Beragamnya karakteristik dari responden dalam menyikapi berbagai unsur layanan, maka untuk meningkatkan pelayanan publik pada Pelayanan Pemerintahan kepada Masyarakat pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau, disarankan sebagai berikut:

- 4.2.1. Memperbarui kualitas Pelayanan Penanganan Pengaduan Pengguna layanan, sehingga hambatan-hambatan dalam memberikan layanan kepada masyarakat dapat di minimalisir sekecil mungkin .
- 4.2.2. Membuat sesuatu platform pengaduan layanan yang berbasis online, sehingga masyarakat dapat menyampaikan keluhan-keluhannya dalam pelayanan yang diberikan dimanapun berada dan tidak terbatas waktu dan tempat
- 4.2.3. Menindaklanjuti pengadaan layanan yang masuk secara cepat, tepat dan solusi yang terbaik yang dapat meningkatkan kepuasan kepada masyarakat yang mempunyai masalah dalam memperoleh layanan yang diberikan.
- 4.2.4. Memperbaiki Sarana dan Prasarana Layanan, sehingga memberikan kenyamanan kepada pengguna layanan saat menggunakan layanan.

Dengan telah disusunnya Laporan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM), Pelayanan kepada Masyarakat pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau, diharapkan menjadi pedoman sehingga tercipta suatu bentuk pelayanan yang prima dalam pelaksanaan administrasi dan mampu menjadi unit pelayanan yang profesional dan berwawasan pengabdian.

Table 13 Sampel Morgan dan Krejcie

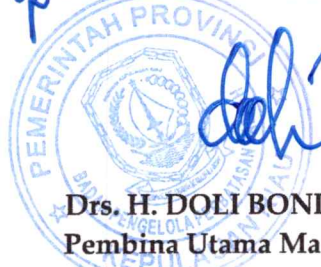
Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)
10	10	220	140	1200	291
15	14	230	144	1300	297
20	19	240	148	1400	302
25	24	250	152	1500	306
30	28	260	155	1600	310
35	32	270	159	1700	313
40	36	280	162	1800	317
45	40	290	165	1900	320
50	44	300	169	2000	322
55	48	320	175	2200	327
60	52	340	181	2400	331
65	56	360	186	2600	335
70	59	380	191	2800	338
75	63	400	196	3000	341
80	66	420	201	3500	346
85	70	440	205	4000	351
90	73	460	210	4500	354
95	76	480	214	5000	357
100	80	500	217	6000	361
110	86	550	226	7000	364
120	92	600	234	8000	367

Table 14 INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) BADAN PENGELOLA PERBATAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2025

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) BADAN PENGELOLA [ERBATSAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2025					
86,80			Responden		
No	Unsur Pelayanan	Nilai Rata-rata	Usia	:	18-20 Tahun , 25 Orang.
X1	Kesesuaian Pelayanan	3,54		:	21 s.d 30 Tahun, 39 Orang.
X2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	3,49		:	31 s.d 40 Tahun, 1 Orang.
X3	Waktu Pelayanan	3,47		:	41 s.d 50 Tahun, 6 Orang
				:	50 s.d 60 Tahun, 1 Orang
				:	60 >, 0 Orang.
X4	Produk Spesifikasi Jenis Layanan	3,53		Pend.	:
X5	Perilaku Pelaksana	3,47	:		SMP 1 Orang
			:		SMA 26 Orang
			:		D1 3 Orang
			:		D2 0 Orang
			:		D3 2 Orang
X6	Sarana dan Prasarana	3,44	:		D4 2 Orang
			:		S1 33 Orang
			:		S2 5 Orang
X7	Kompetensi Pelayanan	3,49	Pekerj aan	:	S3 0 Orang
				:	Pegawai Negri Sipil , 8 Orang
				:	Swasta, 2 Orang
				:	Media, 0 Orang
X8	Penanganan Pengaduan Pengguna Layanan	3,43			
X9	Biaya Pelayanan	3,46			

Demikian laporan akhir dari kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) disusun dan disampaikan sebagai evaluasi bagi Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam upaya peningkatan dan pengembangan kualitas pelayanan. Semoga hasil dari pengukuran Indeks Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dapat dijadikan bahan masukan untuk pengembangan dan peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dalam menghadapi dan menjalankan Reformasi Birokrasi di bidang pelayanan publik, khususnya pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau untuk memberikan pelayanan prima.

Tanjungpinang, Juli 2025
**KEPALA BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**



Drs. H. DOLI BONIARA, M. SI.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP.197207101992011003

PENGOLAHAN DATA SURVEI KEPUASAAN MASYARAT PER RESPONDEN DAN PER UNSUR PELAYANAN

NO REPS	NILAI UNSUR PELAYAN									
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	
1	3	3	3	3	3	3	3	3	4	
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
5	4	3	3	4	4	3	4	4	3	
6	3	3	4	3	3	4	4	3	3	
7	3	4	4	3	4	4	3	3	2	
8	4	3	3	3	3	3	3	3	3	
9	3	4	4	4	3	3	4	4	4	
10	4	3	4	3	4	4	3	3	4	
11	3	3	3	3	3	3	3	3	4	
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
13	3	3	3	4	3	3	4	4	2	
14	3	4	3	4	3	4	3	3	4	
15	2	3	2	3	2	3	4	4	1	
16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
18	4	4	4	4	4	4	3	3	4	
19	4	3	4	3	3	4	3	3	3	
20	3	4	4	3	3	4	3	4	3	
21	4	3	3	4	4	3	3	3	4	
22	3	4	3	3	3	4	4	3	3	
23	3	3	4	3	4	4	4	3	4	
24	4	4	4	4	4	4	3	4	4	
25	4	4	3	4	4	4	4	4	4	
26	4	4	4	4	4	3	4	4	4	
27	3	4	3	3	3	3	3	3	3	
28	4	3	3	3	3	4	4	3	3	
29	3	4	3	4	4	3	3	3	4	
30	4	3	3	4	3	3	3	4	4	
31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
32	3	3	3	3	3	2	4	3	3	
33	4	4	3	3	3	3	4	4	4	
34	3	3	4	4	4	3	4	3	3	
35	3	3	3	4	3	3	3	4	4	
36	4	4	4	4	4	4	4	4	3	
37	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
38	3	3	3	3	3	3	3	3	4	
39	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
40	4	3	4	3	3	4	3	3	4	
41	4	4	3	4	4	4	4	4	3	
42	3	4	3	3	3	3	3	3	4	
43	4	3	4	4	4	4	4	3	4	
44	4	3	3	4	3	3	3	4	3	

45	3	4	3	3	4	4	4	3	4
46	4	4	4	3	4	3	4	4	2
47	3	3	4	4	3	3	3	3	3
48	3	3	3	3	3	4	3	3	3
49	4	4	4	4	4	3	3	3	4
50	4	4	3	3	3	3	3	3	4
51	3	4	3	4	4	4	3	4	3
52	4	3	4	4	3	4	4	4	3
53	4	3	3	4	4	4	3	3	3
54	3	2	3	3	3	3	3	3	4
55	4	4	4	4	4	4	4	4	4
56	3	3	4	4	4	3	3	3	4
57	4	4	3	3	3	2	4	2	3
58	4	3	3	4	3	3	3	4	4
59	3	4	4	3	4	4	3	3	4
60	4	3	3	4	3	3	4	4	3
61	4	3	4	4	3	3	4	3	3
62	3	4	3	3	4	3	3	4	3
63	4	3	3	3	3	3	4	3	2
64	4	4	4	4	4	4	4	4	3
65	4	4	4	3	4	3	4	3	3
66	3	4	3	3	3	3	3	4	4
67	4	3	4	4	4	4	4	4	4
68	3	3	4	3	3	3	3	3	4
69	4	4	3	4	4	4	4	4	3
70	3	3	4	3	3	3	3	2	4
71	4	4	3	4	4	4	3	3	3
72	3	3	4	3	3	3	3	4	4
Nilai/ Unsur	255	251	250	254	250	247	251	247	249
NNR/Unsur	3,54	3,49	3,47	3,53	3,47	3,44	3,49	3,43	3,46
0,111	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
Nilai Tertimbang/Unsur	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,38	0,39	0,38	0,38
	25								
	86,91								

Keterangan :

- U1 s.d. U9 = Unsur-Unsur pelayanan
- NRR = Nilai Rata-Rata
- IKM = Indeks Kepuasan Masyarakat
- *) = Jumlah NRR IKM tertimbang
- **) = Jumlah NRR Tertimbang x 25
- NRR = Jumlah nilai per unsur dibagi
- per Jumlah kuesioner yang terisi
- Unsur
- NRR = $\text{NRR per unsur} \times 0.111$
- tertim per unsur
- bang

IKM UNIT PELAYANAN : 86,91**Mutu Pelayanan :**

- A** (Sangat Baik) : 88,31 - 100,00
- B** (Baik) : 76,61 - 88,30
- C** (Kurang Baik) : 65,00 - 76,60
- D** (Tidak Baik) : 25,00 - 64,99

No.	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA
U1	Kesesuaian Pelayanan	3,54
U2	Sistem mekanismne dan prosedur	3,49
U3	Waktu Pelayanan	3,47
U4	Produk spesifikasi jenis layanan	3,53
U5	Prilaku pelaksana	3,47
U6	Sarana dan prasarana	3,44
U7	Kompetensi pelayanan	3,49
U8	Penangan pengaduan pengguna layanan	3,43
U9	Biaya pelayanan	3,46

SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) BADAN PENGELOLAAN PERBATASAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU 2025

B I U ↻ ✕

Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan layanan kepada masyarakat berupa, Layanan data dan informasi Kecamatan Perbatasan Prioritas (KPP) dan Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT), Layanan Usulan Program Pembangunan di kawasan perbatasan, Layanan Koordinasi pembangunan di kawasan perbatasan, Layanan Konsultasi Perbatasan, Layanan Penyediaan Narasumber, Layanan Fasilitasi penyusunan rencana aksi pembangunan kawasan perbatasan, Layanan Fasilitasi Sinkronisasi Pengelolaan Batas Negara dan Wilayah Perbatasan, Layanan Informasi Pelaksanaan Kerjasama Luar Negeri.

Pelaksanaan kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 ini, sudah mendapat rekomendasi "**LAYAK**" dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepulauan Riau, sebagai kegiatan statistik sektoral tanggal 3 Maret 2025 dengan identitas rekomendasi **V - 25. 2100.004**

EMAIL *

Teks jawaban singkat

Data Responden

Mohon Perkenan Bapak/ibu untuk dapat mengisi identitas terlebih dahulu. Identitas Bapak/ibu tidak akan disebarluaskan dan hanya akan dipergunakan untuk keperluan kegiatan survey ini, Terimakasih

NAMA *

Teks jawaban singkat



Data Responden

Mohon Perkenan Bapak/ibu untuk dapat mengisi identitas terlebih dahulu. Identitas Bapak/ibu tidak akan disebarluaskan dan hanya akan dipergunakan untuk keperluan kegiatan survey ini, Terimakasih

NAMA *

Teks jawaban singkat

JENIS KELAMIN *

- ☐ Laki-Laki
- ☐ Perempuan

USIA *

- ☐ 18-20
- ☐ 21-30
- ☐ 31-40
- ☐ 41-50
- ☐ 51-60
- ☐ >61



PENDIDIKAN *

- ☐ SD
 - ☐ SMP/Sederajat
 - ☐ SMA/Sederajat
 - ☐ Diploma I
 - ☐ Diploma II
 - ☐ Diploma III
 - ☐ Diploma IV
 - ☐ Strata I
 - ☐ Strata II
 - ☐ Strata III
-

PEKERJAAN *

- ☐ PNS
- ☐ SWASTA
- ☐ BUMN/BUMD
- ☐ MEDIA
- ☐ MAHASISWA
- ☐ Lainnya



**SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
KEPULAUAN RIAU TAHUN 2025**



PENDAPAT RESPONDEN TENTANG PELAYANAN

111

Jenis layanan yang di terima? *

- ☐ Layanan data dan informasi Kecamatan Perbatasan Prioritas (KPP) dan Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT))
- ☐ Layanan Usulan Program Pembangunan di kawasan perbatasan
- ☐ Layanan Koordinasi pembangunan di kawasan perbatasan
- ☐ Layanan Konsultasi Perbatasan
- ☐ Layanan Penyediaan Narasumber
- ☐ Layanan Fasilitasi penyusunan rencana aksi pembangunan kawasan perbatasan
- ☐ Layanan Fasilitasi Sinkronisasi Pengelolaan Batas Negara dan Wilayah Perbatasan
- ☐ Layanan Informasi Pelaksanaan Kerjasama Luar Negeri

1. Bagaimana pendapat anda tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya? *

- ☐ Sangat Baik
- ☐ Baik
- ☐ Buruk
- ☐ Sangat Buruk



2. Bagaimana pendapat anda tentang kemudahan Prosedur Pelayanan? *

- ☐ Sangat Mudah
- ☐ Mudah
- ☐ Sulit
- ☐ Sangat Sulit

110

3. Bagaimana pendapat anda tentang kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan? *

- ☐ Sangat Baik
- ☐ Baik
- ☐ Buruk
- ☐ Sangat Buruk

4. Menurut anda apakah hasil dari Produk Pelayanan yang diberikan sudah sesuai dengan kebutuhan? *

- ☐ Sangat Sesuai
- ☐ Sesuai
- ☐ Tidak Sesuai
- ☐ Sangat Tidak Sesuai



5. Bagaimana pendapat anda mengenai perilaku petugas dalam melayani terkait kesopanan dan keramahannya? *

- ☐ Sangat Baik
- ☐ Baik
- ☐ Buruk
- ☐ Sangat Buruk

6. Bagaimana pendapat anda tentang Kualitas Sarana dan Prasarana yang disediakan? *

- ☐ Sangat Baik
- ☐ Baik
- ☐ Buruk
- ☐ Sangat Buruk

7. Bagaimana pendapat saudara tentang Kompetensi / Kemampuan Petugas dalam Pelayanan? *

- ☐ Sangat Kompeten
- ☐ Kompeten
- ☐ Kurang Kompeten
- ☐ Tidak Kompeten



8. Bagaimana pendapat saudara tentang penanganan Pengaduan Pengguna Layanan? *

- ☐ Sangat Kompeten
- ☐ Kompeten
- ☐ Kurang Kompeten
- ☐ Tidak Kompeten

9. Bagaimana pendapat anda tentang kewajaran biaya / tarif dalam pelayanan? *

- ☐ Gratis
- ☐ Murah
- ☐ Mahal
- ☐ Sangat Mahal

Saran dan Masukan *

Teks jawaban panjang



MATRIK PELAKSANAAN TINDAK LANJUT HASIL SKM TAHUN 2024

NO	PROIRITAS UNSUR YANG RENDAH	PROGRAM/KEGIATAN	TINDAK LANJUT PERBAIKAN YANG TELAH DILAKUKAN	WAKTU PELAKSANAAN	FOTO DOKUMENTASI
1	Unsur Kopetensi Pelayanan	BIMTEK Pelayanan Kepada Pegawai yang Bertugas sebagai <i>Person In Change (PIC)</i>	Pelayanan Publik yang Semakin Baik	4 Maret 2025	 The image is a composite of two parts. The top part is a banner for a technical guidance session titled 'BIMBINGAN TEKNIS' (Technical Guidance) for 'Pelayanan Prima' (Prime Service). It is organized by the Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Regional Border Management Body of the Riau Islands Province) on Tuesday, March 4, 2025, in Tanjungpinang. The bottom part is a photograph of a group of people, including several in military uniforms, seated around a large conference table during a meeting.



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Jl. Ahmad Yani No. 21 Tanjungpinang 29124, Telp. (0771) 4500155, Fax. (0771) 4500157
e-mail: bps2100@bps.go.id website: <http://kepri.bps.go.id>

Tanjungpinang, 3 Maret 2025

Nomor : B-97/21000/OT.130/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) set
Hal : Rekomendasi Kegiatan Statistik

Yth.

Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
di tempat

Sehubungan dengan pengajuan rekomendasi kegiatan statistik sektoral berikut:

judul : Survey Kepuasan Masyarakat Badan Pengelola Perbatasan Daerah
Provinsi Kepulauan Riau
Penyelenggara : Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau

dan setelah memeriksa rancangan yang diajukan, maka kegiatan statistik tersebut:

Dinyatakan : **LAYAK**
dengan catatan evaluasi rancangan kegiatan statistik terlampir.

Identitas : **V-25.2100.004**
Rekomendasi

Identitas rekomendasi dicantumkan pada kuesioner/lembar kerja.

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, diucapkan terima kasih.

Kepala BPS Provinsi Kepulauan Riau,



Margaretha Ari Anggorowati

Lampiran Surat

Nomor : B-97/21000/OT.130/2025

Tanggal : 3 Maret 2025

Rekomendasi Rancangan Kegiatan Statistik

Judul	: Survey Kepuasan Masyarakat Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau
Penyelenggara	: Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau
Resume	: https://romantik.web.bps.go.id/lihat-rekomendasi/V-25.2100.004
Rekomendasi	: 1. Telah dilakukan perbaikan pada bagian latar belakang serta periode waktu perencanaan dan pelaksanaan survei serta telah melengkapi berkas pendukung berupa Laporan Kegiatan SKM tahun 2024 dan KAK Kegiatan SKM tahun 2025. 2. Penyelenggaraan kegiatan statistik merujuk pada <i>Generic Statistical Business Process Model</i> (GSBPM) yang berlaku secara internasional. a. Penerapan GSBPM bertujuan agar data statistik yang dihasilkan berkualitas, tata kelola proses bisnis terdokumentasi, serta dapat menyediakan suatu kerangka penjaminan kualitas pada setiap tahap kegiatan. b. Tahapan GSBPM meliputi identifikasi kebutuhan, perancangan, pembangunan, pengumpulan, pengolahan, analisis, diseminasi, dan evaluasi. Tahapan kegiatan tersebut dapat diadaptasi dan disesuaikan dengan kegiatan statistik pada masing-masing instansi. 3. Sebagai salah satu bentuk implementasi prinsip Satu Data Indonesia (SDI), metadata statistik harus disusun. a. Metadata statistik memuat informasi mengenai pelaksanaan kegiatan statistik, variabel yang digunakan, dan indikator yang dihasilkan. b. Panduan penyusunan metadata statistik merujuk pada Peraturan BPS Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik. 4. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI No. 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik, setelah kegiatan statistik selesai dilaksanakan, hasil penyelenggaraan kegiatan statistik tersebut diserahkan ke BPS dalam bentuk softcopy publikasi dan metadata paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal penyajian.

No	Kabupaten/Kota	Usulan Renaksi
1	Batam	39
2	Bintan	25
3	Natuna	14
4	Karimun	45
5	Anambas	45
Total		168

Usulan yg terealisasi

76

Capaian Realisasi

45,24

2025	Kementerian Keuangan	Kepulauan Riau			PENGLOLAAN AKTIFITAS LINTAS BATAS NEGARA	BIDANG KERJASAMA LINTAS BATAS NEGARA	SUB BIDANG PEMBANGUNAN DAN PELAYANAN POS LINTAS BATAS NEGARA	PENGLOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN	Pengawasan dan penegakan hukum kepebeanan dan cukai di KPBC Tanjung Pinang	492.921.000	190 Laporan	APBN
2025	Kementerian Perlindungan Pek Kepulauan Riau				PENGLOLAAN AKTIFITAS LINTAS BATAS NEGARA	BIDANG KERJASAMA LINTAS BATAS NEGARA	SUB BIDANG STRATEGI PELAKSANAAN KERJASAMA SOSIAL EKONOMI LINTAS BATAS NEGARA	PENGLOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN	Pelaksanaan Orientasi Pra Pemberangkatan (OPP) PMI Non Pemerintah	148.200.000	1235 Orang	APBN
2025	Kementerian Perlindungan Pek Kepulauan Riau				PENGLOLAAN AKTIFITAS LINTAS BATAS NEGARA	BIDANG PERTUMBUHAN EKONOMI KAWASAN PERBATASAN	SUB BIDANG PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN POTENSI PKSN	PENGLOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN	Penanganan PMI Bermasalah, Sakiti, dan Meninggal	3.040.548.000	750 Orang	APBN
2025	Kementerian Pertanian	Kepulauan Riau	Natuna		PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA	BIDANG PEMERATAAN N KAWASAN PERBATASAN	SUB BIDANG PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN	PENGLOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN	Kawasan Ubi Jalar	8.640.000	3 Desa	APBN
2025	Kementerian Kesehatan	Kepulauan Riau	Bintan	Bintan Pesisir	PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA	BIDANG PEMERATAAN N KAWASAN PERBATASAN	SUB BIDANG PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN LOKASI PRIORITAS	PENGLOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN	Penguatan Puskesmas-IPAL, Puskesmas Kelong	630.000.000	1 Paket	DAK
2025	Kementerian Kesehatan	Kepulauan Riau	Kepulauan Anambas	Jemaja Barat	PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA	BIDANG PEMERATAAN N KAWASAN PERBATASAN	SUB BIDANG PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN LOKASI PRIORITAS	PENGLOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN	Penguatan Puskesmas-Ambulans/Pusling Roda 4/Pusling Perairan, Puskesmas Jemaja Barat	2.400.000.000	1 Paket	DAK
2025	Kementerian Kesehatan	Kepulauan Riau	Kepulauan Anambas	Jemaja	PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA	BIDANG PEMERATAAN N KAWASAN PERBATASAN	SUB BIDANG PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN LOKASI PRIORITAS	PENGLOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN	Penguatan Puskesmas Pembantu-Pembangunan baru, Pustu Batu Berapit	715.670.728	1 Paket	DAK
2025	Kementerian Pekerjaan Umum Kepulauan Riau		Kota Batam	Belakang Padang	PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA	BIDANG PEMERATAAN N KAWASAN PERBATASAN	SUB BIDANG PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN LOKASI PRIORITAS	PENGLOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN	Pembangunan Tangkli Septik Skala Individual Perdesaan minimal 25 KK, Desa Pulau Terong	622.500.000	25 Unit	DAK
2025	Kementerian Pekerjaan Umum Kepulauan Riau		Bintan	Teluk Seborg	PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA	BIDANG PEMERATAAN N KAWASAN PERBATASAN	SUB BIDANG PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN LOKASI PRIORITAS	PENGLOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN	Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah, Desa Seborg Lagoi	2.583.867.875	200 SR	DAK
2025	Kementerian Pertanian	Kepulauan Riau	Bintan		PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA	BIDANG PEMERATAAN N KAWASAN PERBATASAN	SUB BIDANG PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN LOKASI PRIORITAS	PENGLOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN	Kawasan Ubi Jalar	8.640.000	3 Desa	APBN
2025	Kementerian Pertanian	Kepulauan Riau	Bintan		PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA	BIDANG PEMERATAAN N KAWASAN PERBATASAN	SUB BIDANG PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN LOKASI PRIORITAS	PENGLOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN	Perluasan Tanaman Kopi Robusta	800.000.000	50 Ha	APBN
2025	Kementerian Pertanian	Kepulauan Riau	Bintan		PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA	BIDANG PEMERATAAN N KAWASAN PERBATASAN	SUB BIDANG PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN LOKASI PRIORITAS	PENGLOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN	Pemeliharaan Kebun Induk Tanaman Kelapa Tahun 6	73.500.000	5 Ha	APBN
2025	Kementerian Pertanian	Kepulauan Riau	Karimun		PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA	BIDANG PEMERATAAN N KAWASAN PERBATASAN	SUB BIDANG PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN LOKASI PRIORITAS	PENGLOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN	Kawasan Ubi Jalar	8.640.000	3 Desa	APBN
2025	Kementerian Pertanian	Kepulauan Riau	Karimun		PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA	BIDANG PEMERATAAN N KAWASAN PERBATASAN	SUB BIDANG PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN LOKASI PRIORITAS	PENGLOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN	Pemeliharaan Kebun Induk Tanaman Cengkeh Tahun 7	9.234.000	1 Ha	APBN
2025	Kementerian Pertanian	Kepulauan Riau	Kepulauan Anambas		PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA	BIDANG PEMERATAAN N KAWASAN PERBATASAN	SUB BIDANG PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN LOKASI PRIORITAS	PENGLOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN	Kawasan Ubi Jalar	8.640.000	3 Desa	APBN
2025	Kementerian Pertanian	Kepulauan Riau	Kepulauan Anambas		PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA	BIDANG PEMERATAAN N KAWASAN PERBATASAN	SUB BIDANG PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN LOKASI PRIORITAS	PENGLOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN	Pemeliharaan Kebun Induk Tanaman Pala Tahun 7	10.786.000	1 Ha	APBN
2025	Kementerian Usaha, Kecil, dan Kepulauan Riau				PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA	BIDANG PEMERATAAN N KAWASAN PERBATASAN	SUB BIDANG PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN LOKASI PRIORITAS	PENGLOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN	Pelatihan UMKIM	10.356.245.000	2776 UMKIM	DAK Non Fisik
2025	Kementerian Usaha, Kecil, dan Kepulauan Riau				PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA	BIDANG PEMERATAAN N KAWASAN PERBATASAN	SUB BIDANG PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN LOKASI PRIORITAS	PENGLOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN	Fasilitasi Pendamping Kapasitas Usaha	1.698.480.000	Pendampi 34 ng	DAK Non Fisik
2025	Kementerian Usaha, Kecil, dan Kepulauan Riau				PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA	BIDANG PEMERATAAN N KAWASAN PERBATASAN	SUB BIDANG PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN LOKASI PRIORITAS	PENGLOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN	Fasilitasi Inkubasi Usaha	1.000.000.000	50 Inkubasi	DAK Non Fisik
2025	Kementerian Usaha, Kecil, dan Kepulauan Riau				PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA	BIDANG PEMERATAAN N KAWASAN PERBATASAN	SUB BIDANG PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN LOKASI PRIORITAS	PENGLOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN	Tenaga Pendamping Data	325.200.000	Pendampi 8 ng	DAK Non Fisik
2025	Kementerian Usaha, Kecil, dan Kepulauan Riau		Bintan		PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA	BIDANG PEMERATAAN N KAWASAN PERBATASAN	SUB BIDANG PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN LOKASI PRIORITAS	PENGLOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN	Pelatihan UMKIM	2.803.100.000	678 UMKIM	DAK Non Fisik
2025	Kementerian Usaha, Kecil, dan Kepulauan Riau		Bintan		PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA	BIDANG PEMERATAAN N KAWASAN PERBATASAN	SUB BIDANG PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN LOKASI PRIORITAS	PENGLOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN	Fasilitasi Pendamping Kapasitas Usaha	170.400.000	Pendampi 4 ng	DAK Non Fisik
2025	Kementerian Usaha, Kecil, dan Kepulauan Riau		Bintan		PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA	BIDANG PEMERATAAN N KAWASAN PERBATASAN	SUB BIDANG PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN LOKASI PRIORITAS	PENGLOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN	Fasilitasi Inkubasi Usaha	500.000.000	25 Inkubasi	DAK Non Fisik
2025	Kementerian Usaha, Kecil, dan Kepulauan Riau		Kota Batam		PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA	BIDANG PERTUMBUHAN EKONOMI KAWASAN PERBATASAN	SUB BIDANG PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN POTENSI PKSN	PENGLOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN	Pelatihan UMKIM	693.960.000	204 UMKIM	DAK Non Fisik
2025	Kementerian Usaha, Kecil, dan Kepulauan Riau		Kota Batam		PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA	BIDANG PERTUMBUHAN EKONOMI KAWASAN PERBATASAN	SUB BIDANG PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN POTENSI PKSN	PENGLOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN	Fasilitasi Pendamping Kapasitas Usaha	95.040.000	Pendampi 2 ng	DAK Non Fisik
2025	Kementerian Perindustrian	Kepulauan Riau			PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA	BIDANG PERTUMBUHAN EKONOMI KAWASAN PERBATASAN	SUB BIDANG PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN POTENSI PKSN	PENGLOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN	Fasilitasi Bimbingan Teknis dan Pendampingan Kewirausahaan Industri Kecil dan Menengah Pengembangan Produk Melalui Diversifikasi/Penda ftaran HKI/Merk/Desain Kemasan/Fasilitasi dalam rangka OVP	561.822.000	108 Industri	APBN
2025	Kementerian Perindustrian	Kepulauan Riau			PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA	BIDANG PERTUMBUHAN EKONOMI KAWASAN PERBATASAN	SUB BIDANG PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN POTENSI PKSN	PENGLOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN		584.753.000	94 Industri	APBN

2025	Kementerian Pariwisata	Kepulauan Riau	Kota Batam	PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA	BIDANG PEMERATAAN PEMBANGUNAN N KAWASAN PERBATASAN BIDANG	SUB BIDANG PENGELOLAAN LOKASI PRIORITAS	PENGLOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN	Kenduri Seni Melayu	150.000.000	1 Kegiatan	APBN
2025	Kementerian Dalam Negeri	Kepulauan Riau	Natuna	PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA	BIDANG PEMERATAAN PEMBANGUNAN N KAWASAN PERBATASAN BIDANG	SUB BIDANG PENGELOLAAN LOKASI PRIORITAS	PENGLOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN	Fasilitasi Penerapan Gerakan Indonesia Sadar Adminduk (GISA)	45.000.000	1 Lokasi	APBN
2025	Kementerian Sosial	Kepulauan Riau	Bintan	PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA	BIDANG PEMERATAAN PEMBANGUNAN N KAWASAN PERBATASAN BIDANG	SUB BIDANG PENGELOLAAN LOKASI PRIORITAS	PENGLOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN	Program Keluarga Harapan (PKH)	7.013.369.992	3557 KPM	APBN
2025	Kementerian Sosial	Kepulauan Riau	Karimun	PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA	BIDANG PEMERATAAN PEMBANGUNAN N KAWASAN PERBATASAN BIDANG	SUB BIDANG PENGELOLAAN LOKASI PRIORITAS	PENGLOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN	Program Keluarga Harapan (PKH)	12.361.061.448	6171 KPM	APBN
2025	Kementerian Sosial	Kepulauan Riau	Natuna	PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA	BIDANG PEMERATAAN PEMBANGUNAN N KAWASAN PERBATASAN BIDANG	SUB BIDANG PENGELOLAAN LOKASI PRIORITAS	PENGLOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN	Program Keluarga Harapan (PKH)	6.174.600.000	2189 KPM	APBN
2025	Kementerian Sosial	Kepulauan Riau	Kepulauan Anambas	PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA	BIDANG PEMERATAAN PEMBANGUNAN N KAWASAN PERBATASAN BIDANG	SUB BIDANG PENGELOLAAN LOKASI PRIORITAS	PENGLOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN	Program Keluarga Harapan (PKH)	1.905.767.880	940 KPM	APBN
2025	Kementerian Sosial	Kepulauan Riau	Kota Batam	PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA	BIDANG PEMERATAAN PEMBANGUNAN N KAWASAN PERBATASAN BIDANG	SUB BIDANG PENGELOLAAN LOKASI PRIORITAS	PENGLOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN	Program Keluarga Harapan (PKH)	35.155.900.612	18357 KPM	APBN
2025	Kementerian Pendidikan Dasar	Kepulauan Riau	Karimun	Tebing	PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA	BIDANG PEMERATAAN PEMBANGUNAN N KAWASAN PERBATASAN BIDANG	SUB BIDANG PENGELOLAAN LOKASI PRIORITAS	Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE), Perlengkapan dan bahan pembelajaran, TK Mekar Sari	47.565.000	1 Paket	DAK
2025	Kementerian Pendidikan Dasar	Kepulauan Riau	Karimun	Tebing	PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA	BIDANG PEMERATAAN PEMBANGUNAN N KAWASAN PERBATASAN BIDANG	SUB BIDANG PENGELOLAAN LOKASI PRIORITAS	Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE), Perlengkapan dan bahan pembelajaran, TK AS SALAM	47.565.000	1 Paket	DAK
2025	Kementerian Pendidikan Dasar	Kepulauan Riau	Karimun	Karimun	PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA	BIDANG PEMERATAAN PEMBANGUNAN N KAWASAN PERBATASAN BIDANG	SUB BIDANG PENGELOLAAN LOKASI PRIORITAS	Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE), Perlengkapan dan bahan pembelajaran, TK SD Satu Atap Parit	47.565.000	1 Paket	DAK
2025	Kementerian Pendidikan Dasar	Kepulauan Riau	Karimun	Karimun	PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA	BIDANG PEMERATAAN PEMBANGUNAN N KAWASAN PERBATASAN BIDANG	SUB BIDANG PENGELOLAAN LOKASI PRIORITAS	Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE), Perlengkapan dan bahan pembelajaran, TK Vidya Sasana	47.565.000	1 Paket	DAK
2025	Kementerian Pendidikan Dasar	Kepulauan Riau	Kota Batam	Belakang Padang	PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA	BIDANG PEMERATAAN PEMBANGUNAN N KAWASAN PERBATASAN BIDANG	SUB BIDANG PENGELOLAAN LOKASI PRIORITAS	Pengadaan peralatan laboratorium ilmu pengetahuan alam (IPA), SMP NEGERI 2 BATAM	54.150.000	1 Paket	DAK
2025	Kementerian Pendidikan Dasar	Kepulauan Riau	Bintan	Bintan Utara	PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA	BIDANG PEMERATAAN PEMBANGUNAN N KAWASAN PERBATASAN BIDANG	SUB BIDANG PENGELOLAAN LOKASI PRIORITAS	Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE), Perlengkapan dan bahan pembelajaran, TK PUJI	51.188.000	1 Paket	DAK
2025	Kementerian Pendidikan Dasar	Kepulauan Riau	Bintan	Teluk Sebang	PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA	BIDANG PEMERATAAN PEMBANGUNAN N KAWASAN PERBATASAN BIDANG	SUB BIDANG PENGELOLAAN LOKASI PRIORITAS	Pengadaan peralatan laboratorium ilmu pengetahuan alam (IPA), SMP NEGERI 8 BINTAN	55.911.366	1 Paket	DAK
2025	Kementerian Pendidikan Dasar	Kepulauan Riau	Bintan	Gunung Kijang	PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA	BIDANG PEMERATAAN PEMBANGUNAN N KAWASAN PERBATASAN BIDANG	SUB BIDANG PENGELOLAAN LOKASI PRIORITAS	Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE), Perlengkapan dan bahan pembelajaran, TK PEDESAAN GUNUNG KIJANG	51.188.000	1 Paket	DAK
2025	Kementerian Pendidikan Dasar	Kepulauan Riau	Bintan	Bintan Pesisir	PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA	BIDANG PEMERATAAN PEMBANGUNAN N KAWASAN PERBATASAN BIDANG	SUB BIDANG PENGELOLAAN LOKASI PRIORITAS	Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE), Perlengkapan dan bahan pembelajaran, TK NUMBING JAYA	51.188.000	1 Paket	DAK
2025	Kementerian Pendidikan Dasar	Kepulauan Riau	Kepulauan Anambas	Siantan Selatan	PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA	BIDANG PEMERATAAN PEMBANGUNAN N KAWASAN PERBATASAN BIDANG	SUB BIDANG PENGELOLAAN LOKASI PRIORITAS	Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE), Perlengkapan dan bahan pembelajaran, TK NEGERI 1 SIANTAN SELATAN	48.000.000	1 Paket	DAK
2025	Kementerian Pendidikan Dasar	Kepulauan Riau	Kepulauan Anambas	Siantan Selatan	PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA	BIDANG PEMERATAAN PEMBANGUNAN N KAWASAN PERBATASAN BIDANG	SUB BIDANG PENGELOLAAN LOKASI PRIORITAS	Pengadaan peralatan laboratorium ilmu pengetahuan alam (IPA), SMPN 4 GENTING	57.000.000	1 Paket	DAK
2025	Kementerian Pendidikan Dasar	Kepulauan Riau	Kepulauan Anambas	Siantan Selatan	PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA	BIDANG PEMERATAAN PEMBANGUNAN N KAWASAN PERBATASAN BIDANG	SUB BIDANG PENGELOLAAN LOKASI PRIORITAS	Pengadaan peralatan laboratorium ilmu pengetahuan alam (IPA), SMPN 6 LINGAI	57.000.000	1 Paket	DAK
2025	Kementerian Pendidikan Dasar	Kepulauan Riau	Kepulauan Anambas	Siantan Utara	PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA	BIDANG PEMERATAAN PEMBANGUNAN N KAWASAN PERBATASAN BIDANG	SUB BIDANG PENGELOLAAN LOKASI PRIORITAS	Pengadaan peralatan laboratorium ilmu pengetahuan alam (IPA), SMPN 2 BATAT	57.000.000	1 Paket	DAK
2025	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Kepulauan Riau	Natuna	Ranai	PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA	BIDANG PEMERATAAN PEMBANGUNAN N KAWASAN PERBATASAN BIDANG	SUB BIDANG PENGELOLAAN LOKASI PRIORITAS	Lanjutan pembangunan SKPT Natuna di Kec. Pulau Tiga, yaitu pembangunan pasar ikan	-	1 Paket	DANA HIBAH
2025	Kementerian Kehutanan	Kepulauan Riau	Natuna		PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA	BIDANG PEMERATAAN PEMBANGUNAN N KAWASAN PERBATASAN BIDANG	SUB BIDANG PENGELOLAAN LOKASI PRIORITAS	Sebaran Pendamping PS	66.035.718	3 Orang	APBN
2025	Kementerian Kehutanan	Kepulauan Riau	Kota Batam		PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA	BIDANG PEMERATAAN PEMBANGUNAN N KAWASAN PERBATASAN BIDANG	SUB BIDANG PENGELOLAAN LOKASI PRIORITAS	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat	53.000.000	3 Orang	APBN
2025	Kementerian Kehutanan	Kepulauan Riau	Kota Batam		PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA	BIDANG PEMERATAAN PEMBANGUNAN N KAWASAN PERBATASAN BIDANG	SUB BIDANG PENGELOLAAN LOKASI PRIORITAS	Peningkatan Perlindungan dan Pengamanan di Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB)	981.000.000	8000 at	APBN
2025	Kementerian Kehutanan	Kepulauan Riau	Kota Batam		PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA	BIDANG PEMERATAAN PEMBANGUNAN N KAWASAN PERBATASAN BIDANG	SUB BIDANG PENGELOLAAN LOKASI PRIORITAS	Pengendalian kebakaran di Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB)	200.000.000	80.2 Ha	APBN
2025	Kementerian Perhubungan	Kepulauan Riau	Kepulauan Anambas	Siantan	PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA	BIDANG PEMERATAAN PEMBANGUNAN N KAWASAN PERBATASAN BIDANG	SUB BIDANG PENGELOLAAN LOKASI PRIORITAS	Rehabilitasi Fasilitas Pelabuhan Midei UPP Tarempa	20.929.985.000	1 Paket	SBSN
2025	Kementerian Perhubungan	Kepulauan Riau	Karimun	Tebing	PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA	BIDANG PEMERATAAN PEMBANGUNAN N KAWASAN PERBATASAN BIDANG	SUB BIDANG PENGELOLAAN LOKASI PRIORITAS	Pelapisan Runway Bandar Udara Raja Haji Abdulh (SBSN)	3.500.000.000	1 Paket	SBSN
2025	Kementerian Pekerjaan Umum	Kepulauan Riau			PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA	BIDANG PEMERATAAN PEMBANGUNAN N KAWASAN PERBATASAN BIDANG	SUB BIDANG PENGELOLAAN LOKASI PRIORITAS	Pembangunan Jalan Nasional Simpang Rintis 4E* Konjo (P. Siantan)	-	5 Km	APBN
2025	Kementerian Energi dan Sumb	Kepulauan Riau	Kota Batam	Belakang Padang	PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA	BIDANG PEMERATAAN PEMBANGUNAN N KAWASAN PERBATASAN BIDANG	SUB BIDANG PENGELOLAAN LOKASI PRIORITAS	Pengembangan Sumber Daya Tenaga Listrik	52.157.774.517	1 Paket	APLN
2025	Kementerian Energi dan Sumb	Kepulauan Riau	Bintan	Bintan Pesisir	PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA	BIDANG PEMERATAAN PEMBANGUNAN N KAWASAN PERBATASAN BIDANG	SUB BIDANG PENGELOLAAN LOKASI PRIORITAS	Pengembangan Sumber Daya Tenaga Listrik	8.912.847.332	1 Paket	APLN

2025	Kementerian Energi dan Sumbh Kepulauan Riau	Kepulauan Anambas	Jemaja	PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA	BIDANG PEMERATAAN PEMBANGUNA N KAWASAN PERBATASAN BIDANG	SUB BIDANG PENGELOLAAN LOKASI PRIORITAS	PENGLOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN	Pengembangan Sumber Daya Tenaga Kelistrikan	452.240.145	1 Paket	APLN
2025	Kementerian Sosial	Kepulauan Riau	Bintan	PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA	PEMERATAAN PEMBANGUNA N KAWASAN PERBATASAN BIDANG	SUB BIDANG PENGELOLAAN LOKASI PRIORITAS	BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN	Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	5.155.200.000	2148 KPM	APBN
2025	Kementerian Sosial	Kepulauan Riau	Karimun	PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA	PEMERATAAN PEMBANGUNA N KAWASAN PERBATASAN BIDANG	SUB BIDANG PENGELOLAAN LOKASI PRIORITAS	BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN	Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	12.288.000.000	5120 KPM	APBN
2025	Kementerian Sosial	Kepulauan Riau	Natuna	PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA	PEMERATAAN PEMBANGUNA N KAWASAN PERBATASAN BIDANG	SUB BIDANG PENGELOLAAN LOKASI PRIORITAS	BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN	Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	6.549.600.000	2729 KPM	APBN
2025	Kementerian Sosial	Kepulauan Riau	Kepulauan Anambas	PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA	PEMERATAAN PEMBANGUNA N KAWASAN PERBATASAN BIDANG	SUB BIDANG PENGELOLAAN LOKASI PRIORITAS	BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN	Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	2.654.400.000	1106 KPM	APBN
2025	Kementerian Sosial	Kepulauan Riau	Kota Batam	PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA	PEMERATAAN PEMBANGUNA N KAWASAN PERBATASAN BIDANG	SUB BIDANG PENGELOLAAN LOKASI PRIORITAS	BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN	Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	41.428.800.000	17262 KPM	APBN
2025	Kementerian Pendidikan Dasar Kepulauan Riau	Kepulauan Anambas	Kute Siantan	PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA	PEMERATAAN PEMBANGUNA N KAWASAN PERBATASAN BIDANG	SUB BIDANG PENGELOLAAN LOKASI PRIORITAS	BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN	Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE), Perlengkapan dan bahan pembelajaran, TK NEGERI 1 KUTE SIANTAN	48.000.000	1 Paket	DAK
2025	Kementerian Pendidikan Dasar Kepulauan Riau	Kepulauan Anambas	Kute Siantan	PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA	PEMERATAAN PEMBANGUNA N KAWASAN PERBATASAN BIDANG	SUB BIDANG PENGELOLAAN LOKASI PRIORITAS	BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN	Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE), Perlengkapan dan bahan pembelajaran, TK NEGERI 2 KUTE SIANTAN	48.000.000	1 Paket	DAK
2025	Kementerian Pendidikan Dasar Kepulauan Riau	Kepulauan Anambas	Kute Siantan	PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA	PEMERATAAN PEMBANGUNA N KAWASAN PERBATASAN BIDANG	SUB BIDANG PENGELOLAAN LOKASI PRIORITAS	BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN	Pengadaan peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK), SDN 003 BATU AMPAR	103.964.000	1 Paket	DAK
2025	TNI AL	Kepulauan Riau		PENGLOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA	PENINGKATAN PERTAHANAN WILAYAH NEGARA	SUB BIDANG PERTAHANAN WILAYAH LAUT	BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN	Pembangunan Flat Type 45 (1 Tower) Lantamal IV batam dan Sarpras	21.294.000.000	1 Kegiatan	APBN
2025	TNI AL	Kepulauan Riau		PENGLOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA	PENINGKATAN PERTAHANAN WILAYAH NEGARA	SUB BIDANG PERTAHANAN WILAYAH LAUT	BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN	Pembangunan Mako lanal Bintan dan Sarpras Tahun jamak Tahun II (Tahun 2024 dan 2025)	13.016.203.000	1 Kegiatan	APBN
2025	TNI AL	Kepulauan Riau		PENGLOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA	PENINGKATAN PERTAHANAN WILAYAH NEGARA	SUB BIDANG PERTAHANAN WILAYAH LAUT	BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN	Pengadaan Alkomlek Posal Nipa	805.100.000	1 Kegiatan	APBN
2025	Badan Nasional Pengeloa Pert Kepulauan Riau			PENGLOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA	BIDANG PENINGKATAN PERTAHANAN WILAYAH NEGARA	SUB BIDANG PERTAHANAN WILAYAH LAUT	PENGLOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN	Fasilitasi Pemberdayaan dan Pembinaan Aparatur Pemerintah daerah dan Masyarakat Persisir di perbatasan laut dalam gerakan peduli keamanan keselamatan dan penegakan hukum batas wilayah laut sebagai bagian sistem hankam	331.661.000	1 Paket	APBN
2025	Kementerian Pekerjaan Umum Kepulauan Riau			PENGLOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA	BIDANG PENINGKATAN PERTAHANAN WILAYAH NEGARA	SUB BIDANG PERTAHANAN WILAYAH LAUT	PENGLOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN	pembangunan Pengaman Pantadi Di P. Rupat, Pulau Rangsang, P. Bengkalis	15.000.000.000	0.3 Km	APBN
2025	Kementerian Pekerjaan Umum Kepulauan Riau	Natuna		PENGLOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA	BIDANG PENINGKATAN PERTAHANAN WILAYAH NEGARA	SUB BIDANG PERTAHANAN WILAYAH LAUT	PENGLOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN	Pembangunan Pengamanan Pantai Pulau Kepala di Kabupaten Natuna(pulau Terluar) Tahap 1	107.000.000.000	0.3 Km	APBN
2025	Kementerian Pertanian Kepulauan Riau	Kepulauan Anambas		PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA	PEMERATAAN PEMBANGUNA N KAWASAN PERBATASAN BIDANG	SUB BIDANG PENGELOLAAN LOKASI PRIORITAS	BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN	Pekarangan Hortikultura	37.902.048	3 Kelompok	APBN
2025	Kementerian Pertanian Kepulauan Riau	Karimun		PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA	PEMERATAAN PEMBANGUNA N KAWASAN PERBATASAN BIDANG	SUB BIDANG PENGELOLAAN LOKASI PRIORITAS	BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN	Pekarangan Hortikultura	37.902.048	3 Kelompok	APBN
2025	Kementerian Pertanian Kepulauan Riau	Bintan		PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA	PEMERATAAN PEMBANGUNA N KAWASAN PERBATASAN BIDANG	SUB BIDANG PENGELOLAAN LOKASI PRIORITAS	BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN	Pekarangan Hortikultura	37.902.048	3 Kelompok	APBN
2025	Kementerian Pertanian Kepulauan Riau	Natuna		PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA	PERTURBUHAN EKONOMI PERBATASAN	SUB BIDANG PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN POTENSI PKSN	BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN	Pekarangan Hortikultura	37.902.048	3 Kelompok	APBN

**DAFTAR PRIORITAS USULAN MUSRENBANG KECAMATAN
KEGIATAN PSPK-PM
KECAMATAN BELAKANG PADANG
TAHUN 2025**

No. Prioritas	Permasalahan/Usulan	Alamat	Volume	Dimensi	Koordinat		SKPD Tujuan	Keterangan
					Latitude	Longitude		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
KELURAHAN TANJUNG SARI								
1	PEMBANGUNAN JERAMBAH BETON	KP. BARU RT. 003 RW. 005	41.3 M	P = 41.3 M L = 1.4 M	1,153465	103,888219	KECAMATAN BELAKANG PADANG	PSPK
2	PEMBANGUNAN JERAMBAH BETON	KAMPUNG TANJUNG RT.004 RW.003	75.5 M	P = 75.5 M L = 1.8 M	1,156715	103,889195	KECAMATAN BELAKANG PADANG	PSPK
3	PEMBANGUNAN JERAMBAH BETON	KAMPUNG BARU RT.003 RW.005	102.7 M	P = 102.7 M L = 1.5 M	1,150295	103,884765	KECAMATAN BELAKANG PADANG	PSPK
4	PEMBANGUNAN JERAMBAH BETON	DAPUR ARANG RT.005 RW.004	69,3 M	P = 69.3 M L = 1.5 M	1,156266	103,886502	KECAMATAN BELAKANG PADANG	PSPK
5	PEMBANGUNAN JERAMBAH BETON	KAMPUNG BARU RT.003 RW.005	90,6 M	P = 90.6 M L = 1.5 M	1,152055	103,889178	KECAMATAN BELAKANG PADANG	PSPK
6	PEMBANGUNAN JERAMBAH BETON	DAPUR ARANG RT.004 RW.004	62 M	P = 62 M L = 1.5 M	1,156168	103,885219	KECAMATAN BELAKANG PADANG	PSPK
7	PEMBANGUNAN JERAMBAH BETON	PELANTAR V RT.002 RW. 003	41,4 M	P = 41.4 M X L = 2 M	1,157312	103,890496	KECAMATAN BELAKANG PADANG	PSPK
8	PEMBANGUNAN JERAMBAH BETON	RAWASARI RT.001 RW.005	68.6 M	P = 68.6 M L = 1.5 M	1,15369	103,893028	KECAMATAN BELAKANG PADANG	PSPK
9	PEMBANGUNAN JERAMBAH BETON	KAMPUNG BARU RT.002 RW.005	27 M	P = 27 M T = 1.5 M	1,15365	103,887333	KECAMATAN BELAKANG PADANG	PSPK
10	PEMBANGUNAN JERAMBAH BETON	KEBUN TEMPANG RT.003 RW.004	79.7 M	P = 79.7 M L = 1.5 M	1,156712	103,886195	KECAMATAN BELAKANG PADANG	PSPK
11	PEMBANGUNAN BATU MIRING	KAMPUNG BARU RT.003 RW.005	95 M	P = 95 M T = 2 M	1,152666	103,887882	KECAMATAN BELAKANG PADANG	PSPK
12	PEMBANGUNAN JERAMBAH BETON	PASAR RT. 001 RW. 003	56 M	P = 56 M L = 1.5 M	1,15635	103,891507	KECAMATAN BELAKANG PADANG	PSPK
13	PEMBANGUNAN JALAN / SEMENISASI	KAMPUNG TANJUNG RT. 002 RW.004	173.25 M	P = 173,25 M L = 2 M	1,157197	103,887956	KECAMATAN BELAKANG PADANG	PSPK
14	PEMBANGUNAN DRAINASE PASANG BATU	KAMPUNG TANJUNG RT.002 RW.004	343 M	P = 343 M	1.156.747	103. 888457	KECAMATAN BELAKANG PADANG	PSPK

		Paraf						
		Camat	Lurah	Bapelitbangda	Tokoh Masyarakat	RT/ RW	LPM	Ormas
15	PEMBANGUNAN JALAN / SEMENISASI	KAMPUNG TANJUNG RT. 003 RW.003	41 M	P = 41 M L = 2 M	1,156905	103,888303	KECAMATAN BELAKANG PADANG	PSPK
16	PEMBANGUNAN JERAMBAH BETON	RAWASARI RT.001 / RW.005	84.6 M	P = 84.6 M L = 1.5 M	1.152.472	103,89161	KECAMATAN BELAKANG PADANG	PSPK
17	PEMBANGUNAN DRAINASE PASANG BATU	KAMPUNG TENGAH RT.001, 003 RW.001	333 M	P = 333 M	1,153706	103,89167	KECAMATAN BELAKANG PADANG	PSPK
18	PEMBANGUNAN JERAMBAH BETON	DAPUR ARANG RT.004 / RW.004	56.33 M	P = 56.33 M L = 1.5 M	1,154675	103,885363	KECAMATAN BELAKANG PADANG	PSPK
19	PEMBANGUNAN JERAMBAH BETON	KAMPUNG BARU RT.003 RW.005	28 M	P = 28 M L = 1.5 M	1,15351	103,889693	KECAMATAN BELAKANG PADANG	PSPK

		Paraf						
		Camat	Lurah	Bapelitbangda	Tokoh Masyarakat	RT/ RW	LPM	Ormas
KELURAHAN SEKANAK RAYA								
1	Pembangunan Jerambah Beton	Pulau Lengkang RT.002/RW.005	93 m	P= 93 m L= 1.2 m	1,118017	103,872716	Kecamatan Belakang Padang	PSPK
2	Pembangunan Jerambah Beton	Pulau Lengkang RT.003/RW.005	126 m	P= 126 m L= 1.2 m	1,118105	103,871516	Kecamatan Belakang Padang	PSPK
3	Pembangunan Jerambah Beton	Pulau Sarang RT.001/RW.006	120 m	P= 120 m L= 1.2 m	1,113164	103,84691	Kecamatan Belakang Padang	PSPK
4	Pembangunan Jerambah Beton	Pulau Sarang RT.002/RW.006	138 m	P= 115 m L= 1.2 m	1,111793	103,846475	Kecamatan Belakang Padang	PSPK

		Paraf						
		Camat	Lurah	Bapelitbangda	Tokoh Masyarakat	RT/ RW	LPM	Ormas
KELURAHAN PULAU TERONG								
1	Pembangunan Jerambah beton	RT.010 RW.004, Pekasih	P= 80 m	P= 80 m L= 1,3 m	0.935696°	103.775082°	Kecamatan Belakang Padang	PSPK
2	Pembangunan Jerambah beton	RT.001 RW.001 Pulau Terong	P= 160 m	P= 160 m L= 1,3 m	0.945897°	103.764447°	Kecamatan Belakang Padang	PSPK
3	Pembangunan Jerambah beton	RT.001 RW.001 Pulau Terong	P= 80 m	P= 80 m L= 1,3 m	0.946036°	103.764447°	Kecamatan Belakang Padang	PSPK
4	Pembangunan Jerambah Beton	RT.07/RW.03 Pulau Terong	P= 80 m	P= 80 m L= 1,3 m	0.94759°	103.77472°	Kecamatan Belakang Padang	PSPK

		Paraf						
		Camat	Lurah	Bapelitbangda	Tokoh Masyarakat	RT/ RW	LPM	Ormas
KELURAHAN PEMPING								
1	Pembangunan Jerambah Beton	Labun RT 001 RW 001 Kelurahan Pemping	120 m'	P = 120 m L= 1,3 m	1,097875	103,780369	Kecamatan Belakang Padang	PSPK
2	Pembangunan Jerambah Beton	Labun RT 001 RW 001 Kelurahan Pemping	100 m'	P = 100 m L= 1,3 m	1,095924	103,780442	Kecamatan Belakang Padang	PSPK
3	Pembangunan Jerambah Beton	Tanjung Pana RT 002 RW 001 Kelurahan Pemping	100 m'	P= 100 m L= 2 m	1,108718	103,794135	Kecamatan Belakang Padang	PSPK
4	Pembangunan Jerambah Beton	Tanjung Pana RT 002 RW 001 Kelurahan Pemping	118 m'	P= 118 m L= 2 m	1,109222	103,794283	Kecamatan Belakang Padang	PSPK

Paraf								
Camat		Lurah	Bapelitbangda	Tokoh Masyarakat	RT/ RW	LPM	Ormas	

KELURAHAN PECONG								
1	Pembangunan Jalan Beton	Pecong, RT.001/ RW. 001,Kel.Pecong,Kec.Bel.Padang,Kota Batam	P=23 m (Meter Lari)	P= 23 m L= 2 m	0,996986°	103,824326°	Kecamatan Belakang Padang	PSPK
2	Pembangunan Jalan Beton	Pecong, RT.001/ RW. 001,Kel.Pecong,Kec.Bel.Padang,Kota Batam	P=84 m (Meter Lari)	P= 84 m L= 2 m	0,999943°	103,824359°	Kecamatan Belakang Padang	PSPK
3	Pembangunan Jerambah Beton (PSPK)	Pecong, RT.001/ RW. 001,Kel.Pecong,Kec.Bel.Padang,Kota Batam	P=16 m (Meter Lari)	P= 16 m L= 1,30 m	0,996986°	103,824326°	Kecamatan Belakang Padang	PSPK
4	Pembangunan Jerambah Beton (PSPK)	Pecong, RT.001/ RW. 001,Kel.Pecong,Kec.Bel.Padang,Kota Batam	P=20 m (Meter Lari)	P= 20 m L= 1,30 m	0,997209°	103,823895°	Kecamatan Belakang Padang	PSPK

Paraf								
Camat		Lurah	Bapelitbangda	Tokoh Masyarakat	RT/ RW	LPM	Ormas	

KELURAHAN KASU								
1	Pembangunan Jerambah Beton	Tg.Permai RT 13 RW 04	P = 80 m1	P = 80 m L = 1,3 m	1,068453	103,825681	Kecamatan Belakang padang	PSPK
2	Pembangunan Jerambah Beton	Kasu Barat Rt 15 Rw 04	P = 80 m1	P = 80 m L = 1,3 m	1,073491	103,819326	Kecamatan Belakang padang	PSPK
3	Pembangunan Jerambah Beton	Kasu RT 09 RW 03	P = 40 m1	P = 40 m L = 1,3 m	1,06931	103,826524	Kecamatan Belakang padang	PSPK
4	Pembangunan Jerambah Beton	Kampung Baru Rt 01 RW 01	P = 80 m1	P = 80 m L = 1,5 m	1,067721	103,823662	Kecamatan Belakang padang	PSPK

Paraf						
Camat	Lurah	Bapelitbangda	Tokoh Masyarakat	RT/ RW	LPM	Ormas

RANCANGAN RENCANA AKSI KABUPATEN BINTAN TAHUN 2025

Lokasi/Program/Kegiatan			Indikator		Vol/Satuan		Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana (KL/Pemda)	Ket
1			2		3		4	5	6	7
PROVINSI KEPULAUAN RIAU										
KABUPATEN BINTAN			TOTAL KESELURUHAN USULAN				226.285.309.257,00			
DINAS PENDIDIKAN			JUMLAH				6.048.096.330,00			
Kecamatan Teluk Sebong							3.909.262.460,00			
	1	Program Pengelolaan Pendidikan								
	1	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat							
		SDN 002 TELUK SEBONG			2	Ruang	348.000.000	DAK/APBN	Dinas Pendidikan	
		SDN 008 TELUK SEBONG			4	Ruang	696.000.000	DAK/APBN	Dinas Pendidikan	
		SMPN 8 BINTAN			2	Ruang	286.588.040	DAK/APBN	DINAS PENDIDIKAN	
	2	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat							
		SDN 003 GUNUNG KIJANG			1	Ruang	174.000.000	DAK/APBN	Dinas Pendidikan	
		SMPN 8 BINTAN			1	Ruang	271.525.080	DAK/APBN	DINAS PENDIDIKAN	
	3	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat							
		SMPN 8 BINTAN (REHAB JAMBAN)			4	Ruang	88.361.600	DAK/APBN	DINAS PENDIDIKAN	
	4	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat							
		SMPN 8 BINTAN			1	Ruang	204.951.720	DAK/APBN	DINAS PENDIDIKAN	
	5	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat							
		SMPN 8 BINTAN (LABOR IPA)			1	Ruang	172.693.660	DAK/APBN	DINAS PENDIDIKAN	
	6	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah							
		SDN 003 TELUK SEBONG			4	Ruang	1.380.000.000	DAK/APBN	Dinas Pendidikan	
		SMPN 10 BINTAN			3	Ruang	1.331.142.360	DAK/APBN	DINAS PENDIDIKAN	

Lokasi/Program/Kegiatan					Indikator		Vol/Satuan		Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana (KL/Pemda)	Ket
Kecamatan Gunung Kijang									983.493.890,00			
	2	Program Pendidikan Menengah Pertama										
	1	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat							
		SDN 003 GUNUNG KIJANG					2	Ruang	348.000.000	DAK/APBN	Dinas Pendidikan	
		SMPN 20 BINTAN					1	Ruang	143.294.020	DAK/APBN	DINAS PENDIDIKAN	
	2	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium			Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat							
		SMPN 20 BINTAN (LABOR IPA)					1	Ruang	172.693.660	DAK/APBN	DINAS PENDIDIKAN	
	3	Pembangunan Laboratorium			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun							
		SMPN 27 BINTAN (Labor Komputer)					1	Ruang	667.506.210	DAK/APBN	DINAS PENDIDIKAN	
Kecamatan Bintang Utara									628.117.140,00			
	3	Program Pendidikan Menengah Pertama										
	1	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat							
		SDN 003 BINTAN UTARA					3	Ruang	522.000.000	DAK/APBN	Dinas Pendidikan	
		SDN 008 BINTAN UTARA					3	Ruang	522.000.000	DAK/APBN	Dinas Pendidikan	
	2	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula			Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun							
		SMPN 12 BINTAN					1	Ruang	628.117.140	DAK/APBN	DINAS PENDIDIKAN	
Kecamatan Bintang Pesisir									527.222.840,00			
	4	Program Pendidikan Menengah Pertama										
	1	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun							
		SDN 002 BINTAN PESISIR (UKS)					1	Unit	125.000.000	DAK/APBN	Dinas Pendidikan	
		SMPN 19 BINTAN (UKS)					1	Unit	242.999.640	DAK/APBN	DINAS PENDIDIKAN	
		SMPN 19 BINTAN (Jamban)					1	Unit	195.861.600	DAK/APBN	DINAS PENDIDIKAN	
	2	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat							
		SMPN 19 BINTAN (Jamban)					4	Ruang	88.361.600	DAK/APBN	DINAS PENDIDIKAN	
TOTAL									6.048.096.330			
DINAS PERHUBUNGAN								JUMLAH	5.094.500.000,00			
Kecamatan Bintang Utara									94.500.000,00			
	1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)										
					Pengadaan Zona Selamat Sekolah		1 Lokasi	unit	94.500.000	DAK	DINAS PERHUBUNGAN	

Lokasi/Program/Kegiatan						Indikator	Vol/Satuan		Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana (KL/Pemda)	Ket
Kecamatan Bintang Pesisir									5.000.000.000,00			
						Pembangunan Dermaga Desa Mapur	1	unit	5.000.000.000	DAK	DINAS PERHUBUNGAN	
DINAS LINGKUNGAN HIDUP								JUMLAH	8.000.000.000,00			
Kecamatan Teluk Sebong									800.000.000,00			
						Jumlah Truk Amroll/pengelolaan persampahan/pengadaan truk amroll	1	unit	800.000.000,00	DAK	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
DINAS KESEHATAN								JUMLAH	10.400.000.000			
Kecamatan Bintang Pesisir									8.000.000.000			
						Renovasi Puskesmas Kelong			8.000.000.000	DAK	Dinas Kesehatan	
Kecamatan Bintang Utara									1.000.000.000			
						PLTS Puskesmas Tanjung Uban			1.000.000.000	DAK	Dinas Kesehatan	
Kecamatan Teluk Sebong									400.000.000			
						IPAL Puskesmas Sri Bintang			400.000.000	DAK	Dinas Kesehatan	
Kecamatan Gunung Kijang									1.000.000.000			
						PLTS PUSKESMAS KAWAL			1.000.000.000	DAK	Dinas Kesehatan	
DINAS PERKIM								JUMLAH	4.800.000.000			
Kecamatan Bintang Pesisir									1.200.000.000			
	5	Pengembangan Perumahan										
		5,1	Pembangunan rumah Khusus dan rumah swadaya			Jumlah Rumah swadaya yang di tingkatkan di kawasan perbatasan negara	60	Unit	1.200.000.000	DAK	DINAS PERKIM	
Kecamatan Bintang Utara									3.600.000.000			
	5	Pengembangan Perumahan										
		5,1	Pembangunan rumah Khusus dan rumah swadaya			Pembangunan baru rumah swadaya	90	Unit	3.600.000.000	DAK	DINAS PERKIM	
PUPRP								JUMLAH	187.942.712.927			
Kecamatan Gunung Kijang									181.942.712.927			
						pembangunan akses kawasan galang batang (2 ruas)			181.942.712.927	APBN	DINAS PUPRP	
Kecamatan Teluk Sebong									6.000.000.000			
						Rehabilitasi Jembatan Pengudang Kecamatan Teluk Sebong			6.000.000.000	DAK	DINAS PUPRP	prioritas bencana banjir tahun 2021
DINAS LINGKUNGAN HIDUP								JUMLAH	4.000.000.000			
Kecamatan Bintang Pesisir									4.000.000.000			
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota			Tersedianya Container Sampah	4	Unit	4.000.000.000	DAK	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	

Lokasi/Program/Kegiatan						Indikator	Vol/Satuan		Anggaran	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana (KL/Pemda)	Ket
									a.n. Bupati Bintan			
									Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan,			
									Ronny Kartika, S.STP., M.MM.			
									Pembina Utama Muda			
									NIP. 198004081999121001			

KABUPATEN NATUNA

[illegible]

NO.	PROV, KAB/KOTA, PKSN, LOKPRI		BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN (Rp.)	SUMBER PEMBIAYAA N	INSTANSI PELAKSANA (K/L, PEMDA)	KETERANGAN
1	2		3	4	5	6	7	8	9
PROVINSI KEPULAUAN									
KABUPATEN KARIMUN									
1	1	KECAMATAN KARIMUN	Pembangunan IPAL Komunal 50 KK dan Jaringan Perpipaan (SR) 3 Unit 150 SR (untuk 300 jiwa) di Sei Lakam Barat	1	Paket	2.100.000.000	APBN	KEMEN PU- PERA	Lahan Pemda
2			Pembangunan baru IPAL Skala Permukiman kombinasi MCK dengan jumlah layanan minimal 25 KK Kelurahan Teluk Air	2	Unit	800.000.000	APBN	KEMEN PU- PERA	
3			Pembangunan baru IPAL Skala Permukiman kombinasi MCK dengan jumlah layanan minimal 25 KK Kelurahan Lubuk Semut	1	Unit	500.000.000	APBN	KEMEN PU- PERA	
4			Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kawasan Karimun Kawasan Telaga Tujuh, Sungai Lakam Barat	1	Paket	5.000.000.000	APBN	KEMEN PU- PERA	
5			Rehab Rumah Tidak Layak Huni	100	Unit	2.000.000.000	APBN	KEMEN PU- PERA	

BIDANG PERDAGANGAN

NO.	PROV, KAB/KOTA, PKSN, LOKPRI	BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN (Rp.)	SUMBER PEMBIAYAA N	INSTANSI PELAKSANA (K/L. PEMDA)	KETERANGAN	
I		PROVINSI KEPULAUAN RIAU							
1		KABUPATEN KARIMUN							
1	1	KECAMATAN KARIMUN	Pembangunan/Revitalisasi Pasar Sri Karimun (Blok A + B)	1	paket	13.200.000.000	APBN	KEMENDAG	Lahan Pemda
2			Bimtek Peningkatan Usaha dan Manajemen Pengusaha Mikro Kecil	100	Peserta	500.000.000	APBN	KEMENDAG	
					13.700.000.000				
3	2	KECAMATAN MERAL	Rehabilitasi Pasar Baru Meral (Pasar Pakaian) Blok A+ B	1	Paket	9.000.000.000	APBN	KEMENDAG	
4			Pembangunan Instalasi Pengujian Tangki Ukur Mobil (TUM)	1	Paket	1.000.000.000	APBN	KEMENDAG	
5			Penyediaan Sarana Metrologi Legal Kab/Kota	1	Paket	1.000.000.000	APBN	KEMEN DAG	
6			Sarana dan Prasarana Pengujian Tangki Mobil	1	Paket	1.000.000.000	APBN	KEMEN DAG	
					12.000.000.000				
7	3	KECAMATAN MORO	Revitalisasi Pasar Rakyat Moro	1	Paket	1.500.000.000	APBN	KEMEN DAG	
8			Revitalisasi Pasar Rakyat Moro Kecamatan Moro Jl. Besar Moro Kelurahan Moro Timur	1	Paket	6.912.612.000	APBN	KEMENDAG	
					8.412.612.000				
		TOTAL			34.112.612.000				

NO.		PROV, KAB/KOTA, PKSN, LOKPRI	BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN (Rp.)	SUMBER PEMBIAYAA N	INSTANSI PELAKSANA (K/L, PEMDA)	KETERANGAN
I		PROVINSI KEPULAUAN RIAU							
1		KABUPATEN KARIMUN							
1	1	KECAMATAN KARIMUN	Peningkatan Sistem Telekomunikasi (3G/4G)	1	Paket	3.500.000.000	APBN	KEMEN KOMINFO	
						3.500.000.000			
2	2	KECAMATAN TEBING	Pengadaan Jaringan Telekomunikasi di PPKT (Tokong Hiu)	1	Paket	1.000.000.000	APBN	KEMEN KOMINFO	
			Peningkatan Sistem Telekomunikasi (3G/4G)	1	Paket	3.500.000.000	APBN	KEMEN KOMINFO	

						4.500.000.000			
	3	KECAMATAN MERAL	Peningkatan Sistem Telekomunikasi (3G/4G)	1	Paket	3.500.000.000	APBN	KEMEN KOMINFO	
						3.500.000.000			
	3	4 KECAMATAN MERAL BARAT	Peningkatan Sistem Telekomunikasi (3G/4G)	1	Paket	3.500.000.000	APBN	KEMEN KOMINFO	
						3.500.000.000			
	5	KECAMATAN BURU	Peningkatan Sistem Telekomunikasi (3G/4G)	1	Paket	3.500.000.000	APBN	KEMEN KOMINFO	
						3.500.000.000			
	6	KECAMATAN BELAT	Peningkatan Sistem Telekomunikasi (3G/4G)	1	Paket	3.500.000.000	APBN	KEMEN KOMINFO	
			Tower Internet	1	Unit	2.000.000.000	APBN	KEMEN KOMINFO	
						5.500.000.000			
	7	KECAMATAN MORO	Penyediaan Titik Lokasi BTS	1	BTS	2.788.000.000	APBN	KEMENKOM/INFO	
						2.788.000.000			
		TOTAL				26.788.000.000			

NO.	PROV, KAB/KOTA, PKSN, LOKPRI	BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN (Rp.)	SUMBER PEMBIAYAA N	INSTANSI PELAKSANA (K/L, PEMDA)	KETERANGAN
I	PROVINSI KEPULAUAN RIAU							
1	KABUPATEN KARIMUN							
1	1 KECAMATAN KARIMUN	Pelatihan dan Sertifikat Fitter	50	Org	500.000.000	APBN	KEMENAKER	
					500.000.000			
2	2 KECAMATAN TEBING	Pelatihan dan Sertifikat Operator Pesawat Angkat dan Angkut	60	Org	500.000.000	APBN	KEMENAKER	
					500.000.000			
	3 KECAMATAN MERAL	Pelatihan dan Sertifikat Mekanik (Pesawat Angkat dan Angkut)	60	Org	500.000.000	APBN	KEMENAKER	
					500.000.000			
3	4 KECAMATAN MERAL BARAT	Pelatihan dan Sertifikat Riger	60	Org	500.000.000	APBN	KEMENAKER	
4		Pelatihan dan Sertifikat Welder	22	Org	500.000.000	APBN	KEMENAKER	
					1.000.000.000			
	5 KECAMATAN BURU	Pelatihan dan Sertifikat Scaffolding	60	Org	500.000.000	APBN	KEMENAKER	
					500.000.000			
	6 KECAMATAN BELAT	Pelatihan dan Sertifikat Listrik	60	Org	500.000.000	APBN	KEMENAKER	
					500.000.000			
	7 KECAMATAN MORO	Pelatihan dan Sertifikat Las Dasar	60	Org	500.000.000	APBN	KEMENAKER	
					500.000.000			
	TOTAL				4.000.000.000			

NO.	PROV, KAB/KOTA, PKSN, LOKPRI	BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN (Rp.)	SUMBER PEMBIAYAA N	INSTANSI PELAKSANA (K/L, PEMDA)	KETERANGAN
I	PROVINSI KEPULAUAN RIAU							
1	KABUPATEN KARIMUN							
					72.200.000.000			
1	1 KECAMATAN KARIMUN	Pembangunan Pelabuhan Perikanan Tanjung Balai Karimun di Pulau Lumut desa Selat Mendaun Beserta Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	1	Paket	70.000.000.000	APBN	KEMEN KKP	Lahan Pemda
2		Pengadaan Kapal Tangkap Ikan	1	Paket	1.500.000.000	APBN	KEMEN KKP	
3		Pengadaan dan Pembangunan Sarana prasarana Budidaya sistem RAS	2	Paket	700.000.000	APBN	KEMEN KKP	
					21.048.480.000			
4	2 KECAMATAN TEBING	Penyediaan Alat Tangkap Ikan (Jaring Tangsi 3 inc)	1	Paket	600.000.000	APBN	KEMEN KKP	
5		Pengadaan Sarana Prasarana Alat Penangkapan Ikan (Jaring Nilon Tenggiri 3,5 inc) Kelurahan Teluk Uma Nelayan Leho	1750	pcs	2.625.000.000	APBN	KEMEN KKP	
6		Pengadaan Sarana Prasarana Alat Penangkapan Ikan (Kapal Perahu Full Fiber 3 GT) Kelurahan Teluk Uma Nelayan Leho	30	Unit	7.125.000.000	APBN	KEMEN KKP	

7			Pendalaman alur dan Pembangunan Tambatan Perahu Nelayan di Leho Kelurahan Teluk Uma	1	Paket	3.700.000.000	APBN	KEMEN KKP	
8			Pengadaan Sarana Prasarana Alat Penangkapan Ikan Di Desa Pongkar (Jaring Tangsi 3,5 Inc)	1	Paket	600.000.000	APBN	KEMEN KKP	
9			Pengadaan Tambatan Perahu Nelayan RT 002 RW 001 Desa Pongkar	1	Paket	500.000.000	APBN	KEMEN KKP	
10			Pengadaan Tambatan Perahu Nelayan RT 003 RW 002 Desa Pongkar	1	Paket	700.000.000	APBN	KEMEN KKP	
11			Rehabilitasi Bibit Balai Benih Ikan (BBI) dan Balai Benih Ikan Laut	2	Unit	2.000.000.000	APBN	KEMEN KKP	
12			Pengadaan Bibit Benih dan Indukan Ikan Air Tawar, Air Laut dan Air Asin (Beserta Pakan)	1	Paket	600.000.000	APBN	KEMEN KKP	
13			Pengadaan Sapras Budidaya Sistem Bioflok	4	Paket	800.000.000	APBN	KEMEN KKP	
14			Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam daerah Kabupaten/Kota Kapal Motor 10 GT Fiber	1	Paket	1.000.000.000	APBN	KEMEN KKP	
15			Pengadaan Sarana dan prasarana budidaya ikan laut (kerapu, bawal bintang, kakap, teripang atau lobster)	2	Paket	798.480.000	APBN	KEMEN KKP	
						11.600.000.000			
16	4	KECAMATAN MERAL BARAT	Rehab Tambatan Perahu Nelayan Sepedas Laut Kelurahan Pasir Panjang (RT 04 RW 05) Sudah eksist	1	Paket	10.000.000.000	APBN	KEMEN KKP	
17			Percontohan Budidaya Lele Insentif dengan Penerapan Teknologi Bio Flog	3	Paket	1.000.000.000	APBN	KEMEN KKP	
18			Pengadaan Sarana Prasarana Budidaya Sistem RAS	5	Paket	600.000.000	APBN	KEMEN KKP	

NO.	LOKPRI (KECAMATAN)	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	OUTPUT/ INDIK	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN (Rp.)	SUMBER PEMBIAYAAN	INSTANSI PELAKSANA (K/L, PEMDA)	LOKASI	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Siantan	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Terlaksananya Pembangunan Ruang Kelas Baru	3	Ruang	1.350.000.000	DAK	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	Siantan	
2	Siantan	Pembangunan Rumah Dinas Guru	Terlaksananya Pembangunan Rumah Dinas Guru	1	Unit	400.000.000	DAK	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	Siantan	
3	Siantan	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Terlaksananya Ruang Unit Kesehatan Sekolah	1	Ruang	300.000.000	DAK	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	Siantan	
4	Siantan	Pembangunan Ruang Laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)	Terlaksananya Pembangunan Laboratorium Komputer	1	Ruang	700.000.000	DAK	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	Siantan	
5	Siantan	Rehabilitasi Ruang Laboratorium	Terlaksananya rehabilitasi Laboratorium	1	Ruang	300.000.000	DAK	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	Siantan	
6	Siantan	Rehabilitasi Ruang Toilet	Terlaksananya Rehabilitasi Toilet (Jamban)	2	Ruang	300.000.000	DAK	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	Siantan	
7	Siantan	Rehabilitasi Ruang Kelas Baru	Terlaksananya Rehabilitasi Ruang Kelas	3	Ruang	750.000.000	DAK	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	Siantan	
8	Siantan	Pembangunan Jalan Gudang Tengah - Arung Hiau	Panjang jalan yang dibangun	1,82	Km	20.000.000.000	DAK	DPUPRP RKP	Desa Tarempa Selatan	
9	Siantan	Peningkatan Jalan Gudang Tengah - TPU	Panjang jalan yang ditingkatkan	0,6	Km	5.000.000.000	DAK	DPUPRP RKP	Desa Tarempa Selatan	
10	Siantan	Optimalisasi SPAM IKK Siantan	Jumlah SPAM yang dioptimalkan	1	Unit	2.467.179.000	DAK	DPUPRP RKP	Desa Sri Tanjung	
11	Siantan	Penimbunan Waterfront City	Jumlah bangunan yang dibangun	1	Unit	8.000.000.000	DAK	DPUPRP RKP	Kelurahan Tarempa	
12	Siantan	pembangunan Gedung Pertemuan di Kecamatan Siantan	Jumlah gedung yang dibangun	1	Unit	4.000.000.000	DAK	DPUPRP RKP	Kelurahan Tarempa	
13	Siantan	Revitalisasi Balai Pertemuan Masyarakat Siantan (BPMS)	Jumlah bangunan yang dibangun	1	Unit	3.000.000.000	DAK	DPUPRP RKP	Kelurahan Tarempa	
14	Siantan	Pembangunan Jalan Pintas Teluk Buluh - Antang Desa Tarempa Timur	Panjang jalan yang dibangun	300	M	1.500.000.000	DAK	DPUPRP RKP	Desa Tarempa Timur	
15	Siantan	Pembangunan Jalan Pintas Dari SD 008 Ke Pelabuhan Dusun Desa Pesisir Timur Kec. Siantan	Panjang jalan yang dibangun	350	M	1.200.000.000	DAK	DPUPRP RKP	Desa Pesisir Timur	
16	Siantan	Kebun B2SA	Jumlah Kelompok Wanita Tani yang menerima Bantuan	4	KWT	120.000.000	APBN	Dinas Perikanan dan Pertanian	Tarempa	
17	Siantan	Pengadaan chest freezer 200 L	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Olahan Perikanan yang dilakukan	45	Unit	247.500.000	APBN	Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan	Desa Sri Tanjung	
18	Siantan	Pengelolaan Perikanan Tangkap/ Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota (Pengadaan Kapal Pengangkut Ikan > 30 GT)	Jumlah Kapal/Armada Pengangkut Ikan	1	Unit	Rp 3.500.000.000	DAK	Provinsi dan Pusat	Tarempa	
19	Siantan	Pengelolaan Perikanan Tangkap/ Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota (Pengadaan Kapal Pengangkut Ikan < 5 GT)	Jumlah Armada Penangkapan Ikan <5GT	1	Unit	Rp 290.000.000	DAK	Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan	Tarempa Timur	
20	Siantan	Pengelolaan Perikanan Tangkap/ Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota (Pengadaan Kapal Pengangkut Ikan < 5 GT)	Jumlah Armada Penangkapan Ikan <5GT	2	Unit	Rp 580.000.000	DAK	Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan	Sri Tanjung	
21	Siantan	Pengelolaan Perikanan Tangkap/ Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota (Pengadaan Kapal Pengangkut Ikan < 3 GT)	Jumlah Armada Penangkapan Ikan <3GT	1	Unit	Rp 130.000.000	DAK	Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan	Tarempa Selatan	
22	Siantan	Pengelolaan Perikanan Tangkap/ Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota (Pengadaan Kapal Pengangkut Ikan < 3 GT)	Jumlah Armada Penangkapan Ikan <3GT	1	Unit	Rp 130.000.000	DAK	Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan	Pesisir Timur	

23	Siantan	Pengelolaan Perikanan Tangkap/ Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota (Pengadaan Perahu tanpa Motor Sarana Pendukung Penangkapan Ikan)	Jumlah Perahu Penangkapan Ikan/ sarana pendukung penangkapan Ikan (longkong)	2	Unit	Rp 13.100.000	DAK	Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan	Pesisir Timur	
24	Siantan	Pengelolaan Perikanan Tangkap/ Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota (Pengadaan Sarana Penangkapan Ikan/atau Sarana Pendukung penangkapan ikan dan/atau sarana keselamatan pelayaran untuk kapal penangkapan ikan < 5 GT	Jumlah Sarana dan prasarana pendukung armada pengkapan ikan nelayan (Fiber Box)	2	Unit	Rp 23.000.000	DAK	Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan	Tarempa Timur	
25	Siantan	Pengelolaan Perikanan Tangkap/ Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota (Pengadaan Sarana Penangkapan Ikan/atau Sarana Pendukung penangkapan ikan dan/atau sarana keselamatan pelayaran untuk kapal penangkapan ikan < 5 GT	Jumlah Sarana dan prasarana pendukung armada pengkapan ikan nelayan (Fiber Box)	2	Unit	Rp 23.000.000	DAK	Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan	Sri Tanjung	
26	Siantan	Pengelolaan Perikanan Tangkap/ Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota (Pengadaan Sarana Penangkapan Ikan/atau Sarana Pendukung penangkapan ikan dan/atau sarana keselamatan pelayaran untuk kapal penangkapan ikan < 5 GT	Jumlah sarana dan prasarana pendukung armada pengkapan ikan nelayan (personal location beacon) GPS	2	Unit	Rp 17.400.000	DAK	Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan	Tarempa Barat	
27	Siantan	Pengelolaan Perikanan Tangkap/ Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota (Pengadaan Sarana Penangkapan Ikan/atau Sarana Pendukung penangkapan ikan dan/atau sarana keselamatan pelayaran untuk kapal penangkapan ikan < 5 GT	Jumlah sarana dan prasarana pendukung armada pengkapan ikan nelayan (personal location beacon) GPS	2	Unit	Rp 17.400.000	DAK	Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan	Pesisir Timur	
28	Siantan	Penyediaan Alat Angkut Sampah Motor Roda Tiga	Jumlah Motor Roda Tiga yang disediakan	3	Unit	200.000.000	DAK	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	Kelurahan Tarempa	
29	Siantan	Penyediaan Speed Sampah	Jumlah Speed Sampah yang disediakan	1	Unit	500.000.000	DAK	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	Kelurahan Tarempa	
30	Siantan	Pembangunan RDF Komunal	Jumlah RDF Komunal yang terbangun	1	Unit	25.000.000.000	DAK	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	Desa Tarempa Selatan	
31	Siantan	Pembangunan Persemaian	Jumlah persemaian yang terbangun	1	Unit	500.000.000	DAK	Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	Desa Tarempa Selatan	
32	Jemaja	Revitalisasi RSUD	Jumlah RSUD yang di revitalisasi	1	Unit	5.000.000.000	DAK	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Letung	
33	Jemaja	Pembangunan Kamar Operasi RSUD	Tersedianya Kamar Operasi di RSUD	1	Unit	5.000.000.000	DAK	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Letung	
34	Jemaja	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Terlaksananya Pembanguna Ruang Kelas Baru	3	Ruang	1.350.000.000	DAK	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	Jemaja	
35	Jemaja	Pembangunan Rumah Dinas Guru	Terlaksananya Pembangunan Rumah Dinas Guru	1	Unit	400.000.000	DAK	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	Jemaja	
36	Jemaja	Rehabilitasi Ruang Laboratorium Komputer	Terlaksananya Pembangunan Laboratorium Komputer	1	Ruang	300.000.000	DAK	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	Jemaja	
37	Jemaja	rehabilitasi Rumah Dinas Guru	Terlaksananya rehabilitasi Rumah Dinas Guru	1	Unit	200.000.000	DAK	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	Jemaja	
38	Jemaja	Rehabilitasi Ruang Kelas Baru	Terlaksananya Rehabilitasi Ruang Kelas	3	Ruang	600.000.000	DAK	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	Jemaja	
39	Jemaja	Rehabilitasi Ruang Toilet	Terlaksananya Rehabilitasi Toilet	3	Ruang	450.000.000	DAK	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	Jemaja	
40	Jemaja	Pengadaan chest freezer 200 L	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Olahan Perikanan yang dilakukan	10	Unit	55.000.000	APBN	Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan		
41	Jemaja	Pengelola Perikanan Budidaya/ Pengelola Pembudidayaan Ikan/ Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan (Jaring Keramba)	600	kg	112.140.000	DAK	Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan	Kelurahan Lettung	

42	Jemaja	Pengelolaan Perikanan Tangkap/ Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota (Pengadaan Kapal Pengangkut Ikan < 5 GT)	Jumlah Armada Penangkapan Ikan <5GT	1	Unit	Rp 290.000.000	DAK	Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan	Kelurahan Letung	
43	Jemaja	Pengelolaan Perikanan Tangkap/ Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota (Pengadaan Kapal Pengangkut Ikan < 5 GT)	Jumlah Armada Penangkapan Ikan <5GT	1	Unit	Rp 290.000.000	DAK	Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan	Mampok	
44	Jemaja	Pengelolaan Perikanan Tangkap/ Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota (Pengadaan Perahu tanpa Motor Sarana Pendukung Penangkapan Ikan)	Jumlah Perahu Penangkapan Ikan/ sarana pendukung penangkapan Ikan	2	Unit	Rp 13.100.000	DAK	Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan	Kelurahan Letung	
45	Jemaja	Pengelolaan Perikanan Tangkap/ Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota (Pengadaan Perahu tanpa Motor Sarana Pendukung Penangkapan Ikan)	Jumlah Perahu Penangkapan Ikan/ sarana pendukung penangkapan Ikan	2	Unit	Rp 13.100.000	DAK	Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan	Mampok	

TARGET REALISASI BIDANG KOORDINASI PELAKSANAAN

NO	KABU/KOTA	TARGET	REALISASI	HASIL
1	KAB. BINTAN	21	9	
2	KOTA BATAM	38	28	
3	KAB. KARIMUN	29	2	
4	KEPULAUAN ANAMBAS	54	22	
5	KAB. NATUNA	47	9	
JUMLAH		189	70	37%

REKAPITULASI RENCANA TATA RUANG INDIKASI PROGRAM UTAMA JANGKA MENENGAH LIMA TAHUNAN
KAWASAN PERBATASAN NEGARA DI KABUPATEN NATUNA PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Perpres RI No 43 Tahun 2020

No	DAERAH	NOMOR PEMBANGUNAN	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN		INSTANSI PELAKSANA		WAKTU PELAKSANA					FOTO & KETERANGAN
									I	II	III	IV	V	
									2025	2026	2027	2028	2029	
TARGET									REALISASI					
5	KAB NATUNA		I PERWUJUDAN STRUKTUR											
			A Sistem Pusat Permukiman											
			A.1 Percepatan pengembangan pusat pelayanan pintu utama											
			1 Penyusunan dan penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)	PKSN Ranai di Kabupaten Natuna	APBN		Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kemen ATR/BPN)							
			2 Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat kegiatan pelayanan	PKSN Ranai di Kabupaten Natuna	APBN dan/atau APBD		Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), dan/atau Pemerintah Daerah (Pemda)							
			3 Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara	PKSN Ranai di Kabupaten Natuna	APBN dan/atau APBD		Kemenhan, TNI, Polri, dan Pemda							
			4 Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat pemerintahan	PKSN Ranai di Kabupaten Natuna	APBN dan/atau APBD		Kemendagri dan/atau Pemda							
			5 Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat kegiatan perdagangan dan jasa	PKSN Ranai di Kabupaten Natuna	APBN, APBD, dan / atau sumber lain yang sah		Kementerian Perdagangan (Kemendag), Pemda, dan/atau Masyarakat							
			6 Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat kegiatan industri pengolahan dan industri jasa hortikultura dan perkebunan	PKSN Ranai di Kabupaten Natuna	APBN, APBD, dan / atau sumber lain yang sah		Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Kementan, Pemda, dan/atau Masyarakat							
			7 Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat kegiatan Industri pengolahan dan industri jasa pertambangan minyak dan gas bumi	PKSN Ranai di Kabupaten Natuna	APBN, APBD, dan / atau sumber lain yang sah		Kemenprin, Keenterian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kemen ESDM), Pemda, dan/atau Masyarakat							
			8 Pembangunan, peningkatan, dan/atau pementapan pusat kegiatan Industri pengolahan dan Industri jasa perikanan	PKSN Ranai di Kabupaten Natuna	APBN, APBD, dan / atau sumber lain yang sah		Kemenprin, Kementerian Kelautan dan Perikanan (Kemen KP), Pemda, dan/atau Masyarakat							
			9 Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat kegiatan promosi pariwisata dan komoditas unggulan berbasis potensi lokal	PKSN Ranai di Kabupaten Natuna	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), Pemda, dan/atau Masyarakat									
			10 Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat kegiatan pendidikan dasar menengah, kejuruan, dan/atau tinggi	PKSN Ranai di Kabupaten Natuna	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Agama (Kemenag), Pemda, dan/atau Masyarakat									
			11 Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapanpusat kegiatan kesehatan	PKSN Ranai di Kabupaten Natuna	Kemenkes, Pemda, dan/atau Masyarakat									
			12 Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan prasarana dan sarana promosi, serta simpul transportasi	PKSN Ranai di Kabupaten Natuna	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR), Kemenhub, dan/atau Pemda									
			13 Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan prasarana dan saran pelayanan tenaga listrik, telekomunikasi, informatika, dan penyiaran, fasilitas sosial, serta fasilitas umum	PKSN Ranai di Kabupaten Natuna	Kemen ESDM, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Kemen PUPR, Pemda, dan/atau Masyarakat									
			14 Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan prasarana dan sarana air limbah, drainase, dan pengelolaan sampah	PKSN Ranai di Kabupaten Natuna	emen PUPR, Pemda, dan/atau Masyarakat									Laporan RKPD Dinas PUPR 2025
			A.3 Percepatan pengembangan											
			1 Penyusunan dan penetapan RDTR	Serasan di Kecamatan Serasan pada Kabupaten Natuna	APBN		Kemen ATR/BPN							
			2 Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat kegiatan kepabeaan, imigrasi, karantina, dan keamanan	Serasan di Kecamatan Serasan pada Kabupaten Natuna			Kementan, BNPP, TNI, POLRI, dan/atau Pemda							
			3 Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara	Serasan di Kecamatan Serasan pada Kabupaten Natuna	APBN dan APBD		Kemenhan, TNI, POLRI, dan Pemda							
			4 Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan prasarana dan sarana transportasi	Serasan di Kecamatan Serasan pada Kabupaten Natuna	APBN dan/atau APBD		Kemen PUPR, Kemenhub, dan/atau Pemda							

[illegible]

			1) Pelabuhan Serasan	Kecamatan Serasan pada Kabupaten Natuna	APBN, APBD, dan / atau sumber lain yang sah Masyarakat														
			Lintas Penyeberangan																
			7	Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan Lintas Penyeberangan Antarnegara															
			1)	Tarempa (Indonesia) - Singapura (Singapura)	Laut Natuna dan Selat Singapura	APBN, APBD, dan / sumber lain yang sah												Kemenhub, Pemda, dan/atau Masyarakat	
			2)	Selat Lampah (Indonesia) - Serawak (Malaysia)	Laut Natuna	APBN, APBD, dan / sumber lain yang sah												Kemenhub, Pemda, dan/atau Masyarakat	
			3)	Serasan (Indonesia) - Tanah Merah (Singapura)	Laut Natuna dan Laut Natuna Utara	APBN, APBD, dan / sumber lain yang sah												Kemenhub, Pemda, dan/atau Masyarakat	
			4)	Serasan (Indonesia) - Serawak (Malaysia)	Laut Natuna	APBN, APBD, dan / sumber lain yang sah												Kemenhub, Pemda, dan/atau Masyarakat	
				Sistem Jaringan Transportasi Laut															
				Pelabuhan Laut															
				Pelabuhan Laut Yang Melayani Angkutan Laut															
			8	Pemantapan pelabuhan pengumpul															
			1)	Pelabuhan Selat Tampa	Kecamatan Pulau Tiga pada Kabupaten Natuna	APBN, APBD, dan / sumber lain yang sah												Kemenhub, Pemda, dan/atau Masyarakat	
				Pelabuhan untuk kegiatan pertahanan dan keamanan															
			9	Peningkatan dan/atau pemantapan pelabuhan untuk kegiatan pertahanan dan keamanan															
			1)	Posal Pulau Laut	Kecamatan Pulau Laut pada Kabupaten Natuna	APBN, APBD, dan / sumber lain yang sah												Kemenhub, Pemda, dan/atau Masyarakat	
			2)	Posal Sabang Mawang dan Pipa Air Tawar	Kecamatan Pulau Tiga pada Kabupaten Natuna	APBN, APBD, dan / sumber lain yang sah												Kemenhub, Pemda, dan/atau Masyarakat	
			3)	Posal Penagi	Kecamatan Bunguran Timur pada Kabupaten Natuna	APBN, APBD, dan / atau sumber lain yang sah												Kemenhub, Pemda, dan/atau Masyarakat	
			4)	Posal Serasan	Kecamatan Serasan Timur pada Kabupaten Natuna	APBN, APBD, dan / atau sumber lain yang sah												Kemenhub, Pemda, dan/atau Masyarakat	
				Sistem Jaringan Transportasi Udara															
			10	Peningkatan dan/atau pemantapan bandar udara pengumpul skala pelayanan tersier															
			1)	Bandar Udara Ranai	Kecamatan Bunguran Timur pada Kabupaten Natuna	APBN, APBD, dan / sumber lain yang sah												Kemenhub, Pemda, dan/atau Masyarakat	
			B.2	Sistem Jaringan Energi															
			1	Pembangunan dan/atau pemantapan jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi															
			1)	Jaringan pipa tranmisi dan distribusi minyak dan gas bumi	jalur Natuna D - Alpha - Batam; dan jalur Natuna - Kalimantan Barat	APBN, APBD, dan / sumber lain yang sah												Kemen ESOM, Pemda, dan/atau Masyarakat	
			2)	Pembangunan depo minyak dan gas bumi															
			1)	seluruh pos pengamanan perbatasan yang berada di :															
				Kecamatan Pulau Laut, Kecamatan Bunguran Timur, Kecamatan Pulau Tiga, dan Kecamatan Serasan pada Kabupaten Natuna															
			3	Pembangunan, peningkatan,															
			1)	PLTMG Natuna-1 dan PLTMG Natuna-3	Kabupaten Natuna	APBN, APBD, dan / sumber lain yang sah												Kemen ESOM, Pemda, dan/atau Masyarakat	

REKAPITULASI RENCANA TATA RUANG INDIKASI PROGRAM UTAMA JANGKA MENENGAH LIMA TAHUNAN
KAWASAN PERBATASAN NEGARA DI KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Perpres RI No 43 Tahun 2020

No	DAERAH	NOMOR PEMBANGU NAN	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANA					FOTO & KETERANGAN	
							I	II	III	IV	V		
							2025	2026	2027	2028	2029		
TARGET							REALISASI						
4	KAB. KEPULAUAN ANAMBAS		I PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG										
			A Sistem Pusat Permukiman										
			A.1 Percepatan pengembangan pusat pelayanan utama										
			1 Penyusunan dan penetapan Rencana Detail Tata Ruang RDTR	PKSN Tarempa di Kabupaten Kepulauan Anambas	APBN		Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional (Kemen ATR/BPN)						Pada indikasi program RTRW dilakdsanakana n mulai tahun ke-2
			2 Pembangunan, peningkatan dan/atau pemantapan pusat kegiatan pelayanan	PKSN Tarempa di Kabupaten Kepulauan Anambas	APBN dan/atau APBD		Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Kementerian Keuangan (Kemenuk), Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Kesehatan (Kemendes), Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan/atau Pemerintah Daerah (Pemda)						
			3 Pembangunan, peningkatan dan/atau pemantapan pusat kegiatan pertahanan dan kemanan negara	PKSN Tarempa di Kabupaten Kepulauan Anambas	APBN dan/atau APBD		Kemenhan, TNI, Polri, dan Pemda						
			4 Pembangunan, peningkatan dan/atau pemantapan pusat pemerintahan	PKSN Tarempa di Kabupaten Kepulauan Anambas	APBN dan/atau APBD		Kemendagri dan/atau Pemda						
			5 Pembangunan, peningkatan, dan / atau pemantapan pusat kegiatan perdagangan dan jasa	PKSN Tarempa di Kabupaten Kepulauan Anambas	APBN dan/atau APBD sumber lain yang sah		Kemendag, Pemda, dan / atau masyarakat						
			Gudang Logistik	Jemaja dan Palmatak	APBN dan/atau APBD sumber lain yang sah	Rp. 7.000.000.000	Kemendag/Kemen PU			v			
			Gudang Logistik	Jemaja dan Palmatak	APBN dan/atau APBD sumber lain yang sah	Rp. 7.000.000.000	Kemendag/Kemen PU				v		
			Pasar Inpres	PKSN Tarempa di Kabupaten Kepulauan Anambas	APBN dan/atau APBD sumber lain yang sah	Rp. 50.000.000.000	Kemendag/Kemen PU			v			
			6 Pembangunan , peningkatan, dan / atau pemantapan pusat kegiatan industri pengolahan dan industri jasa pertambangan minyak dan gas bumi	PKSN Tarempa di Kabupaten Kepulauan Anambas	APBN dan/atau APBD sumber lain yang sah		Kemenperin, Kemen ESDM, Pemda, dan / ata masyarakat						
			7 Pembangunan, peningkatan, dan / atau pemantapa pusat kegiatan industri pengolahan dan industri jasa perikanan	PKSN Tarempa di Kabupaten Kepulauan Anambas	APBN dan/atau APBD sumber lain yang sah		Kemenprin, Kemen KP, Pemda, dan / atau masyarakat						
			8 Pembangunan, peningkatan, dan / atau pemantapan pusat kegiatan promosi pariwisata, dan komoditas unggulan berbasis potensi lokal	PKSN Tarempa di Kabupaten Kepulauan Anambas	APBN dan/atau APBD sumber lain yang sah		Kemenseparekraf, Pemda, dan / atau masyarakat						
			9 Pembangunan, peningkatan, dan / atau pemantapan pusat kegiatan pendidikan dasar, menengah, kejuruan, dan / atau tinggi	PKSN Tarempa di Kabupaten Kepulauan Anambas	APBN dan/atau APBD sumber lain yang sah		Kemendikbud, Kemenag, Pemda, dan / atau Masyarakat						
			10 Pembangunan, peningkatan , dan / atau pemantapan pusat kegiatan kesehatan	PKSN Tarempa di Kabupaten Kepulauan Anambas	APBN dan/atau APBD sumber lain yang sah		Kemendes, Pemda, dan / atau masyarakat						
			1. Pembangunan Kamar Operasi RSUD Jemaja	Kecamatan Jemaja	APBN (DAK)	Rp. 700.000.000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Rp. 700.000.000	v				Dalam Proses Tender
			2. Pembangunan Puskesmas Pembantu (PUSTU) Batu Ampar	Kecamatan Kute Siantan	APBN (DAK)	Rp. 725.670.728	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Rp. 725.670.728	v				Dalam Proses Tender
			3. Pembangunan Puskesmas Pembandu (PUSTU) Batu Berapit	Kecamatan Jemaja	APBN (DAK)	Rp. 725.670.728	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Rp. 725.670.728	v				Dalam Proses Tender
			4. Pembangunan Ruang Rawat Inap RSUD Jemaja	Kecamatan Jemaja	APBN (DAK)	Rp. 725.670.728	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Rp. 725.670.728	v				Dalam Proses Tender
			5. Pembangunan Unit Terpadu Daerah (UTD) RSUD Tarempa	Kecamatan Siantan	APBN (DAK)	Rp. 3.500.000.000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Rp. 3.500.000.000	v				Dalam Proses Tender
			6.							v			Sudah ada DED Tahun Anggaran Tahun 2023
			7.							v			Sudah ada DED Tahun Anggaran Tahun 2023
			8.							v			Sudah ada DED Tahun Anggaran Tahun 2024
			9.							v			Sudah ada DED Tahun Anggaran Tahun 2025

		11	Pembangunan, peningkatan , dan / atau pemantapan prasarana dan sarana promosi, serta simpul transportasi	PKSN Tarempa di Kabupaten Kepulauan Anambas	APBN, dan / atau APBD	Kemen PUPR, Kemenhub, dan / atau Pemda							Berupa Usulan Pembangunan Multiporpos e Kabupaten Kepulauan Anambas	
		12	Pembangunan, peningkatan, dan / atau pemantapan pusat kegiatan industri jasa pertanian tanaman pangan	PKSN Tarempa	APBN, dan / atau APBD sumber lain yang sah	Kemenperin,Kementan, Pemda, dan / atau Masyarakat								
		13	Pembangunan, peningkatan , dan atau pemantapan prasarana dan sarana pelayanan teknik listrik, telekomunikasi, informatika dan penyiaran, fasilitas sosial, serta fasilitas umum	PKSN Tarempa di Kabupaten Kepulauan Anambas		Kemen PUPR, Pemda, dan / atau masyarakat								
		14	Pembangunan, peningkatan , dan / atau pemantapan prasarana dan sarana air minum, jaringan air limbah, drainase, dan pengelolaan sampah	PKSN Tarempa di Kabupaten Kepulauan Anambas	APBN, APBD , dan / atau sumber lain yang sah	APBN, APBD , dan sumber lain yang sah								
		A.3	Pecapaian Pengembangan Pusat Pelayanan Pintu Gerbang											
		1	Penyusunan dan Penetapan RDTR		APBN	Kemen ATR / BPN							Pada indikasi program RTRW dilaksanakan mulai tahun ke-2	
		2	Pembangunan, peningkatan dan / atau pemantapan pusat kegiatan kepabeanean, Imigrasi, Karantina, dan Keamanan	Letung di Kecamatan Jemaja padaKabupaten kepulauan Anambas	APBN, dan / atau APBD	Kemendagri, Kemenhan, Kemekeu, Kemenkumham, Kemenkes, Kementan, BNPP, TNI, Polri, dan / atau Pemda							Pada indikasi program RTRW dilaksanakan mulai tahun ke-2	
		3	Pembangunan, peningkatan dan / atau pemantapan pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara	Letung di Kecamatan Jemaja padaKabupaten kepulauan Anambas	APBN, dan / atau APBD	Kemenhan, TNI, Polri, dan Pemda								
		4	Pemangunan, peningkatan dan / atau pemantapan prasarana dan sarana transportasi	Letung di Kecamatan Jemaja padaKabupaten kepulauan Anambas	APBN, dan / atau APBD	Kemen PUPR, Kemenhub, dan / atau Pemda								
		5	Pembangunan, peningkatan dan / atau pemantapan pusat kegiatan perdagangan dan jasa	Letung di Kecamatan Jemaja padaKabupaten kepulauan Anambas	-									
		6	Pembangunan, peningkatan , dan / atau pemantapan pusat kegiatan promosi pariwisata, dan komoditas unggulan berbasis potensi lokal	Letung di Kecamatan Jemaja padaKabupaten kepulauan Anambas	-									
		7	Pembangunan, peningkatan , dan / atau pemantapan pusat prasarana dan sarana pelayanan tenaga listrik, telekomunikasi, informatika dan penyiaran, fasilitas sosial , dan serta fasilitas umum	Letung di Kecamatan Jemaja padaKabupaten kepulauan Anambas	APBN, APBD , dan sumber lain yang sah	Kemen ESDM, Kemenkominfo, Kemen PUPR, dan / atau Masyarakat								
		8	Pembangunan, peningkatan , dan / atau pemantapan pusat prasarana dan sarana air minum, jaringan air limbah, drainase, dan pengelolaan sampah	Letung di Kecamatan Jemaja padaKabupaten kepulauan Anambas	APBN, APBD , dan sumber lain yang sah	Kemen PUPR, Pemda, dan Masyarakat								
		B.	Sistem Jaringan Prasarana											
		B.1	Sistem Jaringan Transportasi											
			Sistem Transportasi Darat											
			Sistem Jaringan Jalan											
		1	Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan jaringan jalan arteri primer											
		1)	Trempa - Sp. Rintis	Kabupaten Kepulauan Anambas	APBN, dan / atau APBD	Kemen PUPR dan/atau Pemda								
		2)	Peninting - Payalaman	Kabupaten Kepulauan Anambas	APBN, dan / atau APBD	Kemen PUPR dan/atau Pemda								
		3)	Payalaman - Pel. Roro	Kabupaten Kepulauan Anambas	APBN, dan / atau APBD	Kemen PUPR dan/atau Pemda								
			Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan											
		2	Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan terminal barang	Letung	APBN, APBD , dan sumber lain yang sah	Kemenhub, Pemda, dan/atau Masyarakat								
			Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan terminal barang											
			Sistem Jaringan Transpotasi Penyeberangan											
			Pelabuhan Penyeberangan											
			Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan Pelabuhan Kelas I											
		1)	Pelabuhan Pulau Letung	Kecamatan Jemaja pada Kabupaten Kepulauan Anambas	APBN, APBD , dan sumber lain yang sah	Kemenhub, Pemda, dan Masyarakat								
		2)	Pelabuhan Matak	Kecamatan Palmatak pada Kabupaten Kepulauan Anambas	APBN, APBD , dan sumber lain yang sah	Kemenhub, Pemda, dan/atau Masyarakat								
			Sistem Jaringan Transportasi Laut											
			Pelabuhan Laut											
			Pelabuhan Laut Yang Melayani Angkutan Laut											
			Pemantapan pelabuhan pengumpul											
		3	Pemantapan pelabuhan pengumpul											
		1)	Pelabuhan Tarempa	Kecamatan Siantan pada Kabupaten Kepulauan Anambas	APBN, APBD , dan sumber lain yang sah	Kemenhub, Pemda, dan/atau Masyarakat								
			Pelabuhan untuk kegiatan pertahanan dan keamanan											
		4	Peningkatan dan/atau pemantapan pelabuhan untuk kegiatan pertahanan dan keamanan											
		1)	Lanal Tarempa	Kecamatan Siantan pada Kabupaten Kepulauan Anambas	APBN, dan / atau APBD	Kemenhan, TNI, dan/atau Pemda							Pada indikasi program termuat di Pemertahanan wilayah pertahanan dan pengembangan prasarana dan sarana pendukungnya	
		2)	Posal Mangkai	Kecamatan Jemaja Barat pada Kabupaten Kepulauan Anambas	APBN, dan / atau APBD	Kemenhan, TNI, dan/atau Pemda							Pada indikasi program termuat di Pemertahanan wilayah pertahanan dan pengembangan prasarana dan sarana pendukungnya	
		4)	Posmat Jemaja	Kecamatan Jemaja Barat pada Kabupaten Kepulauan Anambas	APBN, dan / atau APBD	Kemenhan, TNI, dan/atau Pemda							Pada indikasi program termuat di Pemertahanan wilayah pertahanan dan pengembangan prasarana dan sarana pendukungnya	
		5)	Posmat Letung	Kecamatan Jemaja Barat pada Kabupaten Kepulauan Anambas	APBN, dan / atau APBD	Kemenhan, TNI, dan/atau Pemda							Pada indikasi program termuat di Pemertahanan wilayah pertahanan dan pengembangan prasarana dan sarana pendukungnya	

		6) Posal Mengkait	Kecamatan Siantan Selatan pada Kabupeten Kepulauan Anambas	APBN, dan / atau APBD	Kemenhan, TNI, dan/atau Pemda						Pada indikasi program termuat di Pemertahanan wilayah pertahanan dan pengembangan prasarana dan sarana pendukungnya
		7) Posal Memperuk	Kecamatan Siantan Selatan pada Kabupeten Kepulauan Anambas	APBN, dan / atau APBD	Kemenhan, TNI, dan/atau Pemda						Pada indikasi program termuat di Pemertahanan wilayah pertahanan dan pengembangan prasarana dan sarana pendukungnya
		5 Peningkatan dan/atau pemantapan bandar udara pemuatan	Kecamatan Jemaja Timur pada Kabupeten Kepulauan Anambas	APBN, APBD , dan sumber lain yang sah	Kemenhub, Pemda, dan/atau Masyarakat						
		1) Bandar Udara Letung									
		8.2 Sistem Jaringan Energi									
		1 Pembangunan depo minyak dan gas bumi	Pos pengamanan perbatasan yang berada di Kecamatan Jemaja Barat, Kecamatan Jemaja dan Kecamatan Siantan Selatan pada Kabupeten Kepulauan Anambas	APBN, APBD , dan sumber lain yang sah							
		2 Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pembangkitan tenaga listrik									
		1) Mobile Power Plant (MPP)	PKSN Tarempa		Kern ESOM, Kern BUMN, Pemda, dan/atau Masyarakat						
		8.3 Sistem Jaringan Telekomunikasi									
		1 Pembangunan dan/atau pemantapan jaringan tetap									
		Sentra Telepon Otomat (STO)	PKSN Tarempa	APBN, APBD, dan sumber lain yang sah	Kemenkominfo, Pemda, dan/atau Masyarakat						
		2 Pembangunan dan/atau pemantapan jaringan bergerak									
		Jaringan Tersier									
		1) Jaringan Pelayanan Pengumpan (Feeder) di Pulau-pulau Timur Sumatera	PKSN Tarempa dan Letung	APBN, APBD , dan sumber lain yang sah	Kemenkominfo, Pemda, dan/atau Masyarakat						
		8.4 Sistem Jaringan Sumber Daya Air									
		Sumber Air									
		1 Peningkatan pengelolaan sumber air permukaan pada danau									
		1) Danau	a. Kecamatan Jemaja, Kecamatan Jemaja Timur, Kecamatan Siantan Selatan, dan Kecamatan Siantan Utara pada Kabupeten Kepulauan Anambas	APBN, APBD, dan sumber yang sah	Kern PUPR, Pemda, dan Masyarakat						
		2 Pembangunan dan / atau pemantapan prasarana Sumber Air									
		1. Sistem pengendalian banjir	a. Kecamatan Siantan di kabupaten kepulauan anambas	APBN, dan / atau APBD	Kern PUPR, dan / atau Pemda						
		2. Sistem pengamanan pantai pada pusat pelayanan Kawasan Perbatasan Negara	a. PKSN Tarempa, Letung, dan serasan	APBN, dan / atau APBD	Kern PUPR, dan / atau Pemda						

Perpres RI No 43 Tahun 2020

Perpres RI No 43 Tahun 2020															
No	DAERAH	NOMOR PEMBANGUNAN	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN		INSTANSI PELAKSANA		WAKTU PELAKSANA					FOTO & KETERANGAN	
									I	II	III	IV	V		
									2025	2026	2027	2028	2029		
TARGET										REALISASI					
3	KAB KARIMUN		1	PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG											
			A	Sistem Pusat Permukiman											
			A.3	Percepatan pengembangan pusat pelayanan pintu gerbang											
			1	Penyusunan dan penetapan RDTR	Tanjung Balai di Kecamatan Karimun dan Kecamatan Tebing pada Kabupaten Karimun	APBN		Kemen ATR/BPN							
			2	Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat kegiatan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan	Tanjung Balai di Kecamatan Karimun dan Kecamatan Tebing pada Kabupaten Karimun			Kementan, BNPP, TNI, POLRI, dan/atau Pemda							
			3	Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara	Tanjung Balai di Kecamatan Karimun dan Kecamatan Tebing pada Kabupaten Karimun	APBN dan APBD		Kemenhan, TNI, POLRI, dan Pemda							
			4	Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan prasarana dan sarana transportasi	Tanjung Balai di Kecamatan Karimun dan Kecamatan Tebing pada Kabupaten Karimun	APBN dan/atau APBD		Kemen PUPR, Kemenhub, dan/atau Pemda							
			5	Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan pusat kegiatan perdagangan dan jasa	Tanjung Balai di Kecamatan Karimun dan Kecamatan Tebing pada Kabupaten Karimun	APBN, APBD, dan / atau sumber lain yang sah		Kemendag, Pemda, dan/atau Masyarakat							
			6	Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemtapan pusat kegiatan promosi pariwisata dan komoditas unggulan berbasis potensi lokal	Tanjung Balai di Kecamatan Karimun dan Kecamatan Tebing pada Kabupaten Karimun	APBN, APBD, dan / atau sumber lain yang sah		Kemenparekraf, Pemda, dan/atau Masyarakat							
			7	Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan prasarana dan sarana pelayanan tenaga listrik, telekomunikasi, informatika, dan penyiaran, fasilitas sosial, serta fasilitas umum	Tanjung Balai di Kecamatan Karimun dan Kecamatan Tebing pada Kabupaten Karimun	APBN, APBD, dan / atau sumber lain yang sah		Kemen ESDM, Kemenkominfo, Kemen PUPR, Pemda, dan/atau Masyarakat							
			8	Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan prasarana dan sarana air minum, jaringan air limbah, drainase, dan pengelolaan sampah	Tanjung Balai di Kecamatan Karimun dan Kecamatan Tebing pada Kabupaten Karimun	APBN, APBD, dan / atau sumber lain yang sah		Kemen PUPR, Pemda, dan/atau Masyarakat							
			B	Sistem Jaringan Prasarana											
			B.1	Sistem Jaringan Transportasi											
				Sistem Transportasi Darat											
				Sistem Jaringan Jalan											
			2	Pembangunan, Peningkatan, dan / atau pemantapan jaringan jalan arteri primer											
			1)	Tg. Balai - Meral	Kabupaten Karimun	APBN dan/atau APBD		Kemen PUPR dan/atau Pemda							
			2)	Meral - Parit Rampak	Kabupaten Karimun	APBN dan/atau APBD		Kemen PUPR dan/atau Pemda							
			3)	Parit Rampak - Parit Benut	Kabupaten Karimun	APBN dan/atau APBD		Kemen PUPR dan/atau Pemda							
			4)	Parit Benut - Sp. Jeletung	Kabupaten Karimun	APBN dan/atau APBD		Kemen PUPR dan/atau Pemda							
			5)	Sp. J. eletung - Pasir Panjang	Kabupaten Karimun	APBN dan/atau APBD		Kemen PUPR dan/atau Pemda							
			6)	Parit Rampak - Pelabuhan Roro	Kabupaten Karimun	APBN dan/atau APBD		Kemen PUPR dan/atau Pemda							
				Sistem Jaringan Trasnportasi Penyeberangan											
				Pelabuhan Penyeberangan											
			3	Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan Pelabuhan Kelas I											
			1)	Pelabuhan Tanjung Balai Karimun	Kecamatan Karimun pada Kabupaten Karimun	APBN, APBD, dan / atau sumber lain yang sah		Kemenhub, Pemda, dan/atau Masyarakat							
			4	Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan Lintas Penyeberangan Antarnegara											
			1)	Tanjung Balai (Indonesia) - Johor (Malaysia)	Selat Phillip dan Selat Malaka	APBN, APBD, dan / atau sumber lain yang sah		Kemenhub, Pemda, dan/atau Masyarakat							
			5	Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan Lintas Penyeberangan Antarprovinsi											
			1)	Karimun (Kepri) - Mangkapan (Riau)	Selat Malaka	APBN, APBD, dan / atau sumber lain yang sah		Kemenhub, Pemda, dan/atau Masyarakat							
			2)	Mengkapan - Tj. Balai Karimun	Selat Malaka	APBN, APBD, dan / atau sumber lain yang sah		Kemenhub, Pemda, dan/atau Masyarakat							
			3)	Kampung Balak - Tj. Balai Karimun	Selat Malaka	APBN, APBD, dan / atau sumber lain yang sah		Kemenhub, Pemda, dan/atau Masyarakat							
			4)	Selat Panjang - TB Karimun	Selat Malaka	APBN, APBD, dan / atau sumber lain yang sah		Kemenhub, Pemda, dan/atau Masyarakat							
			6	Pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan Lintas Penyeberangan Antarkabupaten/kota											
			1)	TB Karimun - P. Kundur	Selat Malaka	APBN, APBD,		Kemenhub, Pemda, dan/atau Masyarakat							
				Sistem Jaringan Transportasi Laut											
				Pelabuhan Laut											
				Pelabuhan Laut Yane Melavani Anekitan Laut											

			7	Pemantapan pelabuhan pengumpul										
			1) Pelabuhan Tanjung Balai Karimun	Kecamatan Tebing pada Kabupaten Karimun	APBN, APBD, dan / atau sumber lain yang sah		Kemenhub, Pemda, dan/atau Masyarakat							
			Pelabuhan untuk kegiatan pertahanan dan keamanan											
			8	Peningkatan dan/atau pemantapan pelabuhan untuk kegiatan pertahanan dan keamanan										
			1) Lanal Tanjung Balai Karimun	Kecamatan Karimun pada Kabupaten Karimun	APBN dan/atau APBD		Kemenhan, TNI, dan/atau Pemda		APBN		-	-	-	Kondisi 65%
			2) Posal Takong Hiyu	Kecamatan Tebing pada Kabupaten Karimun	APBN dan/atau APBD		Kemenhan, TNI, dan/atau Pemda		APBN	-	-	-	-	Kondisi 60%
			3) Posal Leho	Kecamatan Tebing pada Kabupaten Karimun	APBN dan/atau APBD		Kemenhan, TNI, dan/atau Pemda		Belum Ada	-	-	-	-	Belum Adanya Pelabuhan Permanen
			4) Posmat Buru	Kecamatan Buru pada Kabupaten Karimun	APBN dan/atau APBD		Kemenhan, TNI, dan/atau Pemda		APBN	-	-	-	-	Belum Adanya Pelabuhan Permanen
			5) Posal Moro	Kecamatan Moro pada Kabupaten Karimun	APBN dan/atau APBD		Kemenhan, TNI, dan/atau Pemda		APBN	-	-	-	-	Belum Adanya Pelabuhan Permanen
			6) Posal Pulau Sugi	Kecamatan Moro pada Kabupaten Karimun	APBN dan/atau APBD		Kemenhan, TNI, dan/atau Pemda		Belum Ada	-	-	-	-	Belum Adanya Pelabuhan Permanen
			Sistem Jaringan Transportasi Udara											
			9	Peningkatan dan/atau pemantapan bandar udara pengumpan										
			1) Bandar Udara Seibati (Raja Haji Abdullah)	Kecamatan Tebing pada Kabupaten Karimun	APBN, APBD, dan / atau sumber lain yang sah		Kemenhub, Pemda, dan/atau Masyarakat							

No	DAERAH	NOMOR PEMBANGUNAN	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN		INSTANSI PELAKSANA		WAKTU PELAKSANA					FOTO & KETERANGAN
									I 2025	II 2026	III 2027	IV 2028	V 2029	
2.	KOTA BATAM		1. PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG											
			A Sistem Pusat Permukiman											
			A.1 Percepatan pengembangan pusat pelayanan utama											
			1	PKSN Batam di Kota Batam	APBD		Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kemen ATR / BPN)		-	-	-	-	-	
			2	PKSN Batam di Kota Batam	APBN dan / atau APBD		Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri)		-	-	-	-	-	
			3	PKSN Batam di Kota Batam	APBN dan / atau APBD		Kemenhan, TNI, Polri, dan pemda		-	-	-	-	-	
			4	PKSN Batam di Kota Batam	APBN dan / atau APBD		Kemendagri dan / atau Pemda		-	-	-	-	-	
			5	PKSN Batam di Kota Batam	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah		Kementrian Perdagangan (Kemendag), Pemda dan / atau Masyarakat		-	-	-	-	-	
			6	PKSN Batam di Kota Batam	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah		Kemenperin, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pemda, dan atau Masyarakat		-	-	-	-	-	
			7	PKSN Batam di Kota Batam	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah		Kemendikbud, Kemenag, Pemda, dan / atau Masyarakat		-	-	-	-	-	
			8	PKSN Batam di Kota Batam	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah		Kemenkes, Pemda, dan / atau, Masyarakat		-	-	-	-	-	
			9	PKSN Batam di Kota Batam	APBN dan / atau APBD		Kemen PUPR, Kemenhub, dan / atau Pemda		-	-	-	-	-	
			10	PKSN Batam	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah		Kemenperin, Kemenag, pemda, dan / atau Masyarakat		-	-	-	-	-	
			11	PKSN Batam di Kota Batam	BP Batam, loan luar negeri		Kemen ESDM, Kemenkominfo, Kemen PUPR, Pemda, dan / atau Masyarakat		-	-	-	-	-	
			8 Sistem Jaringan Prasarana											
			B.1 Sistem Jaringan Transportasi											
			Sistem Jaringan Transportasi Darat											
			Sistem Jaringan Jalan											
			1 Pembangunan, Peningkatan, Dan / Atau Pemantapan Jaringan Jalan Ateri Primer											
			1) Batam Centre - Sp. Franky (Jl. A. Yani)	Kota Batam	APBN dan / atau APBD		Kemen PUPR, dan / atau Pemda		-	-	-	-	-	
			2) Sp. Franky - Sp. Kabil (Jl. A. Yani)	Kota Batam	APBN dan / atau APBD		Kemen PUPR, dan / atau Pemda		-	-	-	-	-	
			3) Sp. Kabil - Muka Kuning (Jl. A. Yani)	Kota Batam	APBN dan / atau APBD		Kemen PUPR, dan / atau Pemda		-	-	-	-	-	
			4) Muka Kuning - Tambesi (Jl. Letjen Suprpto)	Kota Batam	APBN dan / atau APBD		Kemen PUPR, dan / atau Pemda		-	-	-	-	-	
			5) Tambesi - Batu Aji (Jl. Letjen Suprpto)	Kota Batam	APBN dan / atau APBD		Kemen PUPR, dan / atau Pemda		-	-	-	-	-	
			6) Batu Aji - Tanjung Uncang	Kota Batam	APBN dan / atau APBD		Kemen PUPR, dan / atau Pemda		-	-	-	-	-	
			7) Tambesi - Tanjung Berikat	Kota Batam	APBN dan / atau APBD		Kemen PUPR, dan / atau Pemda		-	-	-	-	-	
			8) Sp. Kabil - Sp. Jam	Kota Batam	APBN dan / atau APBD		Kemen PUPR, dan / atau Pemda		-	-	-	-	-	
			9) Sp. Jam - Sei Harapan	Kota Batam	APBN dan / atau APBD		Kemen PUPR, dan / atau Pemda		-	-	-	-	-	
			10) Sei Harapan - Sekupang	Kota Batam	APBN dan / atau APBD		Kemen PUPR, dan / atau Pemda		-	-	-	-	-	
			11) Sp. Kabil - Sp. Punggur	Kota Batam	APBN dan / atau APBD		Kemen PUPR, dan / atau Pemda		-	-	-	-	-	
			12) Sp. Punggur - Batu Besar	Kota Batam	APBN dan / atau APBD		Kemen PUPR, dan / atau Pemda		-	-	-	-	-	
			13) Batu Besar - Nongsa	Kota Batam	APBN dan / atau APBD		Kemen PUPR, dan / atau Pemda		-	-	-	-	-	
			14) Sp. Punggur - Telaga Punggur	Kota Batam	APBN dan / atau APBD		Kemen PUPR, dan / atau Pemda		-	-	-	-	-	
			16) Jl. Diponegoro - Sp. Basecamp Batu Aji	Kota Batam	APBN dan / atau APBD		Kemen PUPR, dan / atau Pemda		-	-	-	-	-	
			17) Jl. Duyung - Sp. Baloi Centre	Kota Batam	APBN dan / atau APBD		Kemen PUPR, dan / atau Pemda		-	-	-	-	-	
			18) Baloi Centre - Sp. Sei Ladi	Kota Batam	APBN dan / atau APBD		Kemen PUPR, dan / atau Pemda		-	-	-	-	-	
			2	Pembangunan, Peningkatan Dan / Atau Pemantapan Jaringan Jalan Bebas Hambatan										
			1) Batu Ampar - Muka Kuning - Bandara Hang Nadim	Kota Batam	APBN dan / atau APBD		Kemen PUPR, dan / atau Pemda		-	-	-	-	-	
				Sistem Jaringan transportasi penyebrangan										
				Pelabuhan penyebrangan										

		3	Pembangunan, peningkatan dan / atau pemantapan Pelabuhan Kelas I											
			1) Pelabuhan Telaga Punggur	Kecamatan Nongsa pada Kota Batam	APBN, APBD, dan / atau sumber lain yang sah		Kemenhub, Pemda, dan / atau Masyarakat		-	-	-	-	-	Pelabuhan penumpang dan roro : BP Batam
			Sistem Jaringan Transportasi Laut											
			Pelabuhan Laut											
			Pelabuhan Laut Yang Melayani Angkutan Laut											
		4	Pemantapan Pelabuhan Utama											
			1) Pelabuhan Batam / Batu Ampar	Kecamatan Batu Ampar pada Kota Batam	APBN, APBD, dan / atau sumber lain yang sah		Kemenhub, Pemda, dan / atau Masyarakat		-	-	-	-	-	BP Batam
		5	Pemantapan Pelabuhan Pengumpul											
			1) Pelabuhan Pulau Sambu	Kecamatan Belakang Padang pada Kota Batam	APBN, APBD, dan / atau sumber lain yang sah		Kemenhub, Pemda, dan / atau Masyarakat		-	-	-	-	-	PT Pertamina (persero)
			Pelabuhan untuk kegiatan pertahanan dan keamanan											
		6	Peningkatan dan / atau pemantapan pelabuhan untuk kegiatan pertahanan dan keamanan											
			1) Lanal Kota Batam		APBN		Kementerian Pertahanan dan/atau TNI		-	-	-	-	-	Pelaksanaan 2023-2024 Sumber : Lampiran. Perpres no.1 2024
				Kecamatan Batu Ampar pada Kota Batam	APBN		Kementerian Pertahanan dan/atau TNI		-	-	-	-	-	Pelaksanaan 2023-2024 Sumber : Lampiran. Perpres no.1 2024
			2) Posal Pulau Nipa		APBN		Kementerian Pertahanan dan/atau TNI		-	-	-	-	-	Pelaksanaan 2023-2024 Sumber : Lampiran. Perpres no.1 2024
				Kecamatan Belakang Padang Kota Batam	APBN		Kementerian Pertahanan dan/atau TNI		-	-	-	-	-	Pelaksanaan 2023-2024 Sumber : Lampiran. Perpres no.1 2024
			3) Posal Tolop		APBN		Kementerian Pertahanan dan/atau TNI		-	-	-	-	-	Pelaksanaan 2023-2024 Sumber : Lampiran. Perpres no.1 2024
				Kecamatan Belakang Padang Kota Batam	APBN		Kementerian Pertahanan dan/atau TNI		-	-	-	-	-	Pelaksanaan 2023-2024 Sumber : Lampiran. Perpres no.1 2024
			4) Posal Sambu		APBN		Kementerian Pertahanan dan/atau TNI		-	-	-	-	-	Pelaksanaan 2023-2024 Sumber : Lampiran. Perpres no.1 2024
				Kecamatan Belakang Padang Kota Batam	APBN		Kementerian Pertahanan dan/atau TNI		-	-	-	-	-	Pelaksanaan 2023-2024 Sumber : Lampiran. Perpres no.1 2024
			5) posal Sengkuang (Radar IMSS)		APBN		Kementerian Pertahanan dan/atau TNI		-	-	-	-	-	Pelaksanaan 2023-2024 Sumber : Lampiran. Perpres no.1 2024
				Kecamatan Batu Ampar pada Kota Batam	APBN		Kementerian Pertahanan dan/atau TNI		-	-	-	-	-	Pelaksanaan 2023-2024 Sumber : Lampiran. Perpres no.1 2024
			6) Posal Telaga Punggur		APBN		Kementerian Pertahanan dan/atau TNI		-	-	-	-	-	Pelaksanaan 2023-2024 Sumber : Lampiran. Perpres no.1 2024
				Kecamatan Nongsa Kota Batam	APBN		Kementerian Pertahanan dan/atau TNI		-	-	-	-	-	Pelaksanaan 2023-2024 Sumber : Lampiran. Perpres no.1 2024

		TARGET		REALISASI										
No	DAERAH	NOMOR PEMBANGUNAN	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN		INSTANSI PELAKSANA		WAKTU PELAKSANA					FOTO & KETERANGAN
									I 2025	II 2026	III 2027	IV 2028	V 2029	
1	KABUPATEN BINTAN	1	Penyusunan dan penetapan RDTR	Tanjung Uban di Kecamatan Bintan Utara dan Kecamatan Telok Sebong pada Kabupaten Bintan			PUPR							Dilaksanakan tahun 2021
		2	Pembangunan, Peningkatan, dan / atau pemantapan pusat kegiatan kepabeanaan, imigrasi, karantina, dan keamanan	Tanjung Uban di Kecamatan Bintan Utara dan Kecamatan Telok Sebong pada Kabupaten Bintan			Kementrian, BNPP, TNI, Polri, dan / atau Pemda		V					
		3	Pembangunan, peningkatan, dan / atau pemantapan pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara	Tanjung Uban di Kecamatan Bintan Utara dan Kecamatan Telok Sebong pada Kabupaten Bintan	APBN dan APBD				V					
		4	Pembangunan, peningkatan, dan / atau pemantapan prasarana atau sarana transportasi	Tanjung Uban di Kecamatan Bintan Utara dan Kecamatan Telok Sebong pada Kabupaten Bintan	APBN dan / atau APBD		Kemenhan, TNI, Polri, dan Pemda		V					
		5	Pembangunan, peningkatan, dan / atau pemantapan pusat kegiatan perdagangan dan jasa	Tanjung Uban di Kecamatan Bintan Utara dan Kecamatan Telok Sebong pada Kabupaten Bintan	sumber lain yang sah		Kemen PUPR, Kemenhub, dan / atau Pemda Masyarakat		V					
		6	Pembangunan, peningkatan, dan / atau pemantapan pusat kegiatan promosi pariwisata dan komoditas unggulan berbasis potensi lokal	Tanjung Uban di Kecamatan Bintan Utara dan Kecamatan Telok Sebong pada Kabupaten Bintan	APBN, APBD, dan / atau sumber lain yang sah				V					
		7	Pembangunan, peningkatan, dan / atau pemantapan prasarana dan sarana pelayanan tenaga listrik, telekomunikasi, informatika, dan penyiaran, fasilitas sosial, serta fasilitas umum	Tanjung Uban di Kecamatan Bintan Utara dan Kecamatan Telok Sebong pada Kabupaten Bintan	APBN, APBD, dan / atau sumber lain yang sah		Kemenparekraf, Pemda, dan / atau Masyarakat			V				
		8	Pembangunan, peningkatan, dan / atau pemantapan prasarana dan sarana air minum, jaringan air limbah, drainase, dan pengelolaan sampah	Tanjung Uban di Kecamatan Bintan Utara dan Kecamatan Telok Sebong pada Kabupaten Bintan			Kemen ESDM, Kemenkominfo, Kemen PUPR, Pemda, dan / atau Masyarakat		V					
		B	Sistem Jaringan Prasarana											
		B.1	Sistem Jaringan Transportasi											
			Sistem Jaringan Prasarana											
			Sistem Jaringan Transportasi											
		1	Pembangunan, Peningkatan, dan / atau pemantapan jaringan jalan arteri primer											
			1) Sp. Lobam - Tanjung Uban	Kabupaten Bintan	APBN, dan / atau APBD					V				
			1) Km. 16/Sp. Gesek - Gesek	Kabupaten Bintan	APBN, dan / atau APBD									
			2) Gesek - Kangka	Kabupaten Bintan	APBN, dan / atau APBD									
			3) Kangka - Sialang	Kabupaten Bintan	APBN, dan / atau APBD									
			4) Sialang - Sp. Pengudang	Kabupaten Bintan	APBN, dan / atau APBD									
			5) Sp. Pengudang - Sp. Lagoi	Kabupaten Bintan	APBN, dan / atau APBD									
			Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan											
		3	Pembangunan, Peningkatan, dan / atau pemantapan terminal barang											
			Pembangunan, peningkatan, dan / atau											
		4	1) Pelabuhan Tanjung Uban	Kecamatan Bintan Utara pada Kabupaten Bintan										
			Pelabuhan untuk kegiatan pertahanan dan											
		5	Peningkatan dan / atau pemantapan pelabuhan											
				Kecamatan Bintan Utara pada Kabupaten Bintan	APBN dan / atau APBD								Kemenha n, TNI, dan / atau Pemda	
			1) Fasarkan Mentigi	Kecamatan telok Sebong pada Kabupaten Bintan	APBN dan / atau APBD								Kemenha n, TNI, dan / atau Pemda	
			2) Posal Lagoi	Kecamatan telok Sebong pada Kabupaten Bintan	APBN dan / atau APBD								Kemenha n, TNI, dan / atau Pemda	
			3) Posal Berakit	Kecamatan Gunung Kijang pada Kabupaten Bintan	APBN dan / atau APBD								Kemenha n, TNI, dan / atau Pemda	
				Kecamatan Gunung Kijang pada Kabupaten Bintan	APBN dan / atau APBD								Kemenha n, TNI, dan / atau Pemda	
				Kecamatan Gunung Kijang pada Kabupaten Bintan	APBN dan / atau APBD								Kemenha n, TNI, dan / atau Pemda	
			5) Posmat Maopor	Kecamatan Gunung Kijang pada Kabupaten Bintan	APBN dan / atau APBD								Kemenha n, TNI, dan / atau Pemda	

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	KEGIATAN	REALISASI RENAKSI	PERSENTASE (%)
Provinsi Kepulauan Riau	11	2	18,18%
Kabupaten Bintan	16	9	56,25%
Kota Batam	12	4	33,33%
Kabupaten Karimun	10	7	70,00%
Kabupaten Kepulauan Anambas	17	0	0,00%
Kabupaten Natuna	8	0	0,00%
JUMLAH	74	22	29,73%

RENCANA AKSI PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN TAHUN 2025

NO	PROGRAM/BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN	SUMBER PEMBIAYAAN	LOKASI PELAKSANAAN	INSTANSI PELAKSANA	REALISASI
1	Pembangunan Mako lanal Bintan dan Sarpras Tahun Jamak Tahun II (Tahun 2024 dan 2025)	1	Kegiatan	13.016.203.000	APBN	Kepulauan Riau	TNI	
2	Pengadaan Alkomlek Posal Nipa	1	Kegiatan	805.100.000	APBN	Kepulauan Riau	TNI	
3	Fasilitasi Pemberdayaan dan Pembinaan Aparatur	1	Paket	331.661.000	APBN	Kepulauan Riau	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	
4	Pelaksanaan Orientasi Pra Pemberangkatan (OPP) PMI Non Pemerintah	1235	Orang	148.200.000	APBN	Kepulauan Riau	Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia	
5	Penanganan PMI Bermasalah, Sakit, dan Meninggal	750	Orang	3.040.548.000	APBN	Kepulauan Riau	Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia	
6	Fasilitasi Bimbingan Teknis dan Pendampingan Kewirausahaan Industri Kecil dan Menengah	108	Industri	561.822.000	APBN	Kepulauan Riau	Kementerian Perindustrian	
7	Pengembangan Produk Melalui Diversifikasi/ Pendaftaran HKI/Merk/Desain Kemasan/Fasilitasi dalam rangka OVOP	94	Industri	584.753.000	APBN	Kepulauan Riau	Kementerian Perindustrian	
8	Pelatihan UMKM	2776	UMKM	10.356.245.000	DAK Non Fisik	Kepulauan Riau	Kementerian Usaha, Kecil, dan Menengah	
9	Fasilitasi Pendamping Kapasitas Usaha	34	Pendamping	1.698.480.000	DAK Non Fisik	Kepulauan Riau	Kementerian Usaha, Kecil, dan Menengah	
10	Fasilitasi Inkubasi Usaha	50	Inkubasi	1.000.000.000	DAK Non Fisik	Kepulauan Riau	Kementerian Usaha, Kecil, dan Menengah	
11	Tenaga Pendamping Data	8	Pendamping	325.200.000	DAK Non Fisik	Kepulauan Riau	Kementerian Usaha, Kecil, dan Menengah	
12	Pekarangan Hortikultura	3	Kelompok	37.902.048	APBN	Bintan	Kementerian Pertanian	
13	Kawasan Ubi jalar	3	Ha	8.640.000	APBN	Bintan	Kementerian Pertanian	
14	Perluasan Tanaman Kopi Robusta	50	Ha	800.000.000	APBN	Bintan	Kementerian Pertanian	
15	Pemeliharaan Kebun Induk Tanaman Kelapa Tahun 6	5	Ha	73.500.000	APBN	Bintan	Kementerian Pertanian	Terealisasi
16	Program Keluarga Harapan (PKH)	3557	KPM	7.013.369.992	APBN	Bintan	Kementerian Sosial	Terealisasi
17	Fasilitasi Pendamping Kapasitas Usaha	4	Pendamping	170.400.000	DAK Non Fisik	Bintan	Kementerian Usaha, Kecil, dan Menengah	
18	Fasilitasi Inkubasi Usaha	25	Inkubasi	500.000.000	DAK Non Fisik	Bintan	Kementerian Usaha, Kecil, dan Menengah	
19	Pelatihan UMKM	678	UMKM	2.803.100.000	DAK Non Fisik	Bintan	Kementerian Usaha, Kecil, dan Menengah	
20	Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	2148	KPM	5.155.200.000	APBN	Bintan	Kementerian Sosial	Terealisasi

21	Penguatan Puskesmas- IPAL, Puskesmas Kelong	1	Paket	630.000.000	DAK	Bintan Pesisir	Kementerian Kesehatan	Terealisasi
22	Pengembangan Sumber Daya Tenaga Kelistrikan	1	Paket	8.912.847.332	APLN	Bintan Pesisir	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	
23	Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE), Perlengkapan dan bahan pembelajaran, TK NUMBING JAYA	1	Paket	51.188.000	DAK	Bintan Pesisir	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	Terealisasi
24	Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah, Desa Sebung Lagoi	200	SR	2.583.867.875	DAK	Teluk Sebung	Kementerian Pekerjaan Umum	Terealisasi

25	Pengadaan peralatan laboratorium ilmu pengetahuan alam (IPA), SMP NEGERI 8 BINTAN	1	Paket	55.911.366	DAK	Teluk Sebong	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	Terealisasi
26	Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE), Perlengkapan dan bahan pembelajaran, TK PEDESAAN GUNUNG KIJANG	1	Paket	51.188.000	DAK	Gunung Kijang	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	Terealisasi
27	Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE), Perlengkapan dan bahan pembelajaran, TK PUJI	1	Paket	51.188.000	DAK	Bintan Utara	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	Terealisasi
28	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat	3	Orang	53.000.000	APBN	Kota Batam	Kementerian Kehutanan	
29	Pembangunan <i>Flat Type 45</i> (1 Tower) Lantamal IV batam dan Sarpras	1	Kegiatan	21.294.000.000	APBN	Batam/Kepulauan Riau	TNI	
30	Peningkatan Perlindungan dan Pengamanan di Kawasan Suaka Alam (KSA),	8000	Kelompok Masyarakat	981.000.000	APBN	Kota Batam	Kementerian Kehutanan	
31	Pengendalian kebakaran di Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB)	802	Ha	200.000.000	APBN	Kota Batam	Kementerian Kehutanan	
32	Pelatihan UMKM	204	UMKM	693.960.000	DAK Non Fisik	Kota Batam	Kementerian Usaha, Kecil, dan Menengah	
33	Fasilitasi Pendamping Kapasitas Usaha	2	Pendamping	95.040.000	DAK Non Fisik	Kota Batam	Kementerian Usaha, Kecil, dan Menengah	
34	Kenduri Seni Melayu	1	Kegiatan	150.000.000	APBN	Kota Batam	Kementerian Pariwisata	
35	Program Keluarga Harapan (PKH)	18357	KPM	35.155.900.612	APBN	Kota Batam	Kementerian Sosial	Terealisasi
36	Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	17262	KPM	41.428.800.000	APBN	Kota Batam	Kementerian Sosial	Terealisasi
37	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan minimal 25 KK, Desa Pulau Terong	25	Unit	622.500.000	DAK	Belakang Padang	Kementerian Pekerjaan Umum	Terealisasi
38	Pengadaan peralatan laboratorium ilmu pengetahuan alam (IPA), SMP NEGERI 2 BATAM	1	Paket	54.150.000	DAK	Belakang Padang	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	Terealisasi
39	Pengembangan Sumber Daya Tenaga Kelistrikan	1	Paket	52.157.774.517	APLN	Belakang Padang	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	
40	Pekarangan Hortikultura	3	Kelompok	37.902.048	APBN	Karimun	Kementerian Pertanian	
41	Kawasan Ubi Jalar	3	Ha	8.640.000	APBN	Karimun	Kementerian Pertanian	
42	Pemeliharaan Kebun Induk Tanaman Cengkeh Tahun 7	1	Ha	9.234.000	APBN	Karimun	Kementerian Pertanian	
43	Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE), Perlengkapan dan bahan pembelajaran, TK	1	Paket	47.565.000	DAK	Karimun	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	Terealisasi
44	Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE), Perlengkapan dan bahan pembelajaran, TK Vidya Sasana	1	Paket	47.565.000	DAK	Karimun	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	Terealisasi

45	Program Keluarga Harapan (PKH)	6171	KPM	12.361.061.448	APBN	Karimun	Kementerian Sosial	Terealisasi
46	Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	5120	KPM	12.288.000.000	APBN	Karimun	Kementerian Sosial	Terealisasi
47	Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE), Perlengkapan dan bahan pembelajaran, TK Mekar Sari	1	Paket	47.565.000	DAK	Tebing	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	Terealisasi
48	Pelapisan Runway Bandar Udara Raja Haji Abdullah (SBSN)	1	Paket	3.500.000.000	SBSN	Tebing	Kementerian Perhubungan	Terealisasi
49	Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE), Perlengkapan dan bahan pembelajaran, TK AS SALAM	1	Paket	47.565.000	DAK	Tebing	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	Terealisasi
50	Pekarangan Hortikultura	3	Kelompok	37.902.048	APBN	Kepulauan Anambas	Kementerian Pertanian	
51	Kawasan Ubi Jalar	3	Ha	8.640.000	APBN	Kepulauan Anambas	Kementerian Pertanian	
52	Pemeliharaan Kebun Induk Tanaman Pala Tahun 7	1	Ha	10.786.000	APBN	Kepulauan Anambas	Kementerian Pertanian	
53	Program Keluarga Harapan (PKH)	940	KPM	1.905.767.880	APBN	Kepulauan Anambas	Kementerian Sosial	
54	Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	1106	KPM	2.654.400.000	APBN	Kepulauan Anambas	Kementerian Sosial	
55	Pembangunan Jalan Nasional Simpang Rintis - Konjo (P Siantan)	5	Km	0	APBN	Anambas/Kepulauan Riau	Kementerian Pekerjaan Umum	
56	Penguatan Puskesmas-Ambulans/Pusling Roda 4/Pusling Perairan, Puskesmas Jemaja Barat	1	Paket	2.400.000.000	DAK	Jemaja Barat	Kementerian Kesehatan	
57	Penguatan Puskesmas Pembantu-Pembangunan baru, Pustu Batu Berapit	1	Paket	715.670.728	DAK	Jemaja	Kementerian Kesehatan	
58	Pengembangan Sumber Daya Tenaga Kelistrikan	1	Paket	452.240.145	APLN	Jemaja	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	
59	Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE), Perlengkapan dan bahan pembelajaran, TK NEGERI 1 SIANTAN SELATAN	1	Paket	48.000.000	DAK	Siantan Selatan	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	
60	Pengadaan peralatan laboratorium ilmu pengetahuan alam (IPA), SMPN 4 GENTING	1	Paket	57.000.000	DAK	Siantan Selatan	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	
61	Pengadaan peralatan laboratorium ilmu pengetahuan alam (IPA), SMPN 6 LINGAI	1	Paket	57.000.000	DAK	Siantan Selatan	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	
62	Pengadaan peralatan laboratorium ilmu pengetahuan alam (IPA), SMPN 2 BAYAT	1	Paket	57.000.000	DAK	Siantan Utara	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	
63	Rehabilitasi Fasilitas Pelabuhan Midai UPP Tarempa	1	Paket	20.929.985.000	SBSN	Siantan	Kementerian Perhubungan	
64	Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE), Perlengkapan dan bahan pembelajaran, TK NEGERI 1 KUTE SIANTAN	1	Paket	48.000.000	DAK	Kute Siantan	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	

65	Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE), Perlengkapan dan bahan pembelajaran, TK NEGERI 2 KUTE SIANTAN	1	Paket	48.000.000	DAK	Kute Siantan	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	
66	Pengadaan peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK), SDN 003 BATU AMPAR	1	Paket	103.964.000	DAK	Kute Siantan	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	
67	Sebaran Pendamping PS	3	Orang	66.035.718	APBN	Natuna	Kementerian Kehutanan	
68	Kawasan Ubi jalar	3	Ha	8.640.000	APBN	Natuna	Kementerian Pertanian	
69	Pembangunan Pengaman Pantai di Pulau Kepala, Kabupaten Natuna	1	Paket	107.000.000.000	APBN	Natuna/Kepulauan Riau	Kementerian Pekerjaan Umum	
70	Lanjutan pembangunan SKPT Natuna di Kec Pulau Tiga, yaitu pembangunan pasar ikan	1	Paket	0	DANA HIBAH	Ranai	Kementerian Kelautan dan Perikanan	
71	Pekarangan Hortikultura	3	Kelompok	37.902.048	APBN	Natuna	Kementerian Pertanian	
72	Fasilitasi Penerapan Gerakan Indonesia Sadar Adminduk (GISA)	1	Lokasi	45.000.000	APBN	Natuna	Kementerian Dalam Negeri	
73	Program Keluarga Harapan (PKH)	2189	KPM	6.174.600.000	APBN	Natuna	Kementerian Sosial	
74	Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	2729	KPM	6.549.600.000	APBN	Natuna	Kementerian Sosial	



DOKUMENTASI



**BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2025**

DOKUMENTASI

1. Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Drs. H. Doli Boniara, M.Si melakukan pertemuan dengan pemerintah singapura dan kedutaan besar Singapura di batam terkait intimidasi kapal patroli singapura terhadap nelayan kepulauan riau di perairan batam.



2. Mengikuti RAPAT PENYUSUNAN RENSTRA 2025-2029 di kantor Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau dengan ZOOMING.



3. Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Drs. H. Doli Boniara, M.Si menghadiri penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2025.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2025 ini diserahkan oleh Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad, SE, MM, kepada para Kepala OPD di lingkungan Pemprov Kepri di Balairung Wan Seri Beni, Dompak.



4. Rapat MPH simanja tahunan 2025 di ruang rapat Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepri, dipimpin langsung oleh kepala badan pengelola perbatasan daerah prov kepri Drs. H. Doli Boniara, M.Si



5. Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Prov Kepri Drs. H. Doli Boniara, M.Si menghadiri rapat terbatas Kominda 2025 antisipasi kejahatan transnasional dan ketergantungan pangan serta strategi meningkatkan pangan wilayah kepri.



6. Rapat Koordinasi Nasional Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Penyampaian Petunjuk Teknis Dekonsentrasi GWPP Tahun Anggaran 2025).



7. Rapat Internal BP2D Kepri pembahasan Evaluasi Kegiatan 2024, Penandatanganan Perjanjian Kerja Tahun 2025, dan pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025, rapat ini dipimpin langsung oleh Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Prov Kepri Drs. H. Doli Boniara, M.Si



8. Rapat BP2D Prov Kepri terkait PEMBAHASAN PAPARAN KERJA KOMISI I DPRD PROVINSI KEPRI EVALUASI TW 4 2024



9. Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Drs. H. Doli Boniara, M.Si didampingi Sekretaris, Kepala Bidang BP2D, Fungsional Madya, Dan Seluruh PPTK menghadiri Rapat Pembahasan Kerja bersama Komisi I DPRD Prov. Kepri yang dilaksanakan di graha kepri - Batam



10. Rapat konsultasi penyusunan dokumen kajian lingkungan hidup strategis, rencana pembangunan jangka menengah tahun 2025-2029



11. Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Prov Kepri hadir dalam penyerahan nelayan kepri yang ditangkap pihak APMM malaysia karena melanggar batas wilayah. Penyerahan kedua nelayan ini dilakukan di perairan perbatasan Indonesia-Malaysia dan disaksikan oleh kapal patroli dari Singapura. Penyerahan nelayan ini dihadiri oleh Konjen RI, pihak Aensi Pnguat Mitim Malaysia (APMM), Bakamla serta pihak Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.



12. Pembahasan Progres Tindak lanjut Kertas Kerja dan Usulan Baru Sosek Malindo Pada Persidangan ke-21 Tahun 2025 di Johor Malaysia.



13. Pembekalan teknis penyusunan renstra perangkat daerah tahun 2025-2029



14. Pertemuan kepala badan pengelola perbatasan daerah prov kepri dengan sestama bnpp ri bapak komjen pol makhruzi rahman



15. Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Prov Kepri Drs. H. Doli Boniara, M.Si menerima kedatangan dari BIN , terkait pembahasan progres karang singa dan isu terkait.



16. KEPALA BADAN PENGELOLA APERBATASAN DAERAH bersama BIN berkoordinasi terkait karang singa dengan kantor distrik navigasi kelas 1 tanjungpinang



17. Kepala badan pengelola perbatasan daerah bersama kabid koordinasi perencanaan dan fasilitasi kerjasama berkoordinasi dengan bakamla zona barat terkait kunjungan wagub ke karang singa



18. Rapat pembahasan Desk Penyusunan Renstra 2025 - 2029



19. Rapat koordinasi kunjungan wakil gubernur kepri dan Forkopimda ke Karang Singa



20. Kepala badan pengelola perbatasan daerah bersama stakeholder bp2d kepri mengikuti rapat pembahasan kerja LKPJ bersama DPRD provinsi kepulauan riau di gedung graha kepri, batam.



21. Kepala badan pengelola apersebatasan daerah provinsi kepulauan riau bersama jajaran forkopimda dan pemerintah provinsi kepulauan riau melaksanakan peninjauan pembangunan rambu suar di wilayah titik perbatasan indonesia, malaysia, singapura, lokasi di karang singa kabupaten bintang



22. Rapat Koordinasi Badan Pengelola APERBATASAN Daerah Provinsi Kepulauan Riau Di Bappeda Provinsi Kepulauan Riau Terkait Rancangan Awal (Ranwal) Tahun 2026



23. Kepala bidang koordinasi perencanaan dan fasilitasi kerja sama badan pengelola perbatasan daerah provinsi kepulauan riau mengikuti rapat koordinasi persiapan persidangan ke 18 sekber JKK/KK Sosek Malindo 2025 melalaui zooming.



24. Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Dalam Hal Ini Dr. Indra Bastian Tahir, S.Si.,M.E Perencana Ahli Madya Bp2d Kepri Dan Andi Amirullah, S.E Kasubag Umum Dan Kepegawaian Bp2d Kepri Menerima Kunjungan Dosen Umrah Untuk Monitoring Evaluasi Pemagangan Mahasiswa Umrah Fakultas Ilmu Pemerintahan Di Kantor Bp2d Provinsi Kepulauan Riau



25. Perencana Ahli Madya Dr. Indra Bastian Tahir, S.Si., M.E Dan Perencana Ahli Muda Rosita, S.E.,M.M Pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Menghadiri Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Di Aula Wan Seri Beni Dompak.



26. Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Beserta Stakeholder Pada BP2D Provinsi Kepri Menghadiri Rapat Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Pesisir Dan PPKT Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, Di Aula Kantor Bupati Bintan Yang Diselenggarakan Oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia Kegiatan Ini Menjadi Bagian Dalam Upaya Memperkuat Kapasitas Nelayan Diwilayah Perbatasan Sekaligus Menjaga Kedaulatan NKRI.



27. Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Bersama Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia Dan Forkopimda Kabupaten Bintan Dan Bidang Pengelolaan Batas Negara Kabupaten Bintan Mengunjungi Pulau Sentut Yang Merupakan Salah Satu Pulau Kecil Terluar/ Ppkt Yang Ada Di Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau



28. Kasubag Umum Kepegawaian Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Menerima Kunjungan Dari Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Membahas Terkait Pendataan Wajib Lhkpn 2026



29. Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Mengikuti Sosialisasi Keamanan Implementasi Tanda Tangan Elektronik Dan Akun Email Go.Id Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau



30. Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Drs.H Doli Boniara, Msi Mendampingi Kunjungan Kerja Komisi 1 DPRD Provinsi Kepulauan Riau Ke Wilayah Lokpri Wilayah Perbatasan Kecamatan Belakang Padang Kota Batam



31. Perencana Ahli Muda Dan Perencana Ahli Madya Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Menghadiri Sosialisasi Walidata Pendukung Forum Satu Data Indonesia Provinsi Kepulauan Riau



32. Perencana Ahli Muda , Perencana Ahli Pertama Dan Arsiparis Ahli Pertama Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau mengikuti sosialisasi Pelaksanaan Pergub No.8 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran



33. Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Menghadiri Rakor Mitra Perencanaan Dan Infrastruktur Di Bappeda Provinsi Kepulauan Riau



34. Perencanaan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Mengikuti Kegiatan Peran Sekretariat Forum Satu Data Dalam Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Yang Diselenggarakan Oleh Bappeda Prov Kepri



35. Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Drs. H Doli Boniara, M.Si Mendampingi Gubernur Kepulauan Riau Dalam Rangka Kunjungan Gubernur Lampung, Gubernur Jawa Tengah Dan Gubernur Maluku Utara Mengikuti Kegiatan Penandatanganan Kesepakatan Bersama Antar Provinsi Yang Digelar Di Kepulauan Riau



36. Kepala KEPALA BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH provinsi kepulauan riau Drs. h doli boniara, m.si bersama stakeholder bp2d prov kepri melakukan pertemuan bersama komisi 1 dprd provinsi kepulauan riau di graha kepri batam, pertemuan ini membahas kesiapan kepri sebagai tuan rumah sosek malindo tahun 2026



37. Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Drs. H Doli Boniara, M.Si Bersama Stakeholder Bp2d Prov Kepri Melakukan Kunjungan Ke Konsulat Jenderal Singapore Di Batam



38. PPID Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Galih Suryo Nugroho, S.Kom, Mengikuti Rapat Koordinasi Bimtek Keterbukaan Informasi Se-Provinsi Kepulauan Riau Untuk Admin PPID.



39. Bidang Koordinasi Perencanaan Dan Fasilitasi Kerja Sama Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Melaksanakan Rapat Koordinasi Antar Opd Terkait Kertas Kerja Sosek Malindo.



40. Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Melakukan Penandatanganan Kerjasama Dengan Kjri Johor Bahru Malaysia Tentang Informasi Pelayanan Atau Pengaduan Di Kjri Johor Bahru Bernama Ksatria Siap Menjawab 24 Jam



41. Kepala Bidang Koordinasi Perencanaan Dan Fasilitasi Kerja Sama Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Melakukan Renew Banner Ksatria Di Pelabuhan Internasional



42. Perencanaa Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Melakukan Penyusunan Spip Tahun 2025



43. Kepala Bidang Koordinasi Pelaksana Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Melakukan Koordinasi Permohonan Fasilitasi Tempat Dan Waktu Pelaksanaan Sub Kegiatan Di Kabupaten Bintan



44. Kepala Bidang Koordinasi Pelaksana Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Melakukan Koordinasi Dengan Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau



45. Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Didampingi Kepala Bidang Koordinasi Perencanaan Dan Fasilitas Kerja Sama Dan Perencana Ahli Madya Mengikuti Rapat Koordinasi Persiapan Pembahasan Bahan Paparan Gubernur Terkait Pertemuan Forum Kerja Sama Sijori Di Ruang Rapat Biro Ekbang



46. Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Drs. H Doli Boniara, M.Si Bersama Stakeholder Bp2d Prov Kepri Melakukan Rapat Bersama Komisi 1 DPRD Provinsi Kepulauan Riau Di Graha Kepri Batam, Membahas Tentang Realisasi Anggaran



47. Koordinasi Korem Dengan Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Drs. H Doli Boniara, M.Si, Di Kantor BP2D Kepri



48. Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Menerima Kunjungan Audiensi Dari Wakapolda Kepri Di Kantor Bp2d Kepri



49. Kepala Bidang Koordinasi Pelaksanaan Ibu Ratna Sari Duta Dewi, SH., MH membuka Rapat sekaligus menjadi pembicara dalam pelaksanaan Rapat Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan Tahun Anggaran 2025. Adapun Rapat yang dilaksanakan secara Virtual , Zoom Meeting dihadiri oleh OPD teknis Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Perwakilan Dari BPPD dan Bagian Pengelolaan Perbatasan masing2 Daerah Kabupaten/ Kota.



50. Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Menghadiri Persidangan Ke-18 Sekretariat Bersama (Sekber) Jawatankuasa Kerja / Kelompok Kerja Pembangunan Sosio Ekonomi Malaysia-Indonesia (Jkk / Kk Sosek Malindo) Tahun 2025



51. Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Mendampingi Komisi 1 DPRD Provinsi Kepulauan Riau Melaksanakan Kunjungan Kerja Ke Kantor Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP RI) Di Jakarta



52. Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Bersama Kepala Bidang Koordinasi Perencanaan Dan Fasilitas Kerja Sama Melakukan Koordinasi Bersama Pihak Konjen RI Di Johor Malaysia Terkait Persiapan Sosek Malindo Di Johor Malaysia



53. Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Bersama Kepala Bidang Koordinasi Perencanaan Dan Fasilitasi Kerja Sama Melakukan Koordinasi Dengan Majelis Keselamatan Negara Negeri Johor Malaysia



54. Bidang monitoring dan evaluasi Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Melaksanakan Koordinasi terkait RENAKSI Tahun 2025 di Kabupaten Bintan



55. Bidang monitoring dan evaluasi Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau menerima laporan pembangunan tangki septik skala individual (minimal 25 kk) kelurahan pulau terong, kecamatan belakang padang (dak penugasan).



56. Bidang monitoring dan evaluasi Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau menerima laporan Pengadaan Xray untuk Penunpang di Raja Haji Abdullah Kabupaten Karimun.



57. Bidang monitoring dan evaluasi Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau menerima laporan penyaluran Program Keluarga Harapan dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kabupaten Natuna.



58. Bidang monitoring dan evaluasi Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau menerima laporan penyaluran Program Keluarga Harapan dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kabupaten Kepulauan Anambas



59. Pertemuan Tim Teknik Dan Persidangan Ke-21 Jkk/Kk Sosek Malindo 2025 Johor Malaysia 4-8 Agustus 2025.



60. Dalam rangka pelaksanaan Sub Kegiatan Bidang Koordinasi Pelaksanaan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau mengadakan Sosialisasi Potensi Sektor Kelautan untuk Peningkatan Ekonomi Masyarakat Kawasan Perbatasan yang dilaksanakan melalui Zoom Meeting pada 6 Agustus 2025.



61. Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Menghadiri Seminar Implementasi Als Perubahan Kinerja Organisasi Kepala Bidang Monitoring Dan Evaluasi Muchtadi, SE., MM.



62. Kepala badan pengelola perbatasan daerah provinsi kepulauan riau Drs. H.Doli Boniara, M.Si menerima kunjungan praktisi dari australia di kantor bp2d provinsi kepri.



63. Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Drs. H.Doli Boniara, M.Si Menjadi Moderator Pada Kegiatan Program Studi Hubungan Internasional Fisip Umrah Dengan Judul Meniti Karier Diplomasi : Langkah Awal Bersama Praktisi Diplomatik.



64. Kepala badan pengelola perbatasan daerah provinsi kepulauan riau Drs. H.Doli Boniara, M.Si MENGHADIRI RAPAT PATKOR OPTIMA MALINDO 33 Tahun 2025, di SP Premier Hotel Batam yang diselenggarakan oleh BAKAMLA RI.



65. Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Drs. H.Doli Boniara, M.Si Menghadiri Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Pembentukan Migran Center Dan Pembahasan Peluang Kerja Bagi Cpmi Di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau.



66. Kepala badan pengelola perbatasan daerah provinsi kepulauan riau Drs. H.Doli Boniara, M.Si Menghadiri acara launching kampung pangan laut di desa pengudang kabupaten bintang



67. Bidang koordinasi perencanaan dan fasilitasi kerja sama badan pengelola perbatasan daerah provinsi kepulauan riau menghadiri sosialisasi penggunaan produk informasi geospasial dasar dalam mendukung pembangunan daerah.



68. Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Menghadiri Rapat Anev Bulanan Gugus Tugas Daerah PP-TPPO Provinsi Kepri Di Gedung Lancang Kuning Polda Kepri



69. Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Menghadiri MESYUARAT TIM TEKNIK TEKNIS DAN SIDANG KE-38 JKK/KK SOSEK MALINDO PERINGKAT/ TINGKAT NEGERI SERAWAK-PROVINSI KALIMANTAN BARAT



70. Kepala Badan Pengelola Aperbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Bersama Bakamla Dan Bp3mi Kepri Melakukan Penjemputan 150 orang TPPO Dari Malaysia Melalui Pelabuhan Batam Centre Ferry Terminal



71. Kepala Badan Pengelola Aperbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Menghadiri Rapat Koordinasi Perencanaan Dan Pengendalian Pengelolaan Batas Wilayah Negara Dan Kawasan Perbatasan Tahun 2025



72. Persidangan Ke-40 Jawatankuasa Kerja/Kelompok Kerja Pembangunan Sosio-Ekonomi Malaysia-Indonesia (Jkk/Kk Sosek Malindo Langkawi) Tahun 2025



73. Kepala BADAN PENGELOLA APERBATASAN DAERAH PROV KEPRI Mewakili Gubernur/ Wakil Gubernur pada Kegiatan Pelepasan Satgas disejalankan dengan Pengiriman Bantuan untuk Bencana Alam Aceh, Sumut dan Sumbar dg menggunakan Kapal BAKAMLA RI KN Pulau Nipah dan KN Pulau Dana. Kegiatan dihadiri Ketua DPRD Provinsi Kepri, Deputi BAKAMLA RI, Kogabwilhan, TNI Polri, Pemko Batam dan instansi terkait lainnya.

